



# LAPORAN SURVEI

**KONDISI EKSISTING  
& KAPASITAS**

**KELEMBAGAAN OMS DI INDONESIA**

**2024**



# Laporan Survei: Kondisi Eksisting dan Kapasitas Kelembagaan OMS di Indonesia

Dokumen ini disusun oleh  
Konsil LSM Indonesia dengan kolaborasi  
Pokja Dana Abadi Organisasi Masyarakat Sipil

## Peneliti Konsil LSM Indonesia

Anick HT  
Sarwitri  
Yusep Munawar Sofyan

## Tim Enumerator

Hilda Ratu Harum	Rahma Gina Salsabila
Nurul Azizah	Oscar Wanera Siregar
Reyhan Gilang D.	Syalaisha Putri A.

## Layout

Ahmad Rozaq

## International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)

Jl. Jati Padang Raya, RT.3/RW.4, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540  
[office@infid.org](mailto:office@infid.org)

## Konsil LSM Indonesia

Jl. Duren Tiga Barat VI No.36 Pancoran, Jakarta Selatan 12760  
[sekretariat@konsilsm.or.id](mailto:sekretariat@konsilsm.or.id)

Publikasi ini telah disusun dan dicetak oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dengan dukungan dari INKLUSI. Program INKLUSI merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Indonesia dan Australia dalam memperjuangkan sebuah tatanan masyarakat yang inklusif, dimana semua orang dapat secara adil dan setara untuk berpartisipasi dalam politik dan kehidupan yang layak secara ekonomi dan sosial terlepas dari keberagaman gender, agama, usia, ras, fisik, dan aspek-aspek lainnya.

Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia mengalami berbagai dinamika dan tantangan khususnya tuntutan untuk terus berkembang sembari menjadi jembatan antara kebutuhan warga dengan negara. Salah satu tantangan yang dihadapi misalnya memastikan kualitas demokrasi dan layanan publik bagi warga pasca situasi pemulihan COVID19. OMS Indonesia masih merasakan dampak COVID19, dimana 23% OMS telah berhenti beroperasi di saat COVID19 karena kekurangan dana operasional akibat fokus penanganan pandemi di nasional dan global. Hal ini diperparah ketika OMS Indonesia sangat bergantung pada bantuan internasional.

Semenjak status Indonesia menjadi anggota G20 dan negara berpendapatan menengah ke atas, termasuk menjadi kekuatan ekonomi baru di pasar global, terjadi perubahan pada lanskap keberlanjutan OMS. Donor internasional yang sebelumnya memberikan dukungan pendanaan bagi kerja-kerja OMS di Indonesia, secara pasti dan perlahan mulai mengalihkan sumber dukungannya ke negara lain. Kondisi ini memberikan ancaman bagi keberlangsungan dan keberlanjutan OMS.

Pada sisi lain, Pemerintah Indonesia juga telah membentuk Lembaga Dana Kerjasama pembangunan Internasional (LDKPI atau Indonesian Aid) pada 2019 dengan mekanisme Dana Abadi untuk menyalurkan hibah bantuan pembangunan kepada berbagai negara dan LSM Asing. Melalui penyertaan dana abadi tersebut, Indonesia AID diharapkan dapat meningkatkan komitmen pemberian hibah dan melakukan inovasi pemupukan dana melalui berbagai skema penempatan dana abadi, hingga pengembangan sumber dan mekanisme pendanaan baru.

Idealnya, LSM di Indonesia turut mendapatkan perhatian yang sama sebagaimana perhatian pemerintah kepada negara asing dan LSM Asing melalui penyaluran bantuan lewat IndonesianAID. Dalam kerangka tersebut, LSM Indonesia memerlukan kelembagaan pendanaan yang dapat mengelola sumber pendanaan yang cukup, memungkinkan pendanaan multi tahun atau terus menerus guna memastikan keberlanjutannya.

**Studi ini memiliki empat tujuan yaitu;** a) Mengetahui kondisi eksisting OMS di Indonesia; b) Mengetahui kapasitas kelembagaan OMS di Indonesia; c) Mengidentifikasi model peningkatan kapasitas OMS di Indonesia; d) Mengidentifikasi model pemberdayaan OMS di Indonesia.

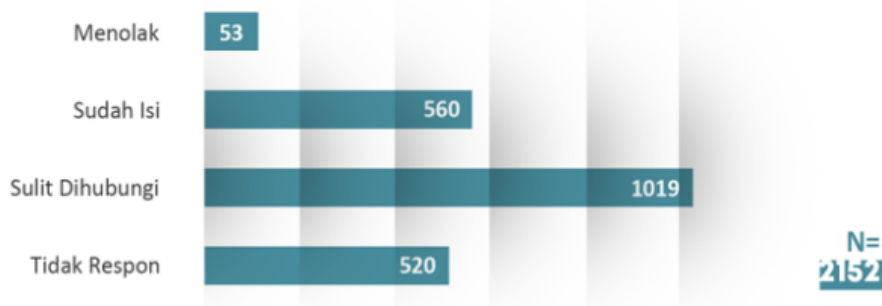
Terdapat tiga definisi operasional yang digunakan dalam studi ini. **Pertama, eksistensi organisasi.** Istilah ini mengacu pada adanya wujud serta prasyarat dasar sebuah organisasi. Dalam konteks itu rumusan eksistensi dalam penelitian ini merujuk pada 4 hal, yakni: legalitas (berbadan hukum dan tidak berbadan hukum), tujuan organisasi, struktur organisasi, laporan keuangan dan adanya aktivitas kegiatan. **Kedua, kapasitas organisasi.** Dalam hal ini didefinisikan sebagai

serangkaian proses, praktik, manajemen, atau atribut yang membantu organisasi untuk tumbuh dan berkembang. Dimensi kapasitas organisasi dalam hal ini terdiri dari: Kepemimpinan, Strategi, Struktur/tata kelola, Keterampilan/kompetensi, Sumber daya manusia, Akuntabilitas, dan Aktivitas Berkelanjutan.

**Ketiga, pemberdayaan.** Dalam penelitian ini pemberdayaan diartikan sebagai cara individu, kelompok, atau pun komunitas untuk mengontrol kehidupan mereka sendiri dengan keinginan mereka melalui suatu proses yang terus menerus untuk meningkatkan kemampuan serta memperkuat potensi. Populasi dan tingkat partisipasi. Penelitian ini terhubung dengan dan dikembangkan dari penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya (Konsil LSM Indonesia-Bappenas, 2022) yang menghasilkan 709 OMS terverifikasi. Data OMS yang menjadi populasi sementara dalam penelitian ini adalah baseline data pada penelitian tahu 2022 tersebut sebanyak 2.790 data OMS, termasuk data 709 OMS yang terverifikasi. Data lainnya yang dihimpun adalah data melalui jaringan sebanyak 73 lembaga dan data OMS melalui website Siormas Kemendagri sebanyak 34 lembaga.

OMS yang Memiliki Kontak (WA/email/Tlp)	Jumlah
Data mentah Verifikasi Data OMS tidak berpartisipasi	1.336
Data OMS Verifikasi Konsil-Bappenas	709
Data Mitra jaringan	73
Hunting via media digital	34
Jumlah OMS yang memiliki kelengkapan kontak	2.152

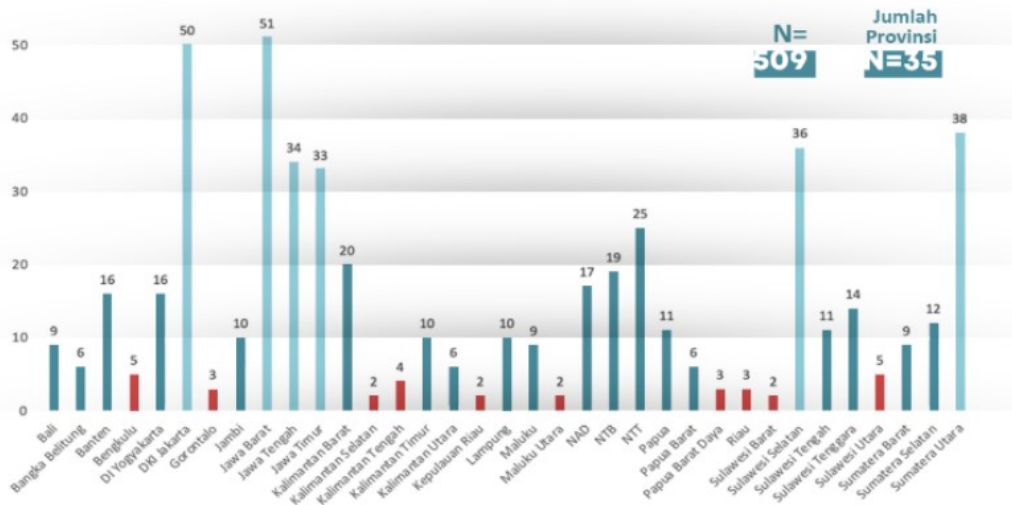
Tabel: Data OMS dengan kelengkapan kontak.



Grafik: Tingkat partisipasi OMS dalam survei

Dari 560 data survei yang dihasilkan, setelah proses cleaning (data dobel dan data yang tidak memenuhi kriteria OMS), dihasilkan data bersih sebanyak 509 lembaga.

### Partisipasi OMS Berdasarkan Provinsi



### Partisipasi OMS Berdasarkan Kabupaten/Kota

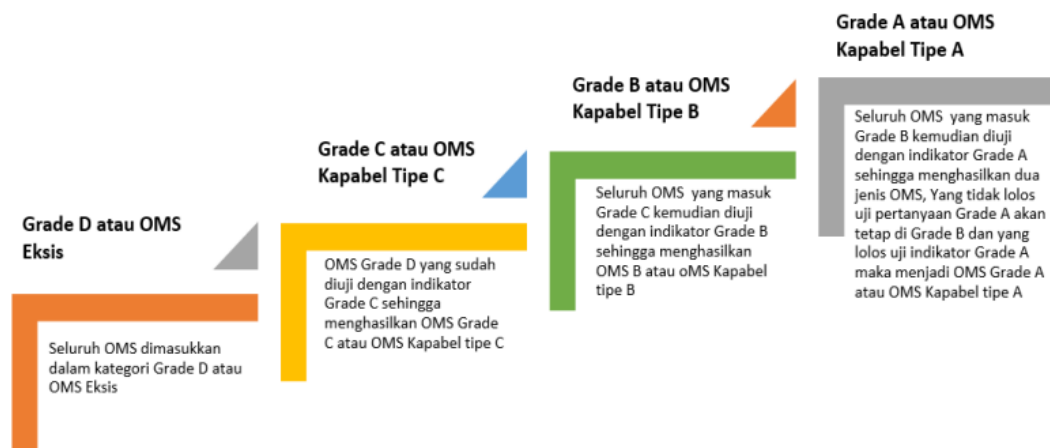


Metode verifikasi dan analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data lapangan menggunakan online survey.

Eksistensi dan Kapasitas organisasi dalam hal ini diterjemahkan dalam 53 indikator. 17 indikator dasar digunakan untuk mengukur eksistensi organisasi.

Analisis data yang dilakukan adalah dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan variabel penelitian, membuat grading, dan menganalisis model pemberdayaan organisasi untuk meningkatkan grading OMS.

53 indikator tersebut diklasifikasi ke dalam empat grade, yakni: Grade D (eksis) terdiri dari 17 indikator; Grade C terdiri dari 33 indikator, Grade B terdiri dari 39 indikator, Grade A terdiri dari 53 indikator.

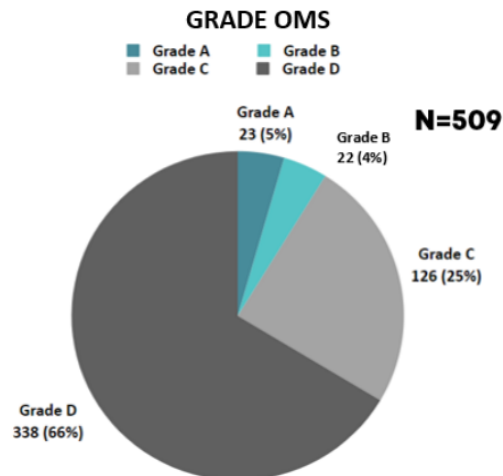


*Grafik Simulasi grading*

Adapun dimensi pemberdayaan, dalam survei verifikasi ini dibuat 3 pertanyaan terbuka dan 1 pertanyaan tertutup untuk menggali potensi dan kebutuhan OMS agar berdaya. Ketiga pertanyaan terbuka tersebut dibagi ke dalam 3 rumpun pemberdayaan, yakni enabling, empowering dan protecting.

Empat temuan utama. **Pertama**, dari 509 OMS yang terverifikasi, 338 OMS (66%) hanya masuk pada kategori OMS eksisting (eksis). Ini adalah kategori minimal dalam riset ini (Grade D). 171 OMS (34%) yang berpartisipasi masuk pada kategori lembaga kapabel, dengan tingkat yang berbeda. Merujuk pada grading yang ditetapkan dalam penelitian ini, hasilnya adalah sebagai berikut:

- OMS dengan kapasitas grade A sebanyak 23 lembaga (5%) yang tersebar di 11 provinsi
- OMS dengan kapasitas grade B sebanyak 22 (4%) lembaga dan tersebar di 15 provinsi
- OMS dengan kapasitas grade C sebanyak 126 (25%) lembaga dan tersebar di 29 provinsi



*OMS terverifikasi berdasarkan 4 grade*

**Kedua**, model peningkatan kapasitas OMS dari data OMS yang mengikuti survei sangat beragam dan di setiap grade memiliki keunikan masing-masing. Terkait dengan model pengembangan kapasitas, penelitian menghasilkan model pengembangan potensi sebagai berikut:

- OMS Grade A mengidentifikasi satu hal pokok soal peningkatan kapasitas, yakni: aspek pemberdayaan komunitas. Artinya OMS di Grade A Sudah bergeser dari penguatan ke dalam lembaganya sendiri menjadi pengembangan kapasitas ke mitra-mitra lokal/penerima manfaat.
- OMS Grade B lebih menitikberatkan pada kemandirian pendanaan organisasi yakni melalui Kewirausahaan, peningkatan kapasitas organisasi (terkait manajerial organisasi, aturan organisasi) serta soal pendanaan yang melibatkan pihak luar, terutama lembaga donor.
- OMS Grade C menyatakan lebih memprioritaskan pada aspek peningkatan kapasitas SDM organisasi, lalu peningkatan kapasitas organisasi dan soal pendanaan yang melibatkan pihak ketiga dalam hal ini donor, pemerintah maupun swasta.
- OMS Grade D hampir sama dengan OMS Grade C, OMS Grade D lebih memprioritaskan soal peningkatan kapasitas SDM, peningkatan organisasi dan kewirausahaan serta pemberdayaan komunitas.

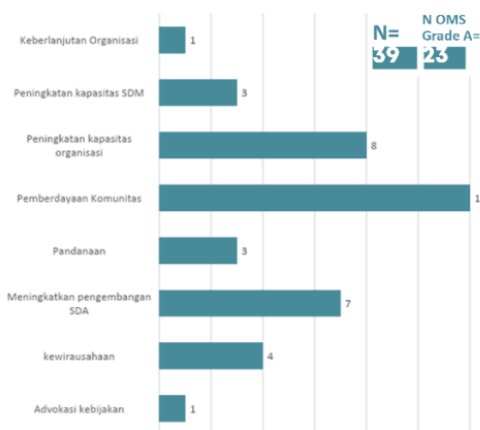
**Ketiga**, terkait dengan model pemberdayaan, temuan hasil survei dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan urutan paling banyak disebut oleh OMS terkait dengan model pemberdayaan.

- Pertama, Model pemberdayaan yang paling banyak diharapkan oleh OMS dari Grade A/D adalah model pemberdayaan komunitas/masyarakat.
- Kedua, model pemberdayaan lainnya yang diharapkan oleh OMS adalah soal peningkatan kapasitas organisasi, baik dari sisi manajerial, finansial, bahkan pembuatan SOP yang dibutuhkan oleh OMS. Model pemberdayaan dengan

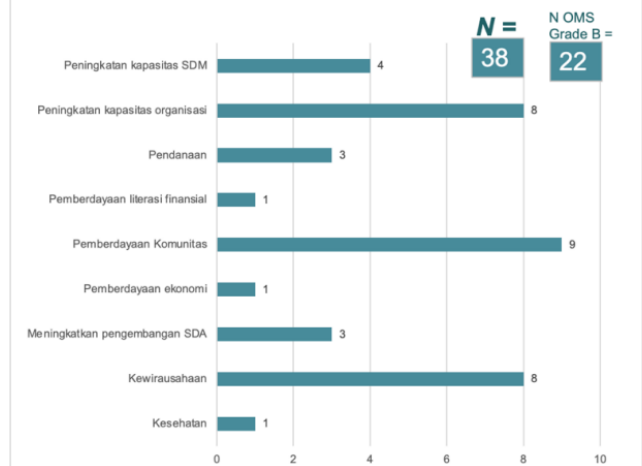
spesifikasi soal peningkatan kapasitas ini disebut oleh seluruh OMS dari semua grade sebagai prioritas kedua.

- Ketiga, untuk model pemberdayaan ketiga agak berbeda antar OMS. OMS Grade A, misalnya lebih mengedepankan aspek soal peningkatan potensi pengembangan SDA. Untuk OMS Grade B memilih model pemberdayaan untuk keberlanjutan OMS, yakni melalui kewirausahaan, OMS grade C memilih 2 model, yakni peningkatan kapasitas SDM dan kewirausahaan untuk keberlanjutan organisasi. Dan OMS Grade D memilih model peningkatan kapasitas SDM pengurus organisasi.

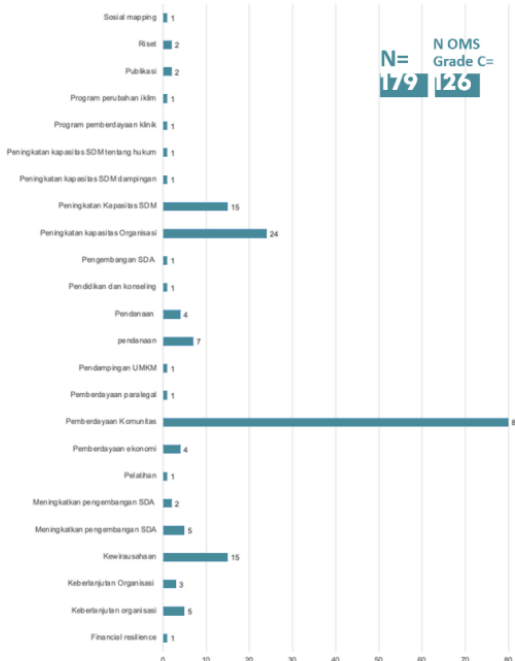
**Model Pemberdayaan yang Diharapkan Oleh OMS Grade A**



**Model Pemberdayaan yang Diharapkan oleh OMS Grade B**



**Model Pemberdayaan yang Diharapkan Oleh OMS Grade C**



**Model Pemberdayaan yang Diharapkan Oleh OMS Grade D**



*Grafik: Model pemberdayaan berdasarkan grade*

**Rekomendasi dibagi menjadi tiga** yaitu untuk umum, pemerintah dan OMS, ditujukan untuk memberikan basis penguatan dan orientasi implementasi Dana Abadi OMS yang sejak awal mendasari dilakukannya penelitian ini.

**Rekomendasi untuk umum.** Melihat tingkat urgensinya yang sangat tinggi, pada tingkat realisasinya, Dana Abadi OMS harus memberi perhatian khusus pada dimensi pemberdayaan OMS, terutama kepada OMS-OMS yang tingkat kapabilitasnya relatif rendah. Dalam hal ini, kebijakan affirmative action bisa dipertimbangkan menjadi alternatif untuk mendorong pemerataan tingkat partisipasi masyarakat sipil dalam proses pembangunan. Dalam konteks pemberdayaan dan peningkatan kapasitas, penting kiranya melihat tingkat kapabilitas OMS untuk merumuskan model pemberdayaan dan peningkatan kapasitas yang lebih tepat dan terukur. Dana Abadi Organisasi Masyarakat Sipil harus dikampanyekan lebih lanjut kepada kelompok masyarakat sipil yang lebih luas agar terimplementasi secara tepat sasaran dan transparan.

**Rekomendasi untuk pemerintah.** Mengingat pentingnya posisi OMS dalam pembangunan demokrasi, persoalan database OMS harus menjadi isu yang mesti dipecahkan bersama, baik oleh pemerintah (Kemenkumham sebagai pemangku data registrasi, Kemendagri sebagai pemangku pemberdayaan Ormas) dan lembaga lainnya, serta organisasi masyarakat sipil sendiri. Terkait dengan database Organisasi Masyarakat Sipil (Ormas Berbadan Hukum), pemerintah, dalam hal ini adalah Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, perlu lebih terbuka dan membangun mekanisme akses terhadap data AHU. Data akumulatif tanpa pemutakhiran akan berakibat pada kekeliruan pemetaan dan perlakuan. Demikian juga dengan database Organisasi Masyarakat Sipil berbasis Surat Keterangan Terdaftar yang berada dalam wilayah kerja Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri perlu menjalin kerja sama dan koordinasi yang lebih intensif dengan Organisasi Masyarakat Sipil untuk secara reguler melakukan verifikasi dan pemetaan kapabilitas Organisasi Masyarakat Sipil.

**Rekomendasi untuk OMS.** Terkait dengan ketimpangan kapabilitas antar Organisasi Masyarakat Sipil, sangat penting dipikirkan untuk membangun kesadaran bersama akan pentingnya penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat sipil. Inisiatif-inisiatif penguatan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil harus menjadi concern bersama. Termasuk dalam hal ini adalah inisiatif untuk mengupayakan pendanaan alternatif. Dalam konteks penguatan tingkat kepercayaan publik dan pemerintah terhadap masyarakat sipil, Organisasi Masyarakat Sipil perlu membangun dan mengembangkan berbagai instrumen yang mendorong tingkat keberdayaan, akuntabilitas, dan transparansi di dalam diri Organisasi Masyarakat Sipil sendiri.

**Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai:**

1. Dasar acuan untuk memetakan OMS di Indonesia sebagai bahan pertimbangan penyusunan dan implementasi kebijakan Dana Abadi OMS;
2. Data awal untuk melakukan verifikasi faktual data base OMS;
3. Dasar acuan untuk membangun tools dan mekanisme verifikasi dan pemetaan kapasitas OMS yang bisa direplikasi lebih luas;

Bahan rujukan ataupun pertimbangan dalam menyusun kebijakan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas OMS

# DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>a</b>
Daftar Isi	i
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	vii
Daftar Singkatan	viii
Kata Pengantar	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
<b>BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN</b>	<b>4</b>
2.1 Penelitian Terdahulu	4
2.2 Kerangka Teori	5
2.2.1 Kondisi <i>Existing</i> (Eksistensial)	5
2.2.2 Indikator Eksistensial Organisasi	6
2.2.3 Definisi Kapasitas Organisasi	7
2.2.4 Komponen Inti Kapasitas Organisasi	7
2.2.5 Pemberdayaan	8
2.3 Desain Penelitian	10
<b>BAB 3 METODOLOGI</b>	<b>11</b>
3.1 Metode Penelitian	11
3.2 Definisi Operasional dan Konsep	11
3.3 Populasi Sampel	15
3.3.1 Populasi	15
3.3.2 Teknik Sampling	16
3.4 Analisis Data	16
3.5 Proses Pelaksanaan Penelitian	18
<b>BAB 4 TEMUAN</b>	<b>19</b>
4.1 Partisipasi Survei	19
4.2 OMS Terverifikasi	22

4.3	Dimensi Eksistensi	25
4.3.1	Eksistensi rumpun wujud (legalitas dan alamat kantor)	26
4.3.2	Rumpun Tujuan dan Kegiatan	28
4.3.3	Rumpun Struktur Organisasi	29
4.3.4	Laporan Keuangan	29
4.3.5	Aktivitas	30
4.4	Dimensi Kapasitas Organisasi	31
4.4.1	Rumpun Strategi	31
4.4.2	Rumpun Struktur atau Tata Kelola	33
4.4.3	Rumpun Keahlian atau Kompetensi	34
4.4.4	Rumpun Sumber Daya Manusia (SDM)	38
4.4.5	Rumpun Akuntabilitas	42
4.4.5.1	Akuntabilitas Kinerja	42
4.4.5.2	Pengelolaan Keuangan (Transparansi)	46
4.4.5.3	Transparansi Informasi atau Visibilitas	49
4.4.5.4	Pencegahan Konflik Kepentingan	51
4.4.6	Rumpun Aktivitas Keberlanjutan	53
4.5	Pemberdayaan OMS	56
4.5.1	Pemberdayaan Rumpun <i>Enabling</i>	57
4.5.2	Pemberdayaan Rumpun <i>Empowering</i>	59
4.5.3	Pemberdayaan Rumpun <i>Protecting</i>	63
4.6	Model Pemberdayaan	64
<b>BAB 5 ANALISIS TEMUAN</b>		<b>67</b>
5.1	Analisis Isu Utama Organisasi Berdasarkan Cakupan Area Kerja	67
5.2	Grading Organisasi	69
5.3	Grading Survei Verifikasi Konsil-INFID	69
5.3.1	Grade A atau OMS Kapabel tipe A	71
5.3.2	Grade B atau OMS Kapabel tipe B	72
5.3.3	Grade C atau OMS Kapabel tipe C	74
5.3.4	Grade D atau OMS Eksis	78
5.5	Analisis Model Pemberdayaan OMS	89
5.5.1	Pemberdayaan <i>Enabling</i> Grade A	89
5.5.2	Pemberdayaan <i>Empowering</i>	94
5.5.3	Pemberdayaan <i>Protecting</i> Grade A-D	100
5.6	Model Pemberdayaan	104
5.7	<i>Spider Chart</i> : Identifikasi Kebutuhan Pemberdayaan OMS	108
5.7.1	Grade A – KAPAL Perempuan	108
5.7.2	Grade B – ASPPUK	109
5.7.3	Grade C– Yayasan Sehat Peduli Kasih	110

5.7.4	Grade D– Beranda Perempuan	111
<b>BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>		<b>113</b>
6.1	Kesimpulan	113
6.2	Rekomendasi	116
6.2	Umum	116
6.2	Pemerintah	116
6.2	Organisasi Masyarakat Sipil	117
<b>Daftar Pustaka</b>		<b>118</b>
<b>Lampiran</b>		<b>120</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sampel Data Riset Pendataan OMS 2022	4
Gambar 2.2	Desain penelitian	10
Gambar 3.1	Grafik Skema Raw Data-Baseline Data untuk menentukan Populasi	16
Gambar 3.2	Alur pelaksanaan penelitian	18
Gambar 4.1	OMS yang Memiliki Kontak	20
Gambar 4.2	Partisipasi OMS Berdasarkan Provinsi	22
Gambar 4.3	Partisipasi OMS Berdasarkan Kabupaten/Kota	23
Gambar 4.4	Cakupan Area Kerja OMS	23
Gambar 4.5	Partisipasi OMS Berdasarkan Bentuk Organisasi	24
Gambar 4.6	Peta OMS Berdasarkan Tahun Berdiri	24
Gambar 4.7	Status kepemilikan kantor OMS	25
Gambar 4.8	Grafik kepemilikan kantor	26
Gambar 4.9	Kepemilikan Legalitas	27
Gambar 4.10	Jenis Legalitas atau pengesahan OMS	27
Gambar 4.11	Kepemilikan struktur organisasi	29
Gambar 4.12	Kempemilikan laporan keuangan lembaga	30
Gambar 4.13	Grafik Pelibatan Penerima Manfaat dalam Renstra	32
Gambar 4.14	Mekanisme pengawasan	33
Gambar 4.15	Fokus Isu OMS	34
Gambar 4.16	Top list isu OMS	35
Gambar 4.17	Keahlian OMS	37
Gambar 4.18	SOP Karyawan	39
Gambar 4.19	Grafik Kepemilikan Mekanisme Volunteer	40
Gambar 4.20	Grafik Kepemilikan Perencanaan peningkatan SDM	41
Gambar 4.21	Grafik Kepemilikan Mekanisme Keamanan Staf	42
Gambar 4.22	Grafik Kepemilikan program Rutin	43
Gambar 4.23	Grafik Kepemilikan laporan program	43
Gambar 4.24	Audit kelembagaan	45
Gambar 4.25	Grafik kepemilikan Mekanisme Rancangan untuk mengumpulkan dan menganalisis pembelajaran organisasi	46
Gambar 4.26	Kepemilikan NPWP	47
Gambar 4.27	Kepemilikan rekening bank	47
Gambar 4.28	Grafik Kepemilikan SOP Keuangan	48
Gambar 4.29	Grafik lapor pajak	48
Gambar 4.30	Kepemilikan media publikasi rutin	50
Gambar 4.31	Grafik kepemilikan annual report OMS	51

Gambar 4.32	Grafik mekanisme keamanan data	52
Gambar 4.33	Kepemilikan SOP Barang dan Jasa	54
Gambar 4.34	Kepemilikan asset sendiri	54
Gambar 4.35	Grafik kepemilikan mekanisme atau tools keberlanjutan organisasi	55
Gambar 4.36	Grafik Kepemilikan Unit Usaha Organisasi	55
Gambar 4.37	Grafik 7 Potensi Tertinggi yang Ingin Dikembangkan oleh OMS (Pemberdayaan-Enabling)	58
Gambar 4.38	Grafik 10 Model Penguatan Potensi OMS	61
Gambar 4.39	Grafik Keikutsertaan OMS dalam program-program pemerintah/swasta/donor pemberdayaan-protecting	64
Gambar 4.38	Grafik Kumulatif Model Pemberdayaan yang Diharapkan oleh OMS	65
Gambar 5.1	Grafik Simulasi Grading	69
Gambar 5.2	Grade OMS	70
Gambar 5.3	Grafik Kepemilikan Legalitas/Pengesahan OMS Grade	70
Gambar 5.4	Grafik Domisili OMS Grade A Berdasarkan Provinsi	71
Gambar 5.5	Grafik Domisili OMS Grade B Berdasarkan Provinsi	73
Gambar 5.6	Grafik Domisili OMS Grade C Berdasarkan Provinsi	74
Gambar 5.7	Grafik Domisili OMS Grade D Berdasarkan Provinsi	79
Gambar 5.8	Grafik Potensi yang Ingin Ditingkatkan OMS Grade A	90
Gambar 5.9	Grafik Potensi yang Ingin Ditingkatkan OMS Grade B	91
Gambar 5.10	Grafik Potensi yang Ingin Ditingkatkan OMS Grade C	92
Gambar 5.11	Grafik Potensi yang Ingin Ditingkatkan OMS Grade D	93
Gambar 5.12	Grafik Cara OMS memperkuat Potensi OMS Grade A	94
Gambar 5.13	Grafik Potensi yang Ingin Ditingkatkan OMS Grade B	95
Gambar 5.14	Grafik Potensi yang Ingin Ditingkatkan OMS Grade C	96
Gambar 5.15	Grafik Potensi yang Ingin Ditingkatkan OMS Grade D	97
Gambar 5.16	Grafik Keikutsertaan OMS dalam program pemerintah Grade A	100
Gambar 5.17	Grafik Keikutsertaan OMS dalam program pemerintah Grade B	100
Gambar 5.18	Grafik Keikutsertaan OMS dalam program pemerintah Grade C	101
Gambar 5.19	Grafik Keikutsertaan OMS dalam program pemerintah Grade D	102
Gambar 5.20	Grafik Perbandingan partisipasi OMS dalam program pemerintah/swasta/donor	103
Gambar 5.21	Grafik Model pemberdayaan yang diharapkan OMS Grade A	104
Gambar 5.22	Grafik Model pemberdayaan yang diharapkan OMS Grade B	105
Gambar 5.23	Grafik Model pemberdayaan yang diharapkan OMS Grade C	106
Gambar 5.24	Grafik Model pemberdayaan yang diharapkan OMS Grade D	107
Gambar 5.27	Spider Check OMS Grade A	109
Gambar 5.28	Spider Check OMS Grade B	110

Gambar 5.29	Spider Check OMS Grade C	111
Gambar 5.30	Spider Check OMS Grade D	112
Gambar 6.1	Keikutsertaan OMS dalam program pihak lain	115

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Pengkategorisasian	11
Tabel 3.2	Grading OMS	16
Tabel 4.1	Raw Data	19
Tabel 4.2	Data OMS dengan Kelengkapan Kontak	19
Tabel 4.3	Enam Lembaga yang tidak sesuai dengan definisi OMS	21
Tabel 4.4	Penulisan visi dan misi organisasi	28
Tabel 4.5	Kepemilikan AD/ART	28
Tabel 4.6	Aktivitas Lembaga	30
Tabel 4.7	Kepemilikan Rencana Kerja	31
Tabel 4.8	Strategi Organisasi	31
Tabel 4.9	Kepemilikan Mekanisme Rapat	33
Tabel 4.10	Kelompok Isu lain di OMS	36
Tabel 4.11	Keahlian organisasi	38
Tabel 4.12	Kepemilikan tenaga ahli	39
Tabel 4.13	SOP Program	44
Tabel 4.14	Penerima Manfaat	44
Tabel 4.15	MEL	45
Tabel 4.16	Audit project	45
Tabel 4.17	Visibilitas OMS	49
Tabel 4.18	Kepemilikan website	49
Tabel 4.19	Mekanisme anti-fraud	51
Tabel 4.20	Kepemilikan sumber dana	53
Tabel 4.21	Diversifikasi pendanaan	53
Tabel 4.22	List Potensi yang ingin dikembangkan oleh OMS	58
Tabel 4.23	Penguatan Potensi OMS (Pemberdayaan-Empowering) lainnya	61
Tabel 5.1	<i>Sebaran isu utama organisasi berdasarkan provinsi</i>	67
Tabel 5.2	List OMS Grade A	72
Tabel 5.3	List OMS Grade B	73
Tabel 5.4	List OMS Grade C	75
Tabel 5.5	List OMS Grade D	80

## DAFTAR SINGKATAN

OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
AHU	Administrasi Hukum Umum
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
Ormas	Organisasi Kemasyarakatan
UU	Undang-undang
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
INFID	International NGO Forum on Indonesia Development
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
SDM	Sumber Daya Manusia
FGD	<i>Focused Group Discussion</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
AD/ART	Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
SOP	Standar Operasional Prosedur
SKT	Surat Keterangan Terdaftar
Renstra	Rencana Strategis
MEL	<i>Monitoring, Evaluation, and Learning</i>
SDA	Sumber Daya Alam
NTB	Nusa Tenggara Barat
NTT	Nusa Tenggara Timur
DKI	Daerah Khusus Ibukota

## KATA PENGANTAR

Melalui RPJMN 2015-2019, pemerintahan Presiden Joko Widodo secara khusus, di awal periode pertama kepemimpinannya telah meletakkan gagasan pembentukan “*Democratic Trust Fund*”. Meski gagasan itu terus bergulir, namun bentuk konkret yang muncul hingga saat ini adalah apa yang disebut sebagai *Indonesian Aid*, atau apa yang disebut LDKPI (Lembaga Dana Kerjasama pembangunan Internasional) pada 2019 untuk menyalurkan hibah bantuan pembangunan kepada berbagai negara dan LSM di negara lain.

Kelompok Kerja Dana Abadi OMS yang terdiri dari INFID, KAPAL Perempuan, Perkumpulan Prakarsa, Konsil LSM Indonesia, Penabulu, *Transparency International Indonesia* (TII), Remdec Swaprakarsa dan Indonesia untuk Kemanusiaan (IKA) sejak tahun 2021 telah mendorong realisasi Dana Abadi OMS ini melalui berbagai pendekatan dan agenda advokasi, termasuk upaya mendorong penerbitan Peraturan Presiden yang akan menjadi payung Dana Abadi OMS ini.

Paralel dengan advokasi tersebut, pemerintah melalui Bappenas juga telah memasukkan gagasan pembiayaan melalui dana abadi organisasi masyarakat sipil dalam RPJPN 2025–2045 serta RPJMN 2025-2030. Meski begitu, kebijakan yang mendukung ekosistem pendanaan bagi LSM Indonesia di dalam negeri masih belum tersedia hingga saat ini.

Dalam konteks mendorong penyiapan basis pemetaan kebutuhan lebih jauh terhadap kebutuhan pendanaan untuk OMS, salah satu hal penting adalah proses identifikasi eksistensi dan tingkat kapabilitas OMS itu sendiri. Isu yang tak kalah penting dalam hal ini adalah akuntabilitas OMS. Meski peran OMS diakui strategis dalam proses demokratisasi, namun tingkat kepercayaan publik terhadap kompetensi OMS rendah. Edelman Trust Barometer tahun 2021 mencatat bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap OMS berada di angka 70%, lebih rendah dari tingkat kepercayaan terhadap pemerintah (76%) dan bisnis (81%).

Karena itu, isu akuntabilitas, kompetensi, dan tata kelola organisasi menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dari isu keberlanjutan OMS. Upaya diversifikasi pendanaan OMS, misalnya, harus dibarengi dengan upaya untuk memperkuat akuntabilitas, kompetensi, dan tata kelola organisasi masyarakat sipil.

Penelitian awal ini adalah bagian dari upaya tersebut. Agenda penguatan masyarakat sipil yang sedang digagas oleh pemerintah melalui Dana Abadi OMS harus memiliki basis pijakan data solid yang memotret kondisi faktual tingkat keberdayaan OMS. Orientasi pemberdayaan masyarakat sipil juga harus dimulai dengan menemukenali tingkat keberdayaan OMS yang ada saat ini. []



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Keberadaan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) telah mendapatkan pengakuan dari banyak pihak dalam bernegara Indonesia. Peran penting OMS dalam pembangunan dan demokrasi, antara lain adalah melakukan pemberdayaan masyarakat, advokasi kebijakan publik, dan kontrol sosial. Bahkan OMS juga banyak yang fokus pada kerja-kerja layanan dan pendampingan.

Semenjak status Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke atas dan menjadi kekuatan ekonomi baru di pasar global, terjadi perubahan pada lanskap keberlanjutan OMS. Donor internasional yang sebelumnya memberikan dukungan pendanaan bagi kerja-kerja OMS di Indonesia, secara pasti dan perlahan mulai mengalihkan sumber dukungannya ke negara lain. Kondisi ini memberikan ancaman bagi keberlangsungan dan keberlanjutan OMS.

Berbagai cara dan pendekatan telah dicoba oleh banyak OMS agar tetap bisa bertahan. Difersifikasi sumber dana juga menjadi topik yang didiskusikan di banyak forum. Namun tetap sulit, mengingat karakter OMS yang terbiasa bergantung kepada pendanaan hibah lembaga donor internasional. Kondisi ini kemudian melahirkan situasi baru yang memaksa OMS saling berkompetisi untuk memenangkan sebuah tender *project*, yang juga memunculkan gap antara OMS besar dan OMS kecil. Beberapa syarat utama bagi OMS agar dilirik oleh lembaga donor internasional, antara lain adalah memiliki AHU, memiliki laporan audit kelembagaan, dan memiliki laporan tahunan lembaga yang terpublikasi. Dua syarat terakhir merupakan kondisi pencapaian organisasi pada level tertinggi. Karena, sebuah organisasi yang dapat melakukan audit kelembagaan berarti organisasi tersebut dalam kondisi *survive*, bahkan aman secara keuangan. Kemudian untuk memiliki laporan tahunan yang terpublikasi, artinya organisasi tersebut memiliki aktivitas/program. Jika kedua syarat tersebut digabungkan maka organisasi tersebut berstatus berkembang dan *survive*. Di sisi lain, OMS kecil secara otomatis kalah bersaing dengan OMS-OMS besar.

Namun fakta lain juga perlu dicatat, bahwa jumlah Ormas di Indonesia terus tumbuh. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merilis data Ormas pada November 2019 sebanyak 431.500 dan pada Januari 2022 sebanyak 470.966 (Konsil LSM, 2022). Terakhir, tercatat 568.884 Ormas terdaftar di Kemenkumham (Kemenkumham, 18 Januari 2024). Tentu saja data ini adalah data campuran antara apa yang kita definisikan sebagai OMS atau LSM, dengan apa yang secara umum kita

pahami sebagai lembaga pendidikan, yayasan berbasis agama, Ormas perkaderan, dan seterusnya, mengingat nomenklatur Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) di Indonesia mencakup segala badan organisasi yang berbentuk Yayasan atau Perkumpulan.

Meski demikian, bertambahnya jumlah Ormas di tengah krisis dukungan pendanaan dari lembaga internasional juga dapat diasumsikan bahwa peran Ormas dalam pembangunan dan demokrasi di Indonesia sangat penting dan dibutuhkan masyarakat.

Memahami pentingnya peran Ormas, dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 40 ayat 1 dijelaskan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas. Kemudian pada ayat 3 dijelaskan bahwa Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. fasilitasi kebijakan; b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan c. peningkatan kualitas sumber daya manusia. PP No.58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjelaskan bahwa Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.

Rekognisi terhadap peran penting Ormas juga ditunjukkan oleh pemerintah dengan dibukanya ruang-ruang pendanaan pemerintah melalui berbagai skema. Peluang pendanaan bagi OMS yang bersumber dari APBN/APBD, misalnya melalui Dana Bantuan Hukum, Dana Perwalian, Dana Hibah, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui mekanisme Swakelola Tipe III. Namun peluang tersebut belum menjawab amanat pasal 40 UU No.17 Tahun 2013. Sementara itu pemerintah Indonesia telah membentuk Lembaga Dana Kerjasama pembangunan Internasional (LDKPI atau *Indonesian Aid*) pada 2019 untuk menyalurkan hibah bantuan pembangunan kepada berbagai negara dan LSM Asing.

Oleh karena itu sebagai upaya untuk mendukung keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil supaya dapat terus berkontribusi dalam pencapaian pembangunan dan demokrasi Indonesia, maka tujuh organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Kelompok Kerja Dana Abadi OMS mengadvokasi adanya Dana Abadi Organisasi Masyarakat Sipil. Seiring proses penyiapan dokumen kebijakan, Pokja Dana Abadi OMS juga menyiapkan data OMS yang terverifikasi. Oleh sebab itu Konsil LSM Indonesia bersama INFID melakukan survei Kondisi Eksisting dan Kapasitas Kelembagaan OMS di Indonesia.

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Sejauh mana kondisi eksisting OMS di Indonesia?
2. Sejauh mana kapasitas kelembagaan OMS di Indonesia?
3. Bagaimana model peningkatan kapasitas OMS di Indonesia?
4. Bagaimana model pemberdayaan OMS di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui kondisi eksisting OMS di Indonesia.
2. Mengetahui kapasitas kelembagaan OMS di Indonesia.
3. Mengidentifikasi model peningkatan kapasitas OMS di Indonesia.
4. Mengidentifikasi model pemberdayaan OMS di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai:

1. Dasar acuan untuk memetakan OMS di Indonesia sebagai bahan pertimbangan penyusunan dan implementasi kebijakan Dana Abadi OMS
2. Data awal untuk melakukan verifikasi faktual data base OMS;
3. Dasar acuan untuk membangun tools dan mekanisme verifikasi dan pemetaan kapasitas OMS yang bisa direplikasi lebih luas;
4. Bahan rujukan ataupun pertimbangan dalam menyusun kebijakan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas OMS.

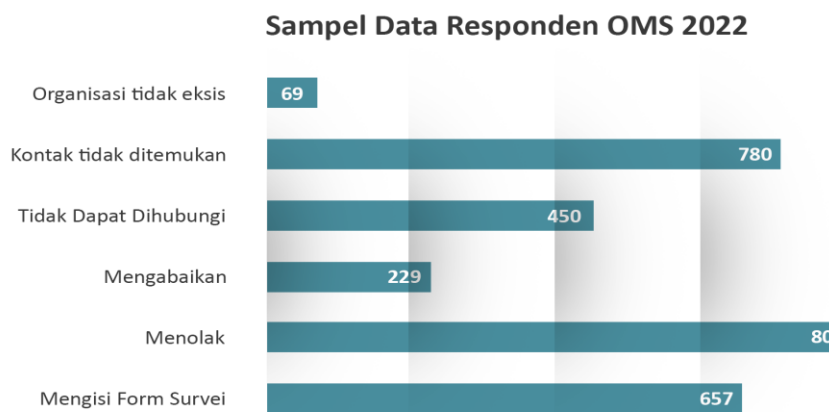
## BAB 2

# KERANGKA PEMIKIRAN

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sama untuk menyiapkan data OMS yang terverifikasi telah dilakukan sebelumnya oleh Bappenas melalui kerjasama dengan Tim Peneliti Konsil LSM Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui review dokumen, *study online*, dan survei *online*. Terdapat 4 dimensi dan 34 indikator yang digunakan. 4 dimensi tersebut adalah 1) Tata kepengurusan yang baik (managemen organisasi); 2) Manajemen keuangan yang terbuka dan terpercaya (transparansi); 3) Transparansi informasi; dan 4) Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

Populasi dalam penelitian tersebut menggunakan sampel (*raw*) data yang terkumpul dari Konsorsium Pokja Dana Abadi OMS dan jaringan sebanyak 6.298 organisasi. Data tersebut kemudian diolah dengan cara mengeluarkan data double, sehingga menghasilkan data *baseline* I sebanyak 4.347 organisasi. *Cleaning* tahap selanjutnya adalah mengeluarkan data *double* dan data yang tidak relevan seperti ormas berbasis keagamaan, gapoktan, poktan, kelompok nelayan, organisasi adat, serta organisasi kedaerahan. Hasilnya adalah data *baseline* II sebanyak 2.837 organisasi. Proses *cleaning* selanjutnya adalah mengklasifikasi berdasarkan lembaga dengan kelengkapan informasi awal 50-60% dan data dengan kontak dan tidak ada kontak untuk ditelusuri oleh tim *enumerator*, ini menghasilkan data *baseline* III sebanyak 2.851 organisasi. Selanjutnya terdapat penambahan data hasil penjangkauan dengan rekomendasi *referral* melalui OMS yang menjadi responden sebanyak 42 organisasi. Sehingga jumlah sampel data pada penelitian tersebut adalah 2.922 organisasi (*baseline* IV). Berikut gambaran respon dari 2.922 organisasi.



Gambar 2.1 Sampel Data Riset Pendataan OMS 2022

Berdasarkan jumlah sampel tersebut, yang terkonfirmasi mengisi *form* adalah 657 lembaga. Di luar *baseline* tersebut, riset ini juga berhasil menambahkan 149 OMS terverifikasi melalui teknik *referral system* dan *open announcement*. Hasilnya, 806 OMS tercatat mengikuti proses verifikasi sampai tahap pengisian *form*. Setelah dilakukan proses *cleaning* dan *clearing* akhir, dihasilkan sebanyak 709 data OMS yang terverifikasi. 709 OMS yang terverifikasi terbagi menjadi 4 (empat) kategori (*grading*), yaitu 201 OMS dengan kategori *Grade A*, 295 OMS masuk dalam kategori *Grade B*, 173 OMS masuk dalam kategori *Grade C*, dan 40 OMS dalam kategori *Grade D*. Organisasi yang masuk dalam kategori *Grade A* berada pada kualifikasi paling tinggi, sementara *Grade D* merupakan kualifikasi paling rendah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah sama-sama bertujuan untuk melakukan verifikasi data OMS sebagai persiapan pelaksanaan Dana Abadi OMS yang saat ini sedang dalam proses advokasi.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan data lapangan dengan *online survey*, namun untuk memperkuat informasi sebaran data OMS juga dilakukan FGD dengan Kemendagri. Terdapat perluasan dan pendetailan dimensi yang digunakan, yaitu 4 dimensi yang terdiri dari eksistensi, kapasitas organisasi, keberlanjutan, dan pemberdayaan dengan 53 indikator. 29 indikator diantaranya adalah mengadopsi dari indikator penelitian sebelumnya, sehingga terdapat 24 indikator baru.

Sebagai catatan, penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bappenas pada 2022. Sehingga untuk mendapatkan data yang *valid* dan lengkap, pada penelitian ini melakukan *review* atas *tools* penelitian sebelumnya. Dari hasil *review tools* yang dilakukan 2 kali tersebut, ada beberapa hal yang perlu disempurnakan.

Dengan demikian, sebagai konsekuensinya juga melakukan *update* data 709 OMS (hasil penelitian sebelumnya) dengan menggunakan *tools* yang baru. Kemudian untuk kepentingan validasi *tools* penelitian, juga dilakukan pertemuan terbatas dengan ahli.

## **2.2 Kerangka Teori**

### **2.2.1 Kondisi *Existing* (Eksistensial)**

Secara etimologi, eksistensi berasal dari Bahasa Latin *existere*. *Ex* berarti keluar dan *sistere* berarti muncul atau timbul. *Existere* berarti muncul, ada, timbul, atau memiliki keberadaan aktual.

Dalam KBBI, eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Eksistensi adalah suatu ukuran yang berwujud dan tampak yang membedakan satu dengan lainnya. Secara terminologi, eksistensi berarti:

1. Apa yang ada?
2. Apa yang memiliki aktualitas (ada)?
3. Segala sesuatu (apa saja) di dalam yang menekankan bahwa sesuatu itu ada.

Soren Kierkegaard, tokoh yang memperkenalkan istilah eksistensi berpandangan bahwa seluruh realitas eksistensi hanya dapat dialami secara subjektif oleh manusia dan mengandaikan bahwa kebenaran adalah individu yang bereksistensi.

Kierkegaard juga melihat eksistensi sebagai sesuatu yang dinamis, senantiasa menjadi atau terus bergerak dari kemungkinan menjadi kenyataan.

Menurut Zaenal Abidin (2007: 16), eksistensi adalah proses dinamis, sesuatu menjadi atau mengada. Eksistensi berarti juga keluar dari, melampaui atau mengatasi. Eksistensi tidak kaku dan tidak terhenti, dia lentur dalam memenuhi perkembangan.

Poin penting dari eksistensi adalah soal keberadaan yang menunjukkan adanya wujud serta berkembang (dinamis). Dua kata kunci ini yang menunjukkan sesuatu itu ada atau eksis.

Seperti terlihat dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang mengindikasikan norma mengenai keberadaan dan wujud eksistensi organisasi dalam rumusan pasal-pasal terkait, baik yang menunjukkan keberadaan wujud maupun upaya adanya konsep dinamis untuk bertahan dan berkembang.

### **2.2.2 Indikator Eksistensial Organisasi**

Seperti dijelaskan sebelumnya, eksistensi terkait dengan adanya wujud serta prasyarat dasar sebuah organisasi. Dalam konteks itu rumusan eksistensi dalam penelitian ini merujuk pada 4 hal, yakni: legalitas (berbadan hukum dan tidak berbadan hukum), tujuan organisasi, struktur organisasi, laporan keuangan dan adanya aktivitas kegiatan.

Berbadan hukum dan Tidak berbadan hukum (Pasal 10, Pasal 15-18): Indikator eksistensi organisasi berdasarkan pada pendirian resmi dan pendaftaran pada pemerintah atau otoritas yang berwenang.

Tujuan dan Kegiatan (Pasal 12): Organisasi dinyatakan eksis jika memiliki tujuan serta kegiatan yang jelas. Struktur organisasi (Pasal 18 ayat 3 poin d; Pasal 29 ayat 2 Kepengurusan), Pasal 35 ayat 2 poin d).

Rekam jejak keuangan (Bab X, Pasal 37-38): memiliki rekam jejak keuangan yang akurat dan transparan dengan menunjukkan sumber keuangan dan laporan keuangan.

Aktivitas berkelanjutan (Pasal 7): organisasi memiliki program kerja atau isu yang dijalankan. Dalam riset ini, secara khusus kami membedakan antara adanya aktivitas (masuk dalam dimensi eksistensi) dengan adanya aktivitas berkelanjutan (masuk dalam dimensi kapasitas).

### **2.2.3 Definisi Kapasitas Organisasi**

Menurut Yu-Lee (2018:7), kapasitas organisasi terkait dengan kemampuan organisasi melakukan pekerjaan. Faktor pemungkin yang memungkinkan organisasi menjalankan fungsi untuk mencapai tujuannya.

Di sektor publik, Ingraham PW, Joyce PG dan Donahue AK (2018: 7) mendefinisikan kapasitas organisasi sebagai kemampuan pemerintah dalam menyusun, mengembangkan, mengarahkan dan mengendalikan sumber daya keuangan, manusia, fisik dan informasi.

Sedangkan di sektor nirlaba, Eisinger (2018: 7) mendefinisikan kapasitas organisasi sebagai serangkaian proses, praktik, manajemen, atau atribut yang membantu organisasi untuk tumbuh dan berkembang.

### **Dimensi Kapasitas Organisasi**

Budaya dan komunikasi adalah pendorong utama kapasitas organisasi. Budaya terkait dengan sistem keyakinan, nilai, perilaku, sikap, norma, artefak, dan simbol kolektif yang menggambarkan organisasi. Komunikasi adalah model penyampaian informasi dan ide organisasi yang sederhana, jelas, dan konsisten, baik untuk internal maupun eksternal.

### **2.2.4 Komponen Inti Kapasitas Organisasi**

- Kepemimpinan: mengacu pada individu/staf yang bertanggung jawab dalam mengarahkan organisasi dan melibatkan penetapan visi yang jelas serta

membagikannya pada yang lain dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk mewujudkannya.

- Strategi: terkait dengan adanya rencana strategis di mana organisasi bisa mencapai tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- Struktur/tata kelola: terkait dengan sistem aturan kelembagaan, kebijakan termasuk proses dalam mengatur peran dan tanggungjawab, baik yang didelegasikan, dikelola maupun dikoordinasikan).
- Keterampilan/kompetensi: terkait dengan kemampuan individu atau TIM untuk melakukan aktivitas kompleks yang melibatkan gagasan (keterampilan kognitif), teknologi, maupun keterampilan teknis dan keterampilan interpersonal setiap individu tim.
- SDM: terkait proses identifikasi, penyaringan, rekrutmen dan pelatihan staf serta hak dan kewajiban karyawan.
- Akuntabilitas: terkait kebutuhan organisasi untuk mempertanggungjawabkan, baik internal maupun eksternal, baik kegiatan maupun keuangan serta menyampaikan hasilnya secara transparan.
- Aktivitas Berkelanjutan: terkait dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki lembaga, dengan potensi dan sumber daya tersebut memungkinkan organisasi memiliki daya tahan yang lebih baik untuk mempertahankan eksistensi dalam jangka panjang.

### 2.2.5 Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan diadaptasi dari Bahasa Inggris *empowerment*. *Empowerment* berasal dari kata *power* yang berarti daya atau kekuatan. Istilah ini berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, yang terus berkembang dari tahun 70-an sampai 90-an. Menurut Kartasmita (1996: 3) *power* dapat diartikan sebagai kekuasaan (seperti dalam *executive power*), atau kekuatan (seperti *pushing power*), atau daya (seperti *horsepower*). Jika *power* dalam kata *empowerment* diartikan sebagai daya maka *empowerment* dapat diartikan sebagai pemberdayaan.

Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, yakni: *pertama*, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan *kedua*, kecenderungan

sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Jim Ife (1995: 182) menjelaskan bahwa *empowerment means providing people with the resources, opportunities, knowledge and skills to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and affect the life of their community*. Ife juga menambahkan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dari mereka yang tidak beruntung. Intinya, pemberdayaan membahas tentang bagaimana individu, kelompok atau pun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Menurut Payne dalam Isbandi (2002,163) pemberdayaan (*empowerment*) pada intinya ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain transfer daya dari lingkungannya.

Sedangkan Shardlow dalam Isbandi (2002: 164) melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya.

Inti dari pemberdayaan adalah bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dengan keinginan mereka. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang relatif terus berjalan untuk meningkatkan kepada perubahan. (Isbandi, 2000: 32-33)

Dalam penelitian ini pemberdayaan diartikan sebagai cara individu, kelompok, atau pun komunitas untuk mengontrol kehidupan mereka sendiri dengan keinginan mereka melalui suatu proses yang terus menerus untuk meningkatkan kemampuan serta memperkuat potensi.

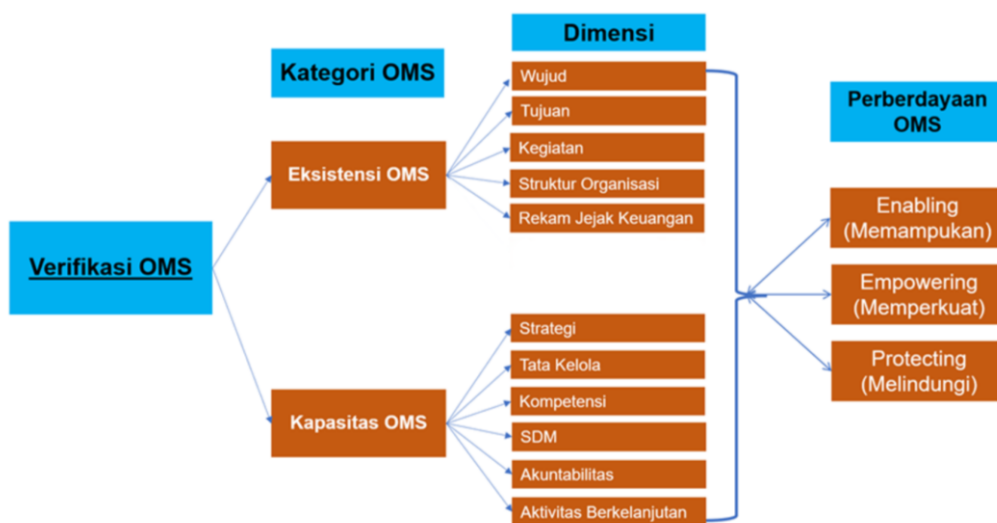
Secara kategoris pemberdayaan berorientasi pada tiga tujuan: (1) memampukan (*enabling*), (2) memperkuat (*empowering*), dan (3) melindungi (*protecting*).

*Pertama*, memampukan (*enabling*) berarti menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi terus berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan sebagai *enabling* berarti membangun daya melalui dorongan, motivasi, dan kesadaran akan berbagai potensi yang dimiliki individu atau masyarakat serta upaya-upaya untuk mengembangkannya.

*Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*) melalui langkah-langkah afirmatif yang meliputi penyediaan berbagai masukan (*input*) dan pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Termasuk dalam dimensi penguatan ialah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

*Ketiga*, memberdayakan juga berarti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

### 2.3 Desain Penelitian



Gambar 2.2 Desain penelitian

## BAB 3 METODOLOGI

### 3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data lapangan menggunakan *online survey*. Namun untuk memperkuat populasi/data dan menentukan proporsi data OMS, dilakukan FGD dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kemendagri, dan Bappenas. Dari proses FGD ini diharapkan akan lahir komitmen dari Kemenkumham untuk akses data OMS.

### 3.2 Definisi Operasional dan Konsep

Definisi operasional berikut ini diambil dari kerangka konsep penelitian, namun terdapat komponen dimensi yang tidak digunakan yakni soal kepemimpinan karena soal kepemimpinan ini sudah nge-bland dengan komponen dimensi lainnya, terutama soal struktur dan tata kelola organisasi.

*Tabel 3.1 Pengkategorisasian*

Kategori	Definisi Operasional	Komponen-Dimensi		List Operasional
Eksistensi	Eksistensi dalam penelitian ini merujuk pada UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang mengindikasikan norma mengenai keberadaan dan wujud eksistensi organisasi dalam rumusan pasal-pasal terkait, baik yang menunjukkan keberadaan wujud maupun upaya adanya konsep dinamis	1. Wujud	1.1. Eksistensi paling mendasar dari kelembagaan adalah adanya wujud lembaga yakni terkait dengan pengakuan atas lembaga dan ditunjukkan dengan Alamat lembaga.	1.1.1. Legalitas 1.1.2. Alamat lembaga
		2. Tujuan	2.1. Organisasi dinyatakan eksis jika memiliki tujuan serta kegiatan yang jelas (Pasal 12)	2.1.1. Visi dan Misi 2.1.2. Isu Utama 2.1.3. Isu lainnya
		3. Kegiatan/ Aktivitas	3.1. Organisasi dinyatakan eksis jika memiliki tujuan serta kegiatan yang jelas (Pasal 12)	Adanya Kegiatan
		4. Struktur Organisasi	4.1. Adanya kepengurusan (Pasal 18 ayat 3 poin d; Pasal 29 ayat 2 Kepengurusan), Pasal 35 ayat 2 poin d	Pengurus Organisasi

Kategori	Definisi Operasional	Komponen-Dimensi		List Operasional
	untuk bertahan dan berkembang	5. Laporan Keuangan	5.1. Memiliki laporan keuangan yang akurat dan transparan (Bab X, Pasal 37-38)	Laporan keuangan lembaga
Kapasitas Organisasi	Kapasitas organisasi adalah kemampuan yang menggambarkan proses, praktik, maupun manajemen dalam menyusun, mengembangkan, mengarahkan serta mengendalikan sumber daya, baik keuangan, manusia, fisik maupun informasi yang dapat membantu organisasi untuk tumbuh dan berkembang.	6. Strategi	6.1. Organisasi memiliki rencana strategis untuk mencapai tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang	6.1.1. Rencana Tahunan 6.1.2. Rencana Strategis (Renstra) 6.1.2. Pelibatan Penerima manfaat dalam renstra
		7. Struktur/ Tata Kelola	7.1. Sistem aturan kelembagaan, kebijakan termasuk proses dalam mengatur peran dan tanggungjawab perangkat organisasi, baik yang didelegasikan, dikelola maupun dikoordinasikan.	7.1. Mekanisme pengawasan 7.2. mekanisme rapat
		8. Keahlian/ Kompetensi	8.1. kemampuan individu atau TIM untuk melakukan aktivitas kompleks yang melibatkan gagasan (keterampilan kognitif), teknologi, maupun keterampilan teknis dan keterampilan interpersonal setiap individu tim.	8.1.1. Isu utama Organisasi 8.1.2. Isu lainnya organisasi 8.1.3. Keahlian/ kompetensi utama lembaga
		9. SDM	9.1. Proses identifikasi, penyaringan, rekrutmen dan pelatihan staf serta hak dan kewajiban karyawan.	9.1.1. SOP ketenagakerjaan 9.1.2. Tenaga ahli 9.1.3. Mekanisme Volunteer 9.1.4. perencanaan peningkatan SDM 9.1.5. Keamanan staf
		10. Akuntabilitas	10.1. Akuntabilitas Kinerja 10.2. Media atau alat pertanggungjawaban kinerja OMS yang dikerjakan secara periodik	10.1.1. Program rutin 10.1.2. Laporan Program 10.2.1. SOP program 10.2.2. Penerima manfaat

Kategori	Definisi Operasional	Komponen-Dimensi		List Operasional
				10.2.3. Monitoring, evaluasi dan learning (MEL) 10.2.4. Audit project 10.2.5. Audit kelembagaan 10.2.6. Mekanisme rancangan untuk mengumpulkan dan menganalisis pembelajaran organisasi
			10.3. Pengelolaan Keuangan (transparansi)  10.4. Pertanggungjawaban OMS dalam konteks keuangan.	10.3.1. NPWP 10.3.2. Rekaning atas nama lembaga/ organisasi  10.4.1. laporan pajak 10.4.2. SOP keuangan
			10.5. Transparansi informasi/visibilitas  10.6. Pertanggungjawaban OMS dalam konteks transparansi kegiatan/aktivitas	10.5.1. Media sosial 10.5.2. Website  10.6.1. Publikasi 10.6.2. Annual report
			10.7. Pencegahan konflik kepentingan  10.8. Mekanisme yang dimiliki OMS untuk mencegah konflik kepentingan.	10.7.1 Anti Fraud 10.7.2 Mekanisme Aduan  10.8.1 Mekanisme keamanan data

Kategori	Definisi Operasional	Komponen-Dimensi		List Operasional	
		11. Aktivitas Berkelanjutan	11.1. Dalam hal ini, keberlanjutan dilihat dari sisi potensi dan sumber daya yang dimiliki yang memungkinkan organisasi memiliki daya tahan yang lebih baik untuk mempertahankan eksistensi dalam jangka Panjang.	11.1.1. Sumber Dana	11.1.1.1. Adanya sumber dana 11.1.1.2. Ada diversifikasi sumber dana 11.1.1.3. Kepemilikan SOP pengadaan barang dan Jasa Pemerintah
				11.1.2. Aset	11.1.2.1. Ada dana abadi 11.1.2.2. Memiliki aset sendiri 11.1.2.3. tools keberlanjutan Organisasi 11.1.2.4. Unit usaha

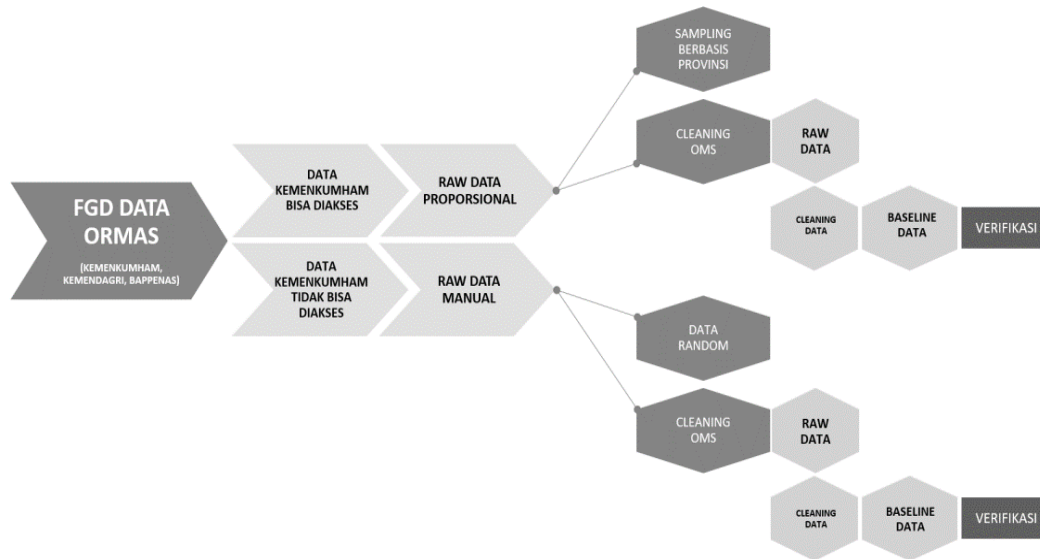
Kategori	Definisi Operasional	Komponen-Dimensi		List Operasional
Pemberdayaan	Pemberdayaan adalah bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dengan keinginan mereka melalui suatu proses yang terus menerus untuk meningkatkan kemampuan serta memperkuat potensi.	12. <i>Enabling</i> (memampukan)	Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi terus berkembang melalui dorongan, motivasi, dan kesadaran akan berbagai potensi yang dimiliki individu atau masyarakat serta upaya-upaya untuk mengembangkannya.	Pertanyaan: Potensi apa yang ingin dikembangkan dari organisasi anda?
		13. <i>Empowering</i> (Memperkuat)	Memperkuat potensi melalui langkah-langkah afirmatif melalui penyediaan berbagai masukan ( <i>input</i> ) dan pembukaan akses ke dalam berbagai peluang ( <i>opportunities</i> ) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya	Bagaimana selama ini lembaga/organisasi Anda mengakses sumber daya (pendanaan, peningkatan kapasitas)?
		14. <i>Protecting</i> (melindungi)	Pemihakan kepada yang lemah tanpa mengisolasi atau menutup interaksi.	Seberapa sering lembaga anda diikutsertakan dalam program-program yang dilakukan oleh pemerintah/swasta/donor?

### 3.3 Populasi Sampel

#### 3.3.1 Populasi

Data OMS yang menjadi populasi sementara dalam penelitian ini adalah *baseline* data pada riset sebelumnya (Bappenas, 2022) sebanyak 2.790 data OMS, termasuk data

709 OMS. Data lainnya yang dihimpun adalah data melalui jaringan sebanyak 73 lembaga dan data OMS melalui website Siormas sebanyak 43 lembaga. Jadi data yang bisa menjadi populasi adalah 2.897 lembaga. Namun untuk mendapatkan data yang valid, peneliti akan melakukan FGD untuk mendapatkan gambaran jumlah data Ormas terbaru dan menjalin kerjasama dengan Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kemendagri, supaya mendapatkan proporsi sampel data ideal per kota. Gambaran proses, dijelaskan pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.1. Grafik Skema Raw Data-Baseline Data untuk Menentukan Populasi

Dalam proses ini, FGD telah dilaksanakan tanggal 3 Oktober 2023 yang melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas. FGD ini tidak menghasilkan kesepakatan untuk mengakses data Kemenkumham, sehingga, sampel dalam penelitian ini menggunakan skenario kedua: *raw data* manual.

### 3.3.2 Teknik *Sampling*

Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah menggunakan *Probability Sampling* dengan teknik *simple random sampling*.

### 3.4 Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan adalah dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan variabel penelitian, membuat grading, dan menganalisa model pemberdayaan organisasi untuk meningkatkan grading OMS.

Grading yang akan dilakukan, dijelaskan pada table di bawah ini.

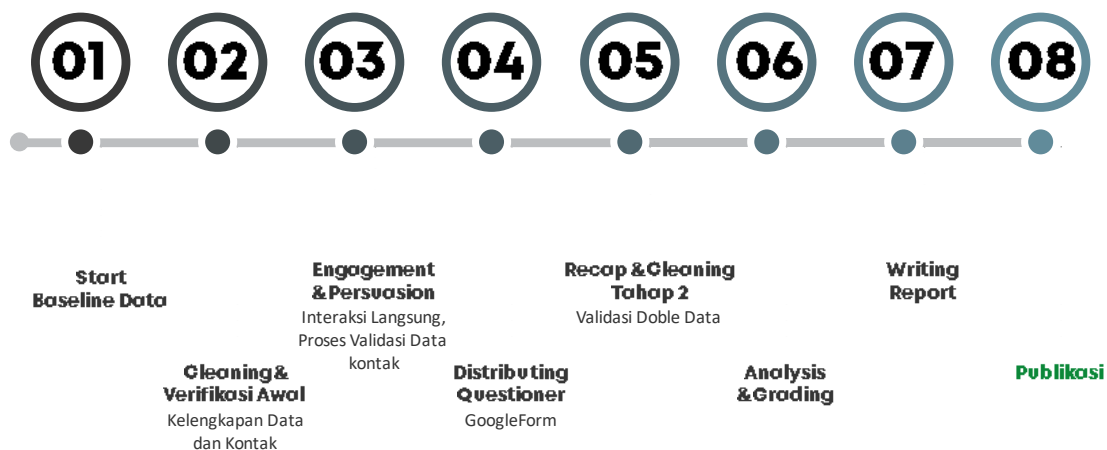
Tabel 3.2 Grading OMS

	Grade D	Grade C	Grade B	Grade A
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legalitas</li> <li>2. Jenis Legalitas</li> <li>3. Alamat Kantor</li> <li>4. Email</li> <li>5. Visi</li> <li>6. Misi</li> <li>7. AD</li> <li>8. ART</li> <li>9. Struktur Organisasi</li> <li>10. Isu Utama</li> <li>11. Isu Lainnya</li> <li>12. Tidak Berafiliasi Partai Politik</li> <li>13. NPWP</li> <li>14. Rekening a.n lembaga</li> <li>15. Laporan keuangan</li> <li>16. Rencana kerja/rancangan kegiatan</li> <li>17. Laporan kegiatan/program</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legalitas</li> <li>2. Jenis Legalitas</li> <li>3. Alamat Kantor</li> <li>4. Email</li> <li>5. Visi</li> <li>6. Misi</li> <li>7. AD</li> <li>8. ART</li> <li>9. Struktur Organisasi</li> <li>10. Isu Utama</li> <li>11. Isu Lainnya</li> <li>12. Tidak Berafiliasi Partai Politik</li> <li>13. NPWP</li> <li>14. Rekening a.n lembaga</li> <li>15. Laporan keuangan</li> <li>16. Rencana kerja/rancangan kegiatan</li> <li>17. Laporan kegiatan/program</li> <li>18. Lapor pajak</li> <li>19. Rencana tahunan</li> <li>20. Kompetensi utama</li> <li>21. Program rutin</li> <li>22. Kelompok sasaran</li> <li>23. SOP keuangan</li> <li>24. facebook</li> <li>25. Instagram</li> <li>26. Twitter</li> <li>27. Youtube</li> <li>28. Mekanisme rapat</li> <li>29. Tenaga ahli</li> <li>30. Renstra</li> <li>31. Pelibatan penerima manfaat</li> <li>32. SOP Program</li> <li>33. Memiliki sumber dana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legalitas</li> <li>2. Jenis Legalitas</li> <li>3. Alamat Kantor</li> <li>4. Email</li> <li>5. Visi</li> <li>6. Misi</li> <li>7. AD</li> <li>8. ART</li> <li>9. Struktur Organisasi</li> <li>10. Isu Utama</li> <li>11. Isu Lainnya</li> <li>12. Tidak Berafiliasi Partai POLitik</li> <li>13. NPWP</li> <li>14. Rekening a.n lembaga</li> <li>15. Laporan keuangan</li> <li>16. Rencana kerja/rancangan kegiatan</li> <li>17. Laporan kegiatan/program</li> <li>18. Lapor pajak</li> <li>19. Rencana tahunan</li> <li>20. Kompetensi utama</li> <li>21. Program rutin</li> <li>22. Kelompok sasaran</li> <li>23. SOP keuangan</li> <li>24. facebook</li> <li>25. Instagram</li> <li>26. Twitter</li> <li>27. Youtube</li> <li>28. Mekanisme rapat</li> <li>29. Tenaga ahli</li> <li>30. Renstra</li> <li>31. Pelibatan penerima manfaat</li> <li>32. SOP Program</li> <li>33. Memiliki sumber dana</li> <li>34. Publikasi rutin</li> <li>35. Website</li> <li>36. Sumber Pendanaan dari mana</li> <li>37. Audit Project</li> <li>38. SOP Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legalitas</li> <li>2. Jenis Legalitas</li> <li>3. Alamat Kantor</li> <li>4. Email</li> <li>5. Visi</li> <li>6. Misi</li> <li>7. AD</li> <li>8. ART</li> <li>9. Struktur Organisasi</li> <li>10. Isu Utama</li> <li>11. Isu Lainnya</li> <li>12. Tidak Berafiliasi Partai Politik</li> <li>13. NPWP</li> <li>14. Rekening a.n lembaga</li> <li>15. Laporan keuangan</li> <li>16. Rencana kerja/rancangan kegiatan</li> <li>17. Laporan kegiatan/program</li> <li>18. Lapor pajak</li> <li>19. Rencana tahunan</li> <li>20. Kompetensi utama</li> <li>21. Program rutin</li> <li>22. Kelompok sasaran</li> <li>23. SOP keuangan</li> <li>24. facebook</li> <li>25. Instagram</li> <li>26. Twitter</li> <li>27. Youtube</li> <li>28. Mekanisme rapat</li> <li>29. Tenaga ahli</li> <li>30. Renstra</li> <li>31. Pelibatan penerima manfaat</li> <li>32. SOP Program</li> <li>33. Memiliki sumber dana</li> <li>34. Publikasi rutin</li> <li>35. Website</li> <li>36. Sumber Pendanaan dari mana</li> <li>37. Audit Project</li> <li>38. SOP Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ol>

	Grade D	Grade C	Grade B	Grade A
			39. Kepemilikan Unit Usaha	39. Kepemilikan Unit Usaha 40. Mekanisme pengawasan 41. SOP Ketenagakerjaan 42. Mekanisme MEL 43. Pengumpulan dan analisis pembelajaran organisasi 44. <i>Annual report</i> 45. Perencanaan peningkatan SDM 46. Mekanisme Volunteer 47. Audit eksternal 48. Aset sendiri 49. Mekanisme <i>anti-fraud</i> 50. Mekanisme pengaduan 51. <i>Tools</i> keberlanjutan organisasi 52. Prosedur keamanan data 53. Prosedur keamanan staf

### 3.5 Proses Pelaksanaan Penelitian

Alur pelaksanaan penelitian dapat digambarkan seperti berikut ini:



Gambar 3.2 Alur Pelaksanaan Penelitian

## BAB 4 TEMUAN

### 4.1 Partisipasi Survei

Proses survei verifikasi yang dilakukan oleh Konsil LSM Indonesia yang bekerja sama dengan INFID ini dilakukan dengan merujuk pada raw data yang sebelumnya telah dihimpun oleh Konsil dari penelitian bersama Bappenas. *Raw data* (data mentah) yang digunakan untuk verifikasi berjumlah 2.790 lembaga. Selain data OMS hasil pengumpulan pada survei verifikasi Bappenas, terdapat penambahan data OMS dari mitra jaringan serta pencarian melalui website [siormas.go.id](http://siormas.go.id) yang dikelola oleh Kemendagri. Komposisi *Raw Data* dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Raw Data

ASAL DATA	JUMLAH
<i>Raw data</i> verifikasi data OMS tidak berpartisipasi BAPPENAS	2081
Data OMS Verifikasi Konsil-Bappenas	709
Data Mitra jaringan	73
Hunting via media digital	34
<b>Jumlah Raw Data</b>	<b>2.897</b>

Total *raw data* yang berasal dari hasil verifikasi OMS Konsil-Bappenas sebanyak 2.790 yang terdiri dari: 2.081 lembaga adalah OMS yang tidak berpartisipasi dalam proses verifikasi OMS Konsil-Bappenas dan OMS yang terverifikasi sebanyak 709 lembaga. Selain data OMS dari data Konsil-Bappenas, penelitian ini juga melakukan penyisiran lembaga melalui dua cara, yakni rekomendasi mitra jaringan sebanyak 73 lembaga dan pencarian melalui website [SIORMAS.go.id](http://SIORMAS.go.id) sebanyak 34 lembaga.

Dari *raw data* yang terkumpul, hanya ada 2.152 lembaga yang memiliki kelengkapan informasi kontak (whatsapp/email/telepon). Data OMS yang memiliki kelengkapan kontak berdasarkan sumbernya, dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Data OMS dengan Kelengkapan Kontak

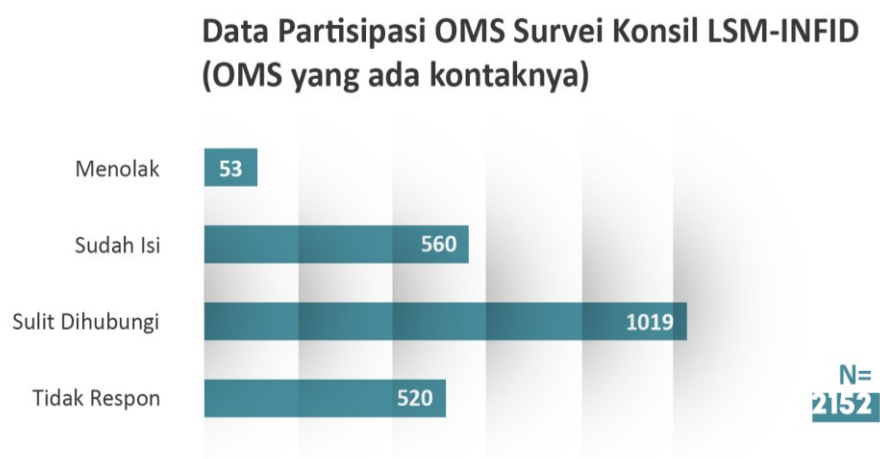
OMS yang Memiliki Kontak (WA/email/Tlp)	Jumlah
Data mentah Verifikasi Data OMS tidak berpartisipasi	1.336
Data OMS Verifikasi Konsil-Bappenas	709

OMS yang Memiliki Kontak (WA/email/Tlp)	Jumlah
Data Mitra jaringan	73
Hunting via media digital	34
<b>Jumlah OMS yang memiliki kelengkapan kontak</b>	<b>2.152</b>

Dari data mentah yang terkumpul (2.897), jumlah OMS yang memiliki kelengkapan kontak (whatsapp/email/telepon) mencapai 2.152 lembaga dengan komposisi:

1. Data mentah awal sebanyak 1.336 lembaga;
2. Data OMS verifikasi Konsil-Bappenas sebanyak 709 lembaga;
3. Mitra jaringan sebanyak 73 lembaga;
4. Pencarian data sebanyak 34 lembaga.

Berikut gambaran partisipasi OMS yang dihimpun dalam lembar koding enumerator.



*Gambar 4.1 OMS yang Memiliki Kontak*

Proses verifikasi yang dilakukan oleh enumerator terhadap 2.152 OMS sebagai *baseline data*. Berdasarkan tabel di atas, terdapat lima kategori respons OMS, yakni:

1. **Menolak;** berarti enumerator telah melakukan *reminder* sebanyak 3x kepada lembaga bersangkutan dengan interval menghubungi 3-5 hari.
2. **Sudah isi;** artinya OMS memberikan informasi kalau lembaganya telah mengisi survei baik secara penuh maupun update data.
3. **Sulit dihubungi;** berarti kontak organisasi yang tersedia tidak valid (tidak aktif, bukan orang/organisasi yang dituju) dan melalui *tracking* secara daring enumerator tetap tidak mendapatkan kontak alternatif lain.

4. **Tidak ada respons;** berarti responden (lembaga) telah menerima informasi namun mengabaikan informasi tersebut.

Dari proses verifikasi, ditemukan data lembaga yang mengisi survei sebanyak 560 lembaga. Dari dua model *form* yakni *form* untuk lembaga yang hanya melakukan *update* informasi (karena sebelumnya pernah mengisi verifikasi data) dan *form* untuk lembaga yang mengisi secara penuh (lembaga yang belum pernah berpartisipasi dan atau lembaga yang pernah berpartisipasi namun tetap mengisi penuh).

*Google form* yang dibuat juga dibagi berdasarkan dua jenis model tersebut. Total lembaga yang mengisi *google form* dari dua model *form* berjumlah 560 lembaga dengan komposisi:

1. Lembaga yang melakukan *update* berjumlah 193 lembaga;
2. Lembaga yang mengisi penuh berjumlah 367 lembaga.

Dari total jumlah partisipasi lembaga yang mengirimkan jawaban dari *form* yang mencapai 560, terdapat 42 lembaga yang mengisi lebih dari 1 kali. Setelah dibersihkan dari data dobel dan tripel ditemukan data sejumlah 515 OMS.

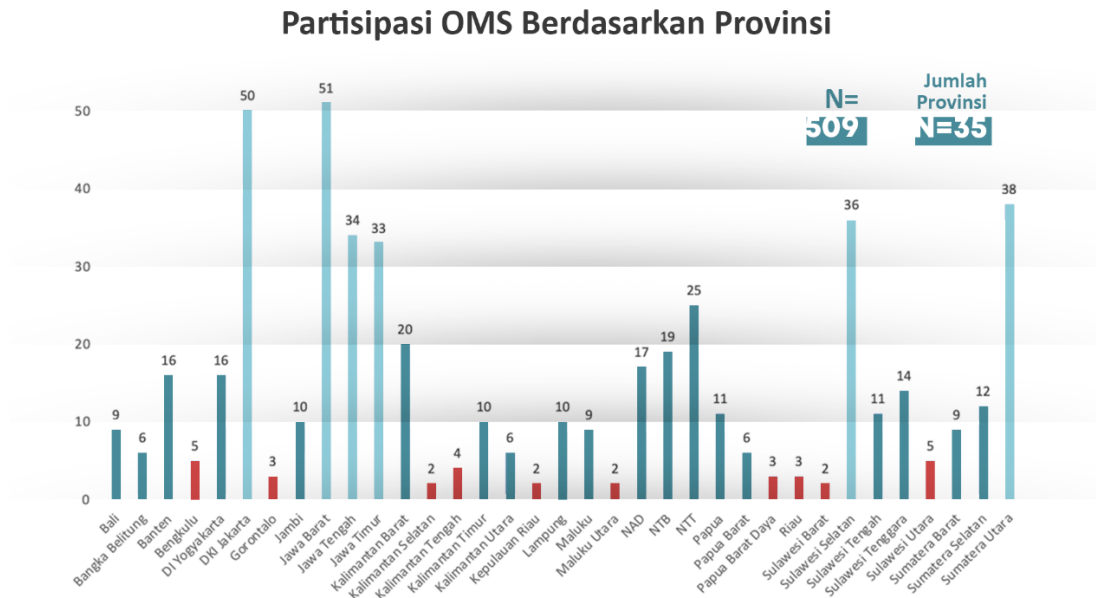
Namun dari 515 OMS hasil proses *cleaning* ini ditemukan lembaga-lembaga yang tidak memenuhi definisi dari OMS, yakni: non-sektarian (baik berbasis agama maupun kedaerahan), tanpa kekerasan, dan non-lembaga pendidikan. Dari proses *cleaning* ini ditemukan sebanyak 6 lembaga yang tidak sesuai dengan definisi OMS, dijelaskan pada table di bawah ini.

Tabel 4.3 Enam Lembaga yang tidak sesuai dengan definisi OMS

1. LSM/Ormas dengan kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bapera di Kota Serang, Provinsi Banten.</li> <li>▪ Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (KKPMP) di Kabupaten Serang, Provinsi Banten.</li> </ul>
2. Ormas Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PD Mathla'ul Anwar di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten</li> <li>▪ PD Nasyiatul Aisyiyah di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat</li> </ul>
3. Ormas Kedaerahan Paguyuban	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perkumpulan Melayu Minang di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau</li> </ul>
4. Yayasan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Yayasan Ar Rasyid Ruhul Islam di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara</li> </ul>

## 4.2 OMS Terverifikasi

Setelah melalui proses pembersihan data dari data dobel serta mengeluarkan data Ormas yang tidak masuk kategori LSM maka ditemukan data OMS yang berpartisipasi dalam survei sebanyak 509 OMS. Berikut sebaran OMS yang berpartisipasi berdasarkan provinsi.



Gambar 4.2 Partisipasi OMS Berdasarkan Provinsi

Jumlah OMS yang berpartisipasi setelah di-*cleaning* berjumlah 509 lembaga dari 35 provinsi. Asal provinsi OMS yang yang paling banyak berpartisipasi adalah Provinsi Jawa Barat mencapai 51 OMS dan DKI Jakarta sebanyak 50 OMS.

Sedangkan partisipasi terendah berdasarkan provinsi berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan, Kepri, Maluku Utara dan Sulawesi Utara sebanyak 2 OMS.

Selain sebaran menurut provinsi, data menarik lainnya yang ditemukan adalah soal perbandingan jumlah partisipasi OMS berdasarkan domisili lembaga menurut kabupaten dan kota. Berikut komposisi OMS berdasarkan domisili kabupaten dan kota.

## Partisipasi OMS Berdasarkan Kabupaten/Kota

N=  
509

Jumlah  
Provinsi  
N=35



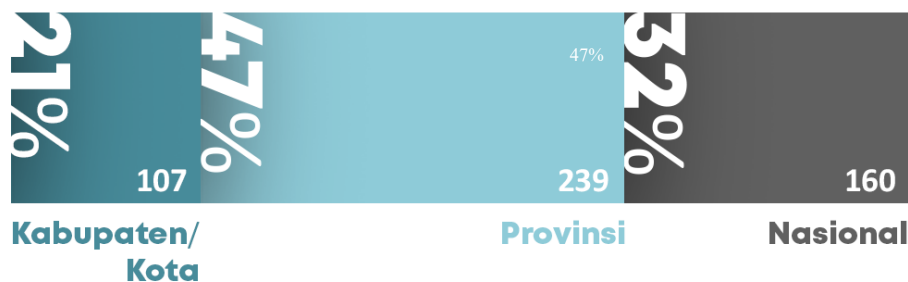
Gambar 4.3 Partisipasi OMS Berdasarkan Kabupaten/Kota

Dari 509 OMS yang berpartisipasi, sebanyak 331 (65%) OMS menyatakan lembaganya berdomisili di kota dan 178 (35%) lainnya berdomisili di kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa dari data yang dihimpun, bisa dibaca bahwa tren OMS/LSM ini adalah tren masyarakat kota.

Selain soal domisili, dalam penelitian ini juga ditanyakan soal cakupan area kerja OMS di daerah. Berikut data cakupan area kerja OMS yang ikut berpartisipasi dalam survei verifikasi data OMS.

## Partisipasi OMS Berdasarkan Kabupaten/Kota

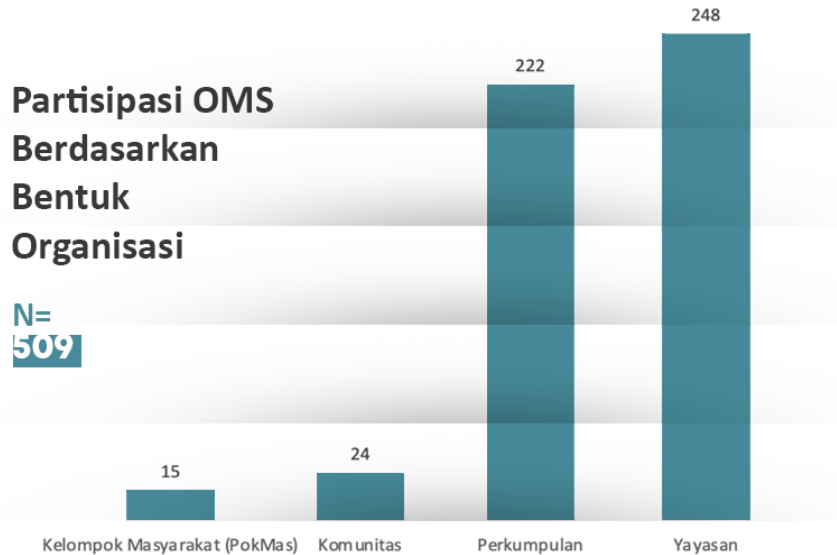
N=  
506



Gambar 4.4 Cakupan Area Kerja OMS

Berdasarkan cakupan area kerja, OMS yang berpartisipasi dalam verifikasi didominasi oleh OMS yang cakupan area kerjanya di Provinsi yakni sebanyak 239 (47%) lembaga. OMS yang cakupan area kerjanya nasional sebanyak 160 (32%) lembaga. OMS yang cakupan area kerjanya di kabupaten/kota sebanyak 107 (21%) lembaga. Namun terdapat 3 lembaga yang tidak menyebutkan cakupan area kerja.

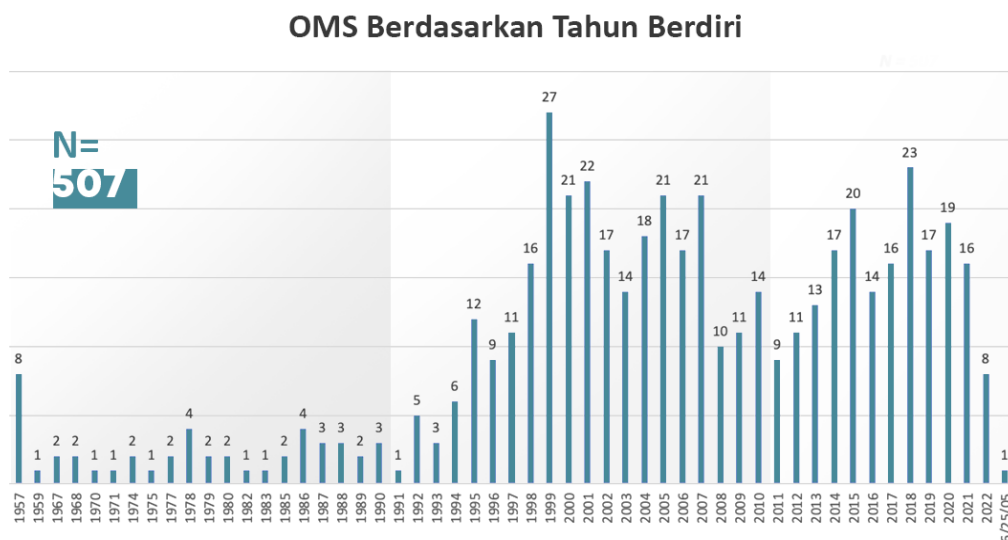
Secara bentuk kelembagaan, OMS yang berpartisipasi dalam survei terbagi pada 4 bentuk, yakni yayasan, perkumpulan, komunitas dan kelompok masyarakat (Pokmas). Berikut data OMS berdasarkan bentuk lembaga.



Gambar 4.5 Partisipasi OMS Berdasarkan Bentuk Organisasi

Berdasarkan bentuk organisasi, OMS dengan bentuk organisasi Yayasan lebih banyak, yakni mencapai 248 (49%) lembaga, OMS dengan bentuk perkumpulan sebanyak 222 (44%) lembaga, OMS dengan bentuk komunitas sebanyak 24 (5%) lembaga dan 15 (3%) OMS lainnya menyatakan bentuknya kelompok masyarakat.

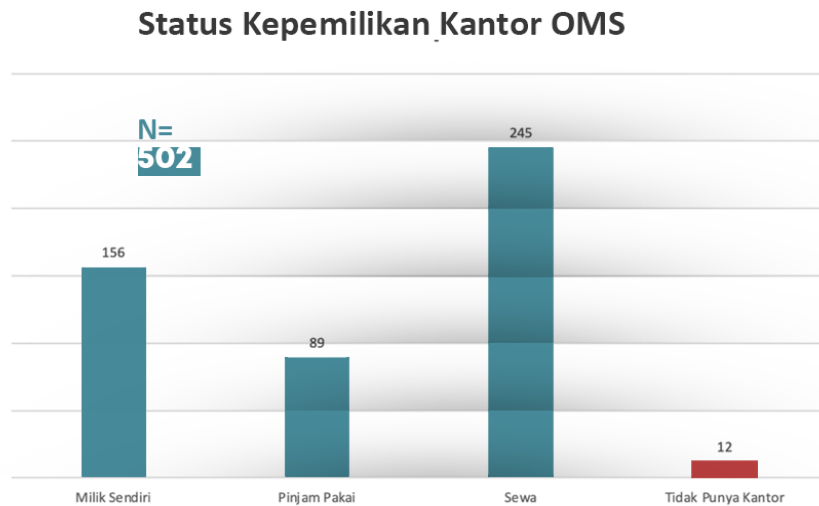
Berdasarkan tahun berdiri, OMS yang berpartisipasi dalam survei verifikasi terlihat dari grafik berikut ini.



Gambar 4.6 Peta OMS berdasarkan tahun berdiri

Dari tahun berdiri terdapat 8 OMS yang paling senior dalam mengisi demokratisasi di Indonesia. Namun demikian terdapat OMS yang masih berumur 1 tahun (kelahiran tahun 2022) yakni sebanyak 8 OMS. Dari 509 OMS yang berpartisipasi, OMS yang lahir tahun 1999 lebih banyak yang berpartisipasi yakni sebanyak 27 OMS.

Salah satu informasi dasar yang digali dari OMS adalah soal kepemilikan kantor. Berikut data informasi yang berhasil dikumpulkan dari survei verifikasi OMS Konsil-INFID:



*Gambar 4.7 Status kepemilikan kantor OMS*

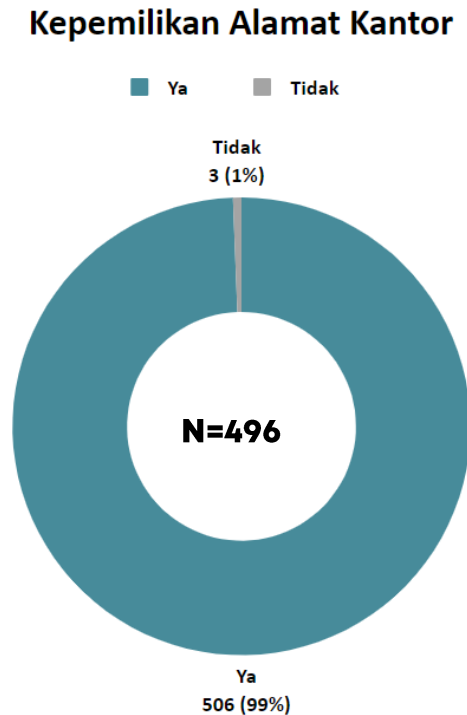
Dari 509 OMS yang mengikuti verifikasi, hanya 502 OMS yang menjawab soal status kepemilikan kantor, sebanyak 7 OMS tidak menjawab soal status kepemilikan kantor. Dari 502 OMS yang menjawab soal status kepemilikan kantor, 156 OMS menyatakan bahwa kantor yang digunakan sekarang adalah milik sendiri, sebanyak 89 OMS menyatakan kantornya pinjam pakai, 245 OMS menyatakan sewa dan 12 OMS menyatakan tidak punya kantor.

### **4.3 Dimensi Eksistensi**

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, eksistensi dalam penelitian ini digali dengan merujuk pada UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan legalitas (wujud organisasi), tujuan dan kegiatan, struktur organisasi, laporan keuangan dan adanya aktivitas.

### 4.3.1 Eksistensi Rumpun Wujud (Legalitas dan Alamat Kantor)

Dimensi eksistensi dijabarkan melalui dua indikator pertanyaan, yakni mengenai legalitas dan alamat kantor atau korespondensi sebagai bagian dari rumpun wujudnya sebuah organisasi. Dari 509 OMS yang berpartisipasi, 506 OMS memiliki alamat kantor sedangkan 3 OMS lainnya tidak mengisi alamat kantor. Berikut grafik kepemilikan alamat kantor.



Gambar 4.8 Grafik kepemilikan kantor

Selain soal wujud dalam konteks kepemilikan alamat kantor, rumpun wujud eksistensi lembaga juga dilihat dari sisi kepemilikan legalitas sebagai bagian dari pengakuan atas eksistensi lembaga dari pemerintah. Dalam UU Ormas, Ormas terbagi pada dua bagian besar, yakni Ormas berbadan hukum dan ormas tidak berbadan hukum. Badan hukum yang dimaksud adalah ormas yang memiliki AHU dari Kemenkumham, baik yang berbentuk Yayasan maupun Perkumpulan. Selain itu, terdapat Ormas yang tidak berbadan hukum yang bisa mencatatkan diri (terdaftar) di Kemendagri ataupun Ormas yang beraktivitas, diketahui keberadaannya oleh pemerintah beroperasi selama tidak menyalahi peraturan yang berlaku.

Berikut peta OMS yang berpartisipasi dalam survei berdasarkan kepemilikan legalitas.

## Kepemilikan Legalitas

N=  
509

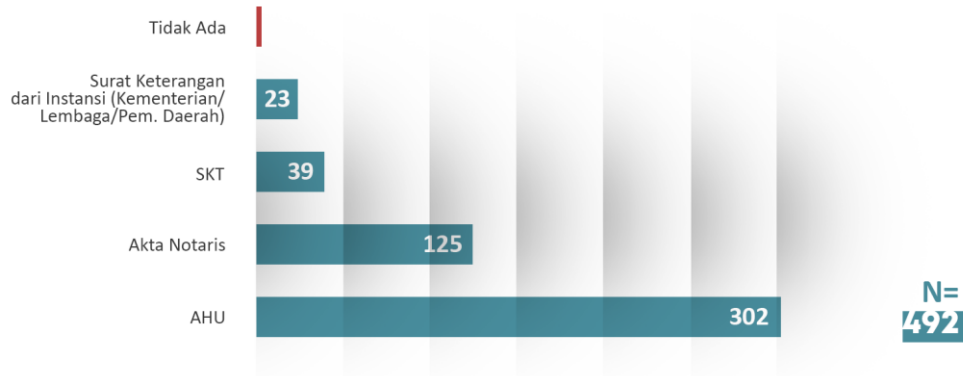


Gambar 4.9 Kepemilikan Legalitas

Dari 509 OMS yang berpartisipasi dalam survei verifikasi, 486 lembaga menyatakan memiliki legalitas lembaga, sedangkan 21 lembaga lainnya menyatakan tidak memiliki legalitas dan 2 di antaranya tidak menjawab pertanyaan soal kepemilikan legalitas lembaga.

Berikut gambaran legalitas berdasarkan jenisnya:

## Data Partisipasi OMS Survei Konsil LSM-INFID (OMS yang ada kontaknya)



Gambar 4.10 Jenis Legalitas atau Pengesahan OMS

Dari 509 OMS yang berpartisipasi dalam survei verifikasi, hanya 492 OMS yang menjawab jenis legalitas lembaga. Jenis legalitas tersebut adalah AHU, SKT, Akta Notaris, dan Surat Keterangan dari instansi pemerintah.

Jumlah lembaga yang memiliki legalitas dari Kemenkumham (AHU) sebanyak 302 lembaga. Lembaga yang memiliki SKT sebanyak 39 lembaga, terdapat sebanyak 125 lembaga menyatakan hanya memiliki akta notaris, 23 lembaga menyatakan memiliki surat keterangan dari instansi pemerintah, 3 OMS menyatakan tidak memiliki legalitas dan 15 lainnya tidak mengisi.

### 4.3.2 Rumpun Tujuan dan Kegiatan

Rumpun tujuan dan kegiatan organisasi dipetakan dalam 4 sub bahasan, yakni soal Visi dan misi serta kepemilikan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi.

Berikut gambaran kepemilikan visi dan misi organisasi.

Tabel 4.4 Penulisan visi dan misi organisasi

Menuliskan Visi dan Misi	Ya Menuliskan	%	Tidak Menuliskan	%
Visi	455	89,3	54	10,7
Misi	446	91,5	63	8,5

Dari matriks di atas bisa dijelaskan bahwa OMS yang menuliskan visinya dalam survei sebanyak 455 lembaga atau sebanyak 89,3 persen, sedangkan 54 lembaga lainnya atau 10,7 persen tidak menuliskan visi lembaganya.

Begitupun dengan Misi, sebanyak 446 OMS atau 91,5 persen menuliskan misi lembaganya dan 63 lainnya atau 8,5 persen tidak menuliskan misi lembaganya.

Dalam rumpun tujuan dan kegiatan, selain dipetakan melalui kepemilikan visi dan misi juga digali soal kepemilikan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Berikut gambaran kepemilikan AD/ART dari OMS yang berpartisipasi dalam survei:

Tabel 4.4 Kepemilikan AD/ART

Kepemilikan AD/ART	Ya	%	Tidak	%	Tidak Jawab	%
Anggaran Dasar	485	95,3	20	3,9	4	0,8
Anggaran Rumah Tangga	475	93,3	28	5,5	6	1,2

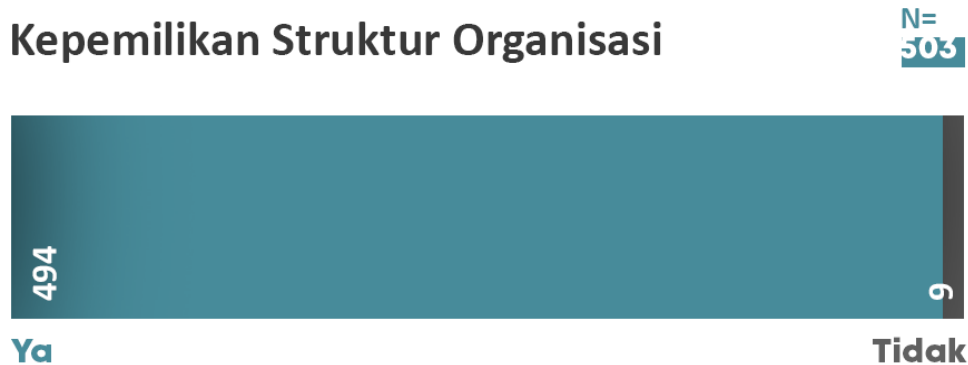
Dari 509 OMS yang berpartisipasi, 485 OMS atau 95,3 persen OMS menyatakan memiliki Anggaran Dasar (AD), sedangkan 20 OMS atau 3,9 persen OMS menyatakan

tidak memiliki Anggaran Dasar serta 4 OMS atau 0,8 persen OMS lainnya tidak menjawab.

Begitupun dengan Anggaran Rumah Tangga (ART), dari 509 OMS yang mengikuti survei, 475 atau 93,3 persen OMS menyatakan memiliki Anggaran Rumah Tangga (ART), 28 atau 5,5 persen OMS menyatakan tidak memiliki ART dan 6 atau sebanyak 1,2 persen OMS lainnya tidak menjawab soal kepemilikan Anggaran Rumah Tangga.

#### 4.3.3 Rumpun Struktur Organisasi

Kelengkapan organisasi lainnya untuk memotret eksistensi yang digali dalam survei ini adalah soal struktur organisasi. Berikut rekapitan jawaban responden terkait kepemilikan struktur organisasi:



Gambar 4.11 Kepemilikan Struktur organisasi

Dari 509 OMS yang berpartisipasi, 494 atau sebanyak 97 persen OMS menyatakan memiliki struktur organisasi sedangkan 9 atau sebanyak 1,7 persen OMS menyatakan tidak memiliki struktur organisasi serta 6 atau 1,3 persen OMS tidak menjawab soal kepemilikan struktur organisasi.

#### 4.3.4 Laporan Keuangan

Indikator lainnya untuk memotret soal eksistensi organisasi adalah soal laporan keuangan. Laporan keuangan ini digali dengan satu (satu) indikator pertanyaan, yakni kepemilikan laporan keuangan.

Berikut gambaran kepemilikan laporan keuangan OMS yang berpartisipasi dalam survei.

## Kepemilikan Laporan Keuangan Lembaga

N=509



Gambar 4.12 Kepemilikan laporan keuangan lembaga

Dari 509 OMS yang berpartisipasi 456 lembaga atau sebanyak 89,5 persen OMS menyatakan memiliki laporan keuangan lembaga, 45 atau sebanyak 8,8 persen Oms menyatakan tidak memiliki laporan keuangan dan 8 lembaga atau sebanyak 1,7 persen OMS lainnya tidak menjawab pertanyaan terkait kepemilikan laporan keuangan lembaga.

### 4.3.5 Aktivitas

Salah satu indikator yang digali dari dimensi eksistensi adalah adanya aktivitas yang dijalankan oleh OMS. Secara operasional, rumpun aktivitas ini dijabarkan dengan pertanyaan apakah memiliki program yang dijalankan secara rutin.

Tabel 4.6 Aktivitas Lembaga

	Ya punya	%	Tidak punya	%	Tidak isi	%
Memiliki Aktivitas	456	89,6	49	9,6	4	0,8

Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa dari 509 OMS yang berpartisipasi dalam survei, sebanyak 456 lembaga atau sebesar 89,6 persen OMS menyatakan memiliki aktivitas atau program yang dijalankan secara rutin, 49 lembaga atau 9,6 persen lainnya menyatakan tidak memiliki program rutin dan 4 lembaga atau 0,8 persen lainnya tidak menjawab pertanyaan soal kepemilikan program/aktivitas.

#### 4.4 Dimensi Kapasitas Organisasi

Kapasitas organisasi dalam penelitian ini dibagi kepada 6 rumpun, yakni strategi, struktur atau tata kelola organisasi, keahlian atau kompetensi organisasi, sumber daya manusia (SDM) organisasi, Akuntabilitas terkait dengan (akuntabilitas kinerja; pengelolaan keuangan (transparansi); transparansi informasi atau visibilitas dan pencegahan konflik kepentingan), serta aktivitas berkelanjutan.

##### 4.4.1 Rumpun Strategi

Rumpun strategi dalam penelitian untuk menggambarkan tingkat kapabilitas OMS dibagi kepada 3 indikator, seperti: rencana kerja, rencana tahunan, rencana strategis (Renstra).

Berikut gambaran kepemilikan rencana kerja yang digali dari OMS yang berpartisipasi dalam survei verifikasi data OMS.

*Tabel 4.7 Kepemilikan Rencana Kerja*

	Ya, punya	%	Tidak punya	%	Tidak isi	%
Memiliki Rencana Kerja/Kegiatan	497	97.64	9	1.77	3	0.59

Dari table di atas dapat dijelaskan bahwa dari 509 OMS, yang menjawab memiliki rencana kerja sebanyak 497 OMS atau 97,64 persen, 9 OMS atau 1,77 persen menyatakan tidak memiliki rencana kerja dan sebanyak 3 OMS atau 0,59 persen tidak menjawab apakah memiliki rencana kerja atau tidak.

Selain rencana kerja, dalam survei ini juga digali soal kepemilikan rencana tahunan dan rencana strategis organisasi. Berikut gambaran kepemilikan rencana tahunan dan rencana strategis (Renstra) yang digali dari OMS yang mengisi verifikasi.

*Tabel 4.8 Strategi Organisasi*

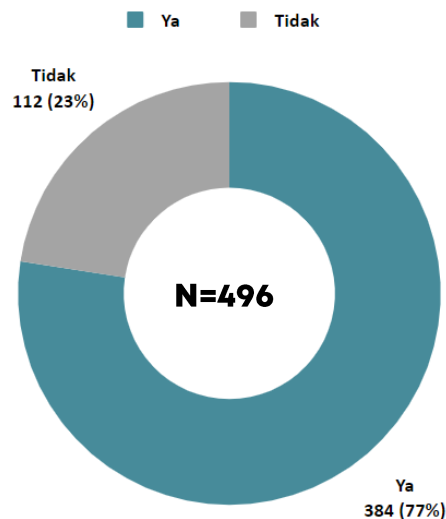
	Ya	%	Tidak Mengisi	%	Tidak Mengisi	%
Rencana Tahunan	483	94,9	24	4,7	2	0,4
Rencana Strategis	425	83,5	80	15,7	4	0,8

Dari 509 OMS yang berpartisipasi dalam Survei verifikasi OMS, yang menyatakan memiliki rencana tahunan sebanyak 483 atau sebanyak 94,9 persen OMS memiliki rencana tahunan, 24 lembaga atau 4,7 persen OMS menyatakan tidak memiliki rencana tahunan dan 2 OMS 0,4 persen tidak mengisi.

Sedangkan untuk rencana strategis (Renstra), sebanyak 425 OMS atau sebesar 83,5 persen OMS yang berpartisipasi menyatakan memiliki rencana strategis, 80 lembaga atau 15,7 persen menyatakan tidak memiliki Renstra dan terdapat 4 lembaga atau 0,8 persen OMS tidak menjawab soal kepemilikan Renstra.

Selain kepemilikan rencana tahunan dan rencana strategis (Renstra), salah satu poin penting dalam rumpun strategi adalah soal pelibatan penerima manfaat dalam penyusunan Renstra. Berikut gambaran keterlibatan penerima manfaat dalam Renstra yang dibuat oleh OMS yang ikut berpartisipasi.

#### Pelibatan Penerimaan Manfaat dalam Renstra



Gambar 4.13 Grafik Pelibatan Penerima Manfaat dalam Renstra

Dari grafik tersebut dapat diketahui, dari 509 OMS yang berpartisipasi hanya 496 yang menjawab pertanyaan soal pelibatan penerima manfaat dalam Renstra. Dari 496 tersebut, sebanyak 384 OMS atau 77 persen menyatakan melibatkan penerima manfaat dalam penyusunan Renstra. Sisanya sebanyak 112 OMS atau 23 persen menyatakan tidak melibatkan OMS dalam Renstra serta sebanyak 13 OMS tidak menjawab soal pertanyaan ini.

#### 4.4.2 Rumpun Struktur atau Tata Kelola

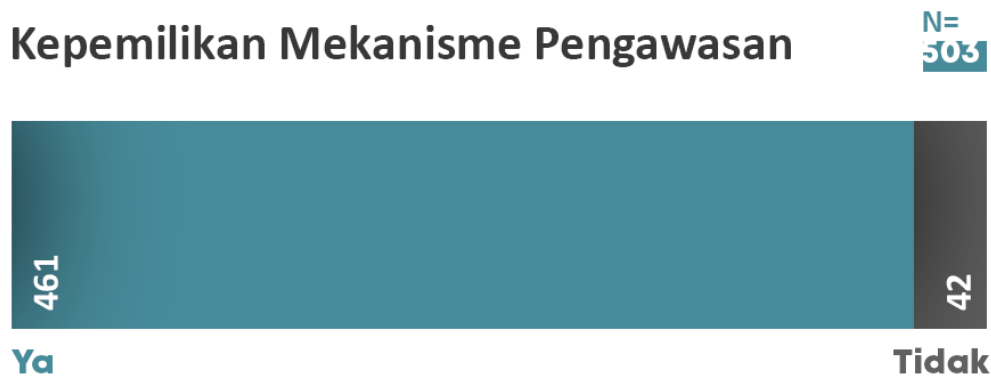
Untuk rumpun struktur dan tata kelola digali dengan mengajukan 2 indikator pertanyaan terkait kepemilikan mekanisme rapat dan kepemilikan mekanisme pengawasan. Berikut gambaran kepemilikan mekanisme rapat OMS yang ikut berpartisipasi dalam survei verifikasi OMS.

Tabel 4.9 Kepemilikan Mekanisme Rapat

	Ya	%	Tidak Memiliki	%	Tidak Mengisi	%
Mekanisme Rapat	480	94,3	21	4,1	8	1,6

Terkait mekanisme rapat, sebanyak 480 lembaga atau 94,3 persen OMS menyatakan memiliki mekanisme rapat di lembaganya, 21 OMS atau 4,1 persen OMS menyatakan tidak memiliki mekanisme rapat dan 8 OMS atau 1,6 persen OMS lainnya tidak menjawab.

Selain mekanisme rapat, indikator yang digunakan untuk menggali dimensi struktur dan tata kelola adalah dengan menanyakan soal mekanisme pengawasan. Berikut gambaran kepemilikan mekanisme pengawasan dari OMS yang mengikuti survei verifikasi.



Gambar 4.14 Mekanisme pengawasan

Grafik di atas menjelaskan bahwa dari 509 OMS yang berpartisipasi yang menyatakan memiliki mekanisme pengawasan sebanyak 461 OMS atau sebesar 90,5 persen OMS. Sebanyak 42 OMS atau 8,2 persen OMS menyatakan tidak memiliki mekanisme pengawasan dan 6 OMS atau 1,3 OMS tidak menjawab soal kepemilikan mekanisme pengawasan.

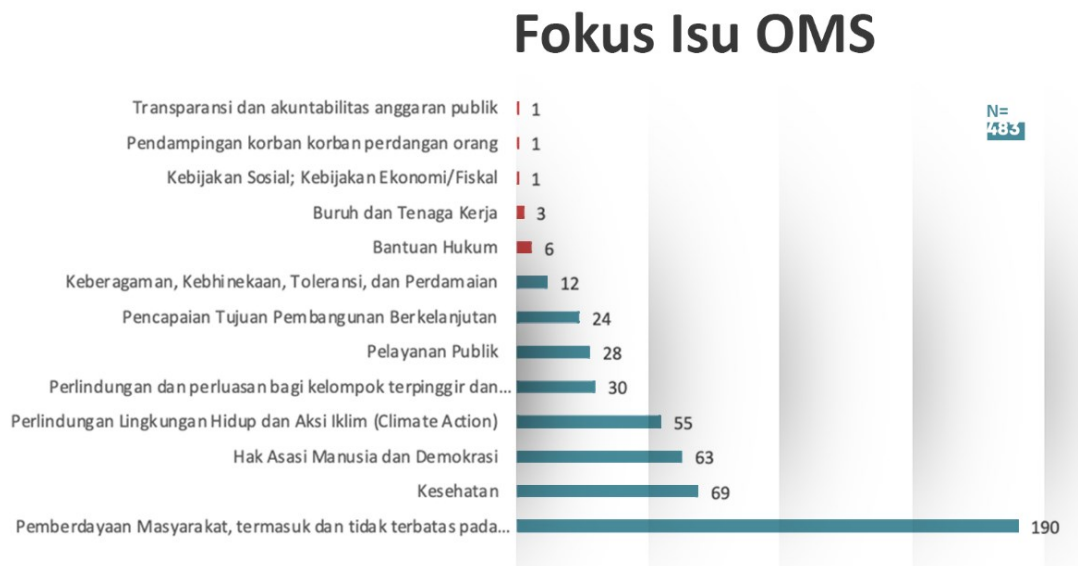
#### 4.4.3 Rumpun Keahlian atau Kompetensi

Rumpun ini akan digali dengan 3 indikator pertanyaan, yakni soal fokus isu yang digeluti oleh OMS, isu lain yang digeluti oleh OMS serta kompetensi yang dimiliki oleh OMS dalam kerja-kerja di organisasi/lembaga.

Berikut gambaran isu utama yang digiatkan oleh OMS. Adapun isu utama yang diajukan dalam petanyaan adalah:

1. Hak Asasi Manusia dan Demokrasi;
2. Pelayanan publik;
3. Perlindungan lingkungan hidup dan aksi iklim (*climate action*);
4. Keberagaman, kebhinekaan, toleransi, dan perdamaian;
5. Buruh dan tenaga kerja;
6. Kesehatan;
7. Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
8. Pemberdayaan masyarakat, termasuk dan tidak terbatas pada perempuan, anak, Penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya; dan
9. Perlindungan dan perluasan bagi kelompok terpinggir dan rentan.

Berikut sebaran fokus isu OMS dari hasil survei verifikasi OMS.



Gambar 4.15 Fokus Isu OMS

Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa Isu utama yang paling banyak digeluti oleh OMS adalah:

1. Pemberdayaan Masyarakat, termasuk dan tidak terbatas pada perempuan, anak, Penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya sebanyak 190 lembaga;
2. Kesehatan sebanyak 69 lembaga,

3. hak asasi manusia dan demokrasi sebanyak 63 lembaga,
4. lingkungan sebanyak 55 lembaga,
5. Perlindungan dan perluasan bagi kelompok rentan sebanyak 30 lembaga,
6. Pelayanan publik sebanyak 28 lembaga,
7. Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebanyak 24 lembaga,
8. Keberagaman, kebhinekaan dan toleransi sebanyak 12 lembaga,
9. Bantuan hukum sebanyak 6 lembaga,
10. Buruh dan tenaga kerja sebanyak 3 lembaga; dan
11. Kebijakan sosial 1 lembaga,
12. Pendampingan korban 1 lembaga
13. Transparansi dan akuntabilitas anggaran publik 1 lembaga
14. 16 lembaga lainnya tidak menjawab soal fokus isunya.

Selain fokus itu atau isu utama, dalam penelitian ini OMS juga diberikan pertanyaan semi terbuka untuk mengisi isu lainnya yang digeluti oleh OMS. Berikut peta isu lainnya yang menjadi perhatian OMS.



*Gambar 4.16 Top list isu OMS*

Dari 509 OMS yang berpartisipasi terkumpul sebanyak 3.268 total isu lain yang dituliskan oleh OMS. Jika dikelompokkan dari 3.268 isu tersebut bisa dibagi ke dalam 57 kelompok isu. Dari 57 isu lainnya tersebut, 10 isu lain yang paling banyak digeluti oleh OMS adalah isu terkait dengan gender sebanyak 287 lembaga, lingkungan sebanyak 225 lembaga, isu Hukum dan hAM sebanyak 222 lembaga, pendidikan

sebanyak 218 lembaga, isu kemiskinan sebanyak 217 lembaga, ekonomi sebanyak 193 lembaga, isu kebijakan sebanyak 192 lembaga, isu Kesehatan sebanyak 184 lembaga, isu perubahan iklim sebanyak 155 lembaga dan isu disabilitas sebanyak 132 lembaga.

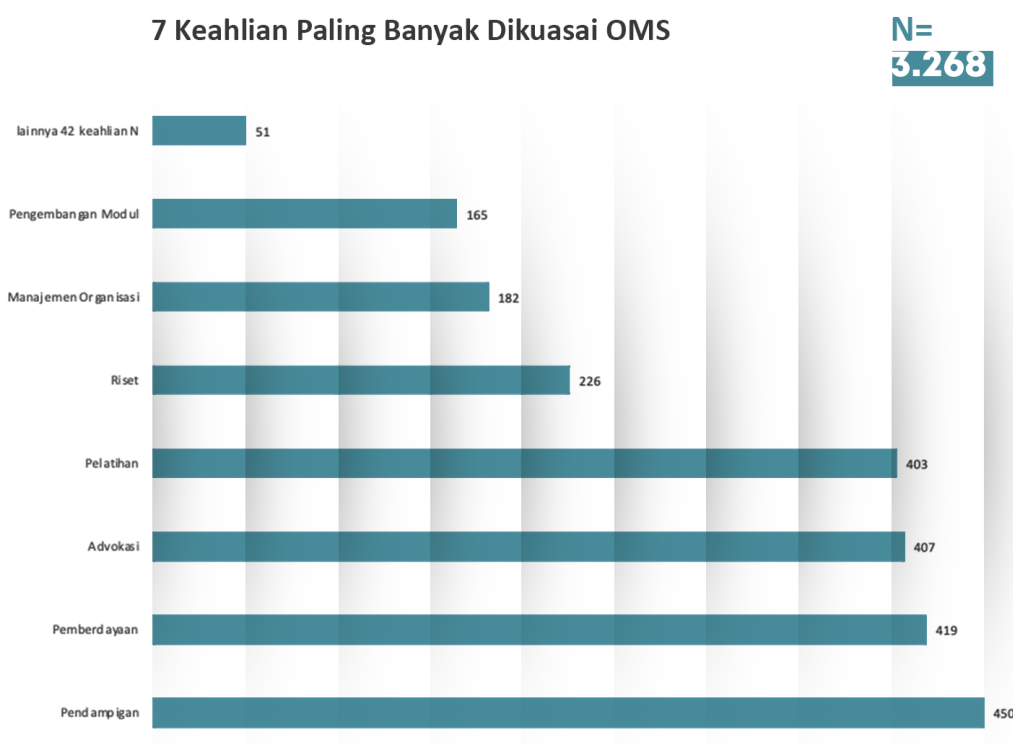
Selain 10 top isu lain, terdapat 47 kelompok isu lain yang digeluti oleh OMS dengan jumlah mencapai 1.558 item. Dijelaskan pada table di bawah ini.

*Tabel 4.10 Kelompok Isu Lain di OMS*

1. <i>Good Government dan Good Governance</i>	30. Penghargaan terhadap sumber-sumber kearifan lokal
2. Hak hak LGBTIQ+	31. Penguatan dan konsultasi organisasi Masyarakat sipil
3. Kemitraan	32. Penjangkauan Komunitas (Populasi Kunci) Beresiko LSL, Waria dan PSP
4. Masyarakat Hukum Adat	33. Perlindungan satwa dan habitat (Burung nuri talaud eos histrio talautensis)
5. Perpustakaan Keliling	34. perubahan perilaku dan pencegahan penularan HIV (penjangkauan dan rujukan VCT bagi Komunitas LSL, TG, PWID)
6. Pertanian Berkelanjutan	35. petani dan nelayan
7. Sosial	36. Politik
8. Advokasi kebijakan terkait adiksi dan HIV	37. Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS
9. Bantuan Hukum	38. Religi
10. Budaya	39. Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik yang responsif gender dan inklusif
11. Digital	40. Tata Ruang
12. Good Governance dan Piece Building	41. Teknologi
13. Inovasi	42. Tumbuh Kembang Anak
14. Kebencanaan	43. Layanan untuk pemenuhan hak korban atas keadilan, kebenaran, pemulihan dan ketidakberulangan terjadinya kekerasan terhadap perempuan
15. keberagaman	
16. Kelautan dan Perikanan	
17. kelompok minoritas	
18. Kemiskinan	
19. Kemitraan	
20. Kependudukan	
21. Keruangan Desa	
22. Kewirausahaan	
23. Manajemen SDA	
24. Manajemen SDM	
25. ODHA dan ODGPZ	
26. Pangan & Pertanian	
27. Pembangunan	

28. Pemilu dan demokrasi	44. Anti korupsi dan transparansi anggaran
29. Pengelolaan SDA berbasis Masyarakat adat	45. Perlindungan dan pendampingan bagi perempuan dan anak
	46. Pemberdayaan
	47. Ketahanan pangan keluarga

Selain fokus isu dan isu lain yang digeluti oleh OMS yang menjadikan OMS memiliki kapasitas dalam salah satu atau beragam isu juga ditopang oleh kompetensi yang dimiliki oleh OMS untuk mendukung implemetasi fokus isu dan isu lainnya. Berikut gambaran keahlian yang dimiliki OMS yang ikut verifikasi OMS:



*Gambar 4.17 Keahlian OMS*

Secara kategori jumlah komponen keahlian OMS yang berpartisipasi sebanyak 49 keahlian. Dari 49 kelompok keahlian tersebut, terdapat 7 komponen keahlian yang paling banyak dikuasai oleh OMS, diantaranya: 450 OMS menyatakan memiliki keahlian pendampingan, 419 OMS memiliki keahlian pemberdayaan, 407 OMS memiliki keahlian advokasi, 403 oMS memiliki keahlian pelatihan, 226 OMS memiliki keahlian riset, 182 OMS memiliki keahlian manajemen organisasi, dan 165 OMS memiliki keahlian pengembangan modul.

Selain 7 keahlian tersebut, terdapat 42 jenis keahlian lain yang dikuasai oleh OMS dengan jumlah mencapai 51. Daftar keahlian lainnya yang dimiliki oleh OMS dijelaskan pada tabel di bawah ini.

*Tabel 4.11 Keahlian Organisasi*

1. Bantuan teknis	25. Layanan Rehabilitasi Low Vision
2. Budaya	26. Lingkungan
3. Drafter kebijakan publik	27. Manajemen SDA
4. Ekonomi	28. Mobilisasi sumber daya, Penyaluran dana hibah
5. Gender	29. Pemantauan dan evaluasi
6. Healing	30. Pemantauan Kehutanan
7. Inovasi	31. Pembangunan Kawasan
8. Kebencanaan	32. Pemetaan dan analisa Geospasial, Disaster Manajemen
9. komunikasi kebijakan	33. Pengamatan burung dan habitat
10. Konsultasi Ekonomi	34. pengembangan ekonomi nelayan dan petani
11. media dan publikasi	35. pengembangan teknologi tepat guna pedesaan
12. Pembangunan	36. Penguatan Jaringan, fasilitasi dan asistensi lembaga lokal/daerah, baik perangkat daerah maupun LSM
13. Pendidikan	37. Penjangkauan
14. peningkatan kapasitas	38. Perempuan dan anak Disabilitas
15. Perubahan Iklim	39. Publikasi
16. Sosial	40. Shelter ODHIV
17. Tata Ruang	41. Spiritual
18. Teknologi	42. Vokasi
19. Bantuan Hukum	
20. Investasi korupsi	
21. Kampanye Publik	
22. Kewirausahaan sosial	
23. Konservasi	
24. Layanan Kesehatan reproduksi	

#### **4.4.4 Rumpun Sumber Daya Manusia (SDM)**

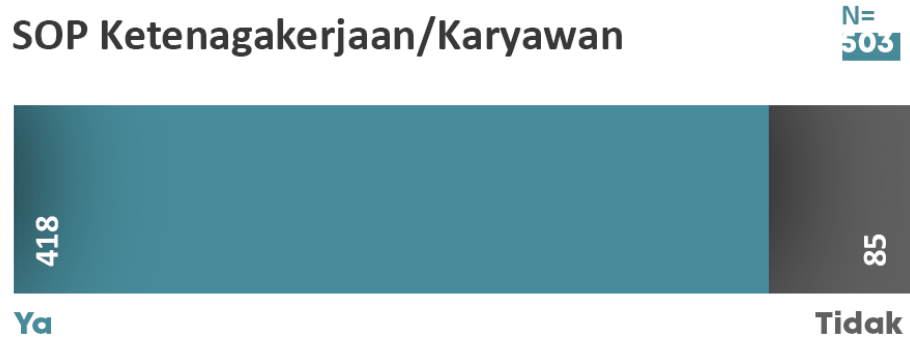
Rumpun sumber daya manusia untuk mengukur kapasitas organisasi diukur melalui 2 indikator, yakni kepemilikan tenaga ahli dan kepemilikan SOP ketenagakerjaan/karyawan. Berikut gambaran kepemilikan tenaga ahli di setiap organisasi yang mengikuti survei verifikasi OMS:

Tabel 4.12 Kepemilikan tenaga ahli

	Ya	%	Tidak	%	Tidak mengisi	%
Kepemilikan Tenaga Ahli	374	73,5	128	25,1	7	1,4

Dari 509 OMS yang berpartisipasi dalam survei, 374 lembaga atau 73,5 persen OMS menyatakan memiliki tenaga ahli di lembaganya, sedangkan 128 lainnya atau 25,1 persen OMS menyatakan tidak memiliki tenaga ahli dan 7 OMS atau 1,4 persen tidak mengisi pertanyaan mengenai kepemilikan tenaga ahli.

Indikator kunci lainnya untuk mengukur SDM adalah dengan pertanyaan soal kepemilikan SOP ketenagakerjaan/karyawan. Berikut gambaran kepemilikan SOP Karyawan dari OMS yang berpartisipasi dalam survei verifikasi OMS:

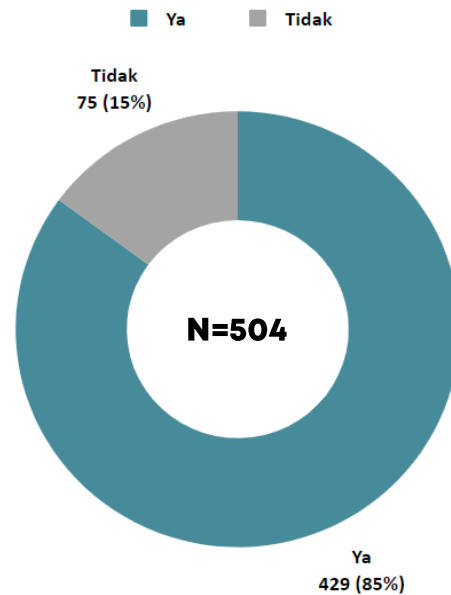


Gambar 4.18 SOP karyawan

Dari grafik di atas dapat dijelaskan, dari 509 OMS yang berpartisipasi sebanyak 418 lembaga atau sebesar 82,1 persen OMS menyatakan memiliki SOP ketenagakerjaan/karyawan, 85 lembaga atau 16,6 persen OMS menyatakan tidak memiliki SOP ketenagakerjaan/karyawan dan 6 OMS lainnya atau sebesar 1,3 persen OMS tidak menjawab soal kepemilikan SOP ketenagakerjaan/karyawan.

Selain SOP karyawan, indikator untuk menggali rumpun SDM OMS juga dilakukan melalui pertanyaan soal mekanisme volunteer. Berikut gambaran kepemilikan mekanisme volunteer dari OMS yang berpartisipasi dalam survei verifikasi data OMS.

### Kepemilikan Mekanisme Volunteer



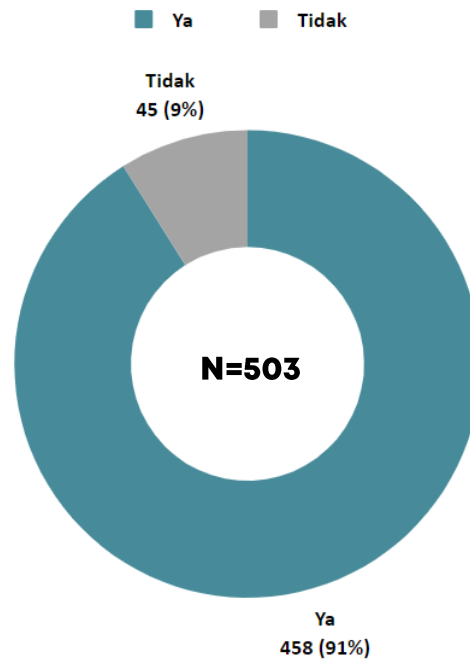
Gambar 4.19 Grafik Kepemilikan Mekanisme Volunteer

Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa dari 509 OMS yang berpartisipasi dalam survei verifikasi data OMS, hanya 504 OMS yang menjawab pertanyaan soal kepemilikan mekanisme volunteer sisanya sebanyak 5 OMS tidak menjawab.

Dari OMS yang menjawab, 429 OMS atau 85 persennya menyatakan memiliki mekanisme volunteer sedangkan sebanyak 75 OMS atau sebesar 15 persen menyatakan tidak memiliki mekanisme volunteer.

Indikator lainnya untuk rumpun sumber daya manusia digali melalui pertanyaan soal kepemilikan perencanaan peningkatan SDM lembaga. Berikut gambaran soal perencanaan peningkatan SDM yang dikelola lembaga.

## Kepemilikan Rencana Peningkatan SDM



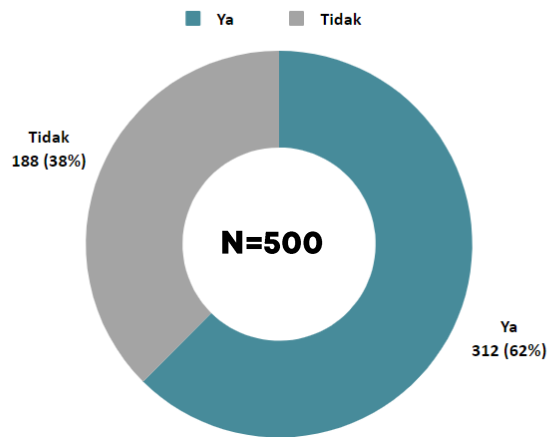
Gambar 4.20 Grafik Kepemilikan Perencanaan Peningkatan SDM

Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa dari 509 OMS yang berpartisipasi hanya 503 OMS yang ikut menjawab pertanyaan mengenai kepemilikan perencanaan peningkatan SDM.

Dari 503 yang menjawab, sebanyak 458 OMS atau 91 persennya menyatakan memiliki perencanaan peningkatan SDM sedangkan 9 persen atau 45 OMS lainnya menyatakan tidak memiliki perencanaan peningkatan SDM di lembaganya.

Mekanisme lain yang terkait dengan SDM lembaga adalah soal mekanisme keamanan staf. Dalam survei ini secara spesifik ditanyakan kepada OMS apakah memiliki mekanisme keamanan staf. Berikut gambaran mengenai kepemilikan mekanisme keamanan staf dari OMS yang mengikuti survei verifikasi.

### Kepemilikan Mekanisme Keamanan Staf



Gambar 4.21 Grafik Kepemilikan Mekanisme Keamanan Staf

Grafik di atas menunjukkan bahwa dari 509 OMS yang berpartisipasi, sebanyak 312 OMS atau 62 persen menyatakan memiliki mekanisme keamanan staf, sedangkan 188 OMS atau 38 persen menyatakan tidak memiliki mekanisme keamanan staf dan sisanya sebanyak 9 OMS tidak menjawab apakah memiliki mekanisme keamanan staf atau tidak.

#### 4.4.5 Rumpun Akuntabilitas

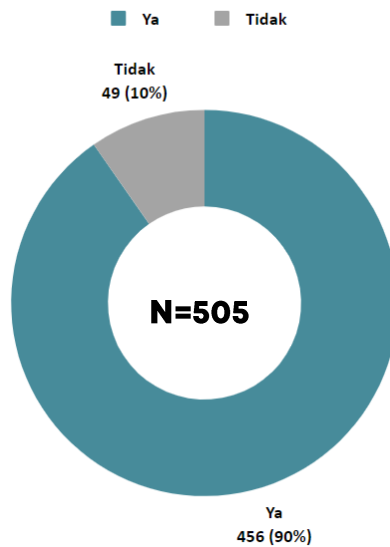
Rumpun akuntabilitas dibagi kedalam dimensi yakni akuntabilitas kinerja dengan 5 indikator pertanyaan; pengelolaan keuangan (transparans) dengan 3 indikator pertanyaan; transparansi informasi atau visibilitas dengan 6 Indikator pertanyaan dan pencegahan konflik kepentingan dengan 2 indikator pertanyaan. Berikut penjabaran masing-masing dimensi dari akuntabilitas.

##### 4.4.5.1 Akuntabilitas Kinerja

Salah satu indikator penting dalam dimensi akuntabilitas adalah soal akuntabilitas kinerja. Dalam konteks tersebut, survei ini menggali informasi terkait dengan akuntabilitas kinerja OMS dengan 5 indikator pertanyaan, yakni soal kepemilikan program rutin, laporan program, pemilihan SOP program, adanya penerima manfaat, MEL, Audit project, audit kelembagaan dan Mekanisme rancangan untuk mengumpulkan dan menganalisis pembelajaran organisasi.

Berikut gambaran akuntabilitas kinerja OMS dengan melihat sisi program rutin yang dijalankan.

### Kepemilikan Program Rutin

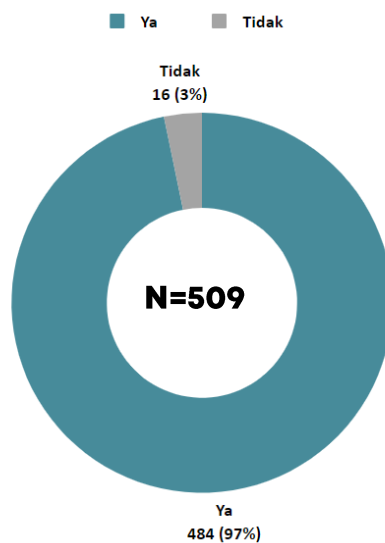


Gambar 4.22 Grafik Kepemilikan Program Rutin

Dari 509 OMS yang berpartisipasi, sebanyak 4 OMS tidak menjawab soal kepemilikan program rutin. Sisanya, yakni sebanyak 505 OMS terbagi kepada dua jawaban, yakni OMS yang menyatakan memiliki program rutin dan OMS yang tidak memiliki program rutin. OMS yang memiliki program rutin berjumlah 456 atau 90 persen, sedangkan 49 OMS lainnya atau 10 persen menyatakan tidak memiliki program rutin.

Selain program rutin, untuk menggali akuntabilitas kinerja juga ditanyakan soal kepemilikan laporan program. Berikut gambaran kepemilikan program dari OMS yang ikut berpartisipasi dalam survei verifikasi OMS.

### Kepemilikan Laporan Program



Gambar 4.23 Grafik Kepemilikan Laporan Program

Grafik di atas menunjukkan bahwa, dari 509 OMS yang berpartisipasi, 484 OMS atau 97 persen menyatakan memiliki laporan program, 16 OMS atau sebesar 3 persen lainnya menyatakan tiak memiliki laporan program dan terdapat 9 OMS yang tidak menjawab pertanyaan soal kepemilikan program rutin.

Selain soal kepemilikan program dan laporan program, yang tidak kalah penting adalah soal mekanisme program atau SPO program. Berikut gambaran akuntabilitas kinerja OMS dengan menggali soal kepemilikan SOP program:

*Tabel 4.13 SOP Program*

	Ya	%	Tidak	%	Tidak mengisi	%
SOP Program	450	88,5	49	9,7	8	1,8

Terkait dengan SOP Program, dari 509 OMS, 450 atau 88,5 persen OMS di antaranya menyatakan memiliki SOP program, 49 atau 9,7 persen OMS menyatakan tidak memiliki SOP program dan 8 atau 1,8 persen OMS lainnya tidak mengisi soal kepemilikan SOP Program.

Rumpun akuntabilitas kinerja lainnya yang juga digali adalah soal penerima manfaat. Berikut gambaran hasil verifikasi OMS terkait dengan penerima manfaat dari kegiatan-kegiatan OMS.

*Tabel 4.14 Penerima Manfaat*

	Ya menuliskan penerima manfaat	%	Tidak menuliskan penerima manfaat	%
Penerima Manfaat	488	96	21	4

Dari hasil survei ditemukan bahwa, dari 509 OMS yang mengikuti survei, yang menuliskan penerima manfaat dalam kegiatan/program sebanyak 488 lembaga atau 96 persen dan 21 lembaga atau 4 persen lainnya tidak menuliskan siapa penerima manfaat dari program organisasi/lembaga.

Indikator lainnya terkait akuntabilitas kinerja adalah pertanyaan soal kepemilikan mekanisme atau *tools* monitoring, evaluasi dan learning (MEL). Berikut gambaran kepemilikan MEL yang dimaksud.

Tabel 4.15 MEL

	Iya Memiliki	%	Tidak Memiliki	%	Tidak Menjawab	%
MEL	404	79,4	99	19,4	6	1,2

Dari tabel di atas bisa dijelaskan bahwa OMS yang memiliki mekanisme MEL sebanyak 404 lembaga atau sebanyak 79,4 persen dari total OMS yang berpartisipasi dalam survei, 99 OMS atau sebanyak 19,4 persen tidak memiliki mekanisme MEL dan 6 lembaga lainnya atau sebanyak 1,2 persen tidak menjawab soal kepemilikan MEL.

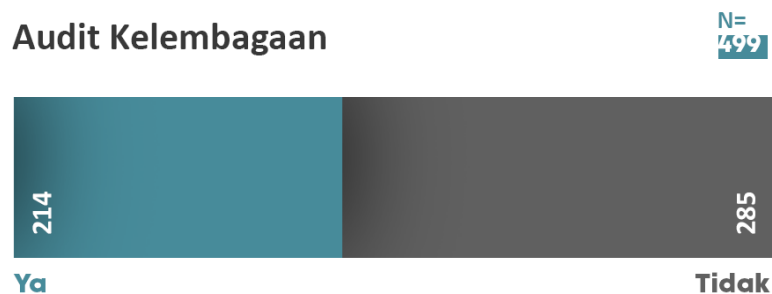
Selain soal MEL, indikator lain untuk menggali informasi terkait akuntabilitas kinerja adalah dengan pertanyaan terkait audit project. Berikut gambaran OMS terkait dengan audit project yang pernah dijalankan oleh OMS.

Tabel 4.16 Audit project

	Iya Memiliki	%	Tidak Memiliki	%	Tidak Menjawab	%
Audit Project	336	66	165	32,4	8	1,6

Tabel diatas menunjukkan bahwa, dari 509 OMS yang berpartisipasi, 336 diantaranya atau sebanyak 66 persen menyatakan melakukan audit project, 165 organisasi atau 32,4 persen OMS menyatakan tidka pernah melakukan audit project dan 8 lembaga lainnya atau 1,6 persen tidka menjawab pertanyaan soal audit project.

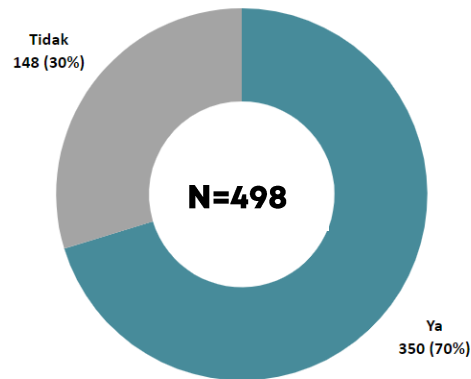
Indikator lain terkait dnegan akuntabilitas kinerja adalah dengan mengukur soal audit kelembagaan. Berikut gambaran kepemilikan audit kelembagaan OMS yang mengikuti proses verifikasi.



Gambar 4.24 Audit kelembagaan

Grafik di atas menunjukkan, dari 509 OMS yang berpartisipasi yang menyatakan memiliki audit kelembagaan sebanyak 214 lembaga atau 42 persen OMS, sisanya sebanyak 285 lembaga atau 56 persen OMS menyatakan tidak memiliki audit kelembagaan dan 10 lembaga atau 2 persen OMS lainnya tidak menjawab apakah memiliki audita kelembagaan atau tidak.

#### Kepemilikan Mekanisme Rancangan untuk Mengumpulkan dan Menganalisis Pembelajaran Organisasi



Gambar 4.25 Grafik Kepemilikan Mekanisme Rancangan untuk Mengumpulkan dan Menganalisis Pembelajaran Organisasi

Grafik di atas menunjukkan bahwa, dari 509 OMS yang ikut berpartisipasi, 11 OMS diantaranya tidak menjawab pertanyaan soalancangan dan analisis pembelajaran organisasi. Sisanya yakni 350 atau sebanyak 70 persen menyatakan memiliki mekanisme rancangan untuk mengumpulkan dan menganalisis pembelajaran organisasi dan 30 persen lainnya atau sebanyak 148 OMS menyatakan tidak memiliki mekanisme rancangan untuk mengumpulkan dan menganalisis pembelajaran organisasi.

#### 4.4.5.2 Pengelolaan Keuangan (Transparansi)

Terkait dengan indikator pengelolaan keuangan dalam penelitian ini memiliki beberapa indikator pertanyaan untuk menggali informasi terkait pengelolaan keuangan atau transparansi OMS, yakni melalui: kepemilikan NPWP, Kepemilikan rekening bank atas nama organisasi/lembaga, laporan pajak, kepemilikan SOP keuangan

Berikut gambaran soal kepemilikan NPWP dan rekening atas nama organisasi

## Kepemilikan NPWP

N=  
509



Gambar 4.26 Kepemilikan NPWP

Dari grafik di atas terlihat bahwa dari 509 OMS yang berpartisipasi dalam survei, sebanyak 470 OMS atau 92,3 persennya menyatakan memiliki NPWP, 35 OMS atau 6,8 persennya menyatakan tidak memiliki NPWP dan 4 OMS atau 0,9 persen lainnya tidak menjawab.

Selain NPWP, indikator lain terkait rumpun pengelolaan keuangan juga digali dari kepemilikan rekening bank atas nama lembaga. Berikut peta kepemilikan rekening lembaga.

## Kepemilikan Rekening Bank Atas Nama Organisasi

N=  
507

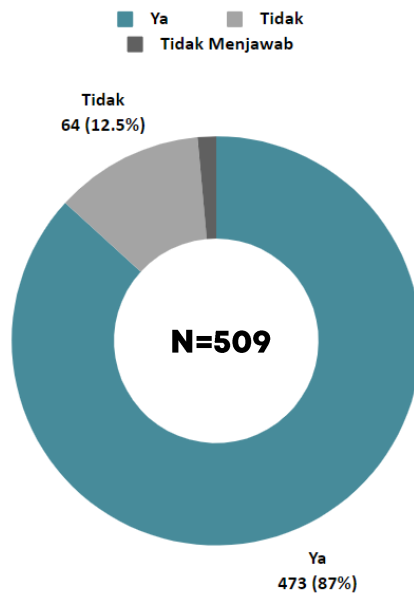


Gambar 4.27 Kepemilikan rekening bank

Dari 509 OMS yang berpartisipasi dalam survei, 461 lembaga atau sebesar 90,5 persen menyatakan memiliki rekening bank atas nama organisasi/lembaga, sebanyak 46 lembaga/OMS atau 9 persen menyatakan tidak memiliki rekening bank atas nama organisasi dan 2 OMS atau 0,5 persen lainnya tidak menjawab.

Selain kepemilikan NPWP dan rekening atas nama organisasi, indikator lainnya untuk mengukur soal pengelolaan keuangan adalah soal kepemilikan SOP keuangan lembaga. Berikut gambaran kepemilikan SOP keuangan lembaga.

### Kepemilikan SOP Keuangan

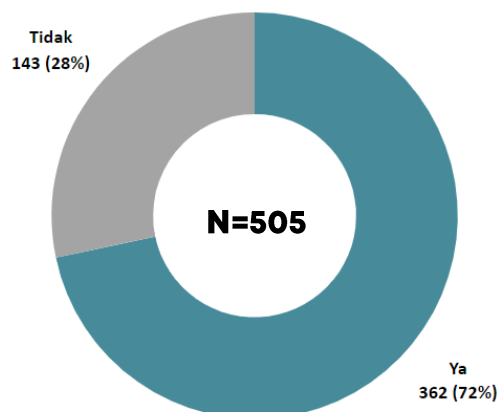


Gambar 4.28 Grafik Kepemilikan SOP Keuangan

Dari grafik di atas terlihat bahwa OMS yang memiliki SOP keuangan sebanyak 473 OMS atau sebanyak 87 persen dan yang tidak memiliki SOP keuangan sebanyak 64 OMS atau 12,5 persen dan sisanya sebanyak 8 OMS atau tidak menjawab soal kepemilikan SOP keuangan.

Satu indikator lainnya terkait dengan pengelolaan keuangan yang digali dari OMS adalah soal lapor pajak. Berikut gambaran OMS yang melaporkan pajak 1 tahun terakhir.

### OMS yang Melaporkan Pajak 1 Tahun Terakhir



Gambar 4.29 Grafik lapor Pajak

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa OMS yang melaporkan pajak satu tahun terakhir sebanyak 362 atau 72 persen OMS, sedangkan yang tidak melaporkan pajak 1 tahun terakhir sebanyak 143 atau 28 persen OMS dan sisanya sebanyak 4 OMS tidak menjawab soal laporan pajak selama 1 tahun terakhir.

#### 4.4.5.3 Transparansi Informasi atau Visibilitas

Untuk visibilitas diukur dengan dua indikator yakni kepemilikan media sosial dan publikasi rutin. Untuk publikasi rutin bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.17 Visibilitas OMS

	Punya	%	Tidak Punya	%
Facebook	363	71,3	146	28,7
Instagram	323	63,4	186	36,6
Twitter	115	22,6	394	77,4
Youtube	208	40,8	301	59,2

Dari kepemilikan media sosial di atas terlihat bahwa tidak semua OMS memiliki akun media sosial sebagai sarana sosialisasi kegiatan. Lembaga yang memiliki akun Facebook sebanyak 363 atau 71,3 persen OMS sedangkan 146 lainnya atau sebesar 28,7 persen tidak memiliki akun Facebook. Begitupun dengan akun Instagram, sebanyak 323 atau 63,4 persen OMS memiliki akun Instagram sedangkan 186 atau sebesar 36,6 persen lainnya tidak memiliki, begitupun dengan akun X/Twitter, sebanyak 115 OMS atau sebanyak 22,6 persen memiliki akun X/Twitter dan sebanyak 394 OMS atau 77,4 persen lainnya tidak memiliki akun X/Twitter, sedangkan untuk Youtube, sebanyak 208 OMS atau 40,8 persen memiliki channel Youtube dan sisanya, sebanyak 301 OMS atau 59,2 persen tidak memiliki Channel Youtube.

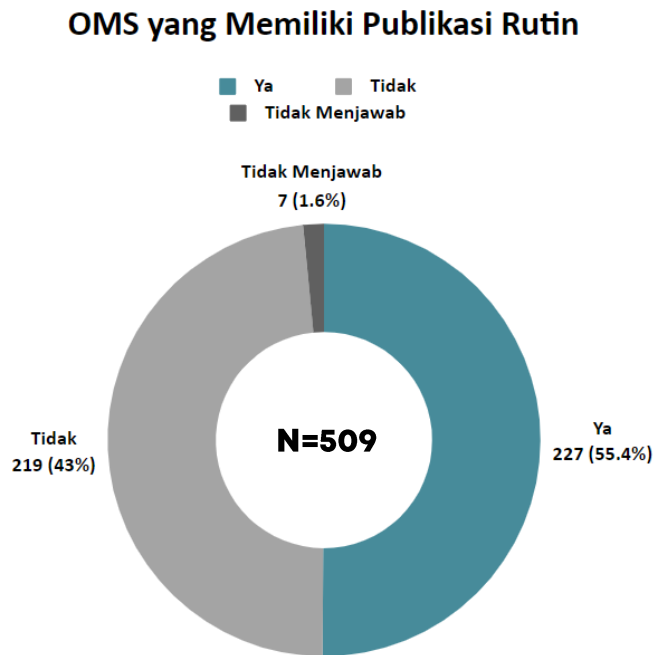
Indikator lain terkait dengan transparansi informasi adalah soal kepemilikan website lembaga. Berikut gambaran kepemilikan website lembaga dari OMS yang berpartisipasi dalam survei.

Tabel 4.18 Kepemilikan website

	Iya Memiliki Website	Tidak Punya Website
Kepemilikan website	254	255

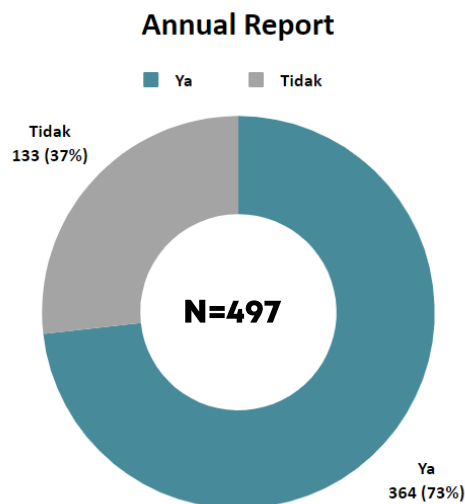
Data tabel di atas menunjukkan bahwa dari 509 OMS hanya 254 OMS atau 49,9 persen memiliki website sedangkan 255 OMS atau 50,1 persen lainnya tidak memiliki website.

Selain sosial media dan website, transparansi informasi mengenai OMS juga digali melalui publikasi rutin. Berikut gambaran kepemilikan publikasi rutin yang dikeluarkan oleh OMS sebagai bagian dari transparansi OMS.



*Gambar 4.30 Kepemilikan media publikasi rutin*

Seperti terlihat dalam grafik, dari 509 OMS yang berpartisipasi, yang mengeluarkan publikasi rutin sebanyak 277 OMS atau sebanyak 55,4 persen, sedangkan 219 OMS lainnya yakni sebesar 43 persen tidak mengeluarkan publikasi rutin dan sebanyak 7 OMS atau 1,3 persen tidak menjawab soal publikasi rutin.



Gambar 4.31 Grafik Kepemilikan Annual Report OMS

Indikator lainnya terkait dengan transparansi informasi adalah soal kepemilikan *annual report* lembaga. Dari 509 OMS yang berpartisipasi, hanya 497 yang memberikan jawaban sedangkan 12 OMS lainnya tidak menjawab pertanyaan terkait kepemilikan *Annual Report*.

Dari 497 OMS yang menjawab soal *Annual Report*, 364 OMS atau 73 persen menyatakan memiliki/mempublikasikan *annual report*, sedangkan sebanyak 133 OMS atau sebanyak 27 persen lainnya menyatakan tidak membuat *annual report* lembaga.

#### 4.4.5.4 Pencegahan Konflik Kepentingan

Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan OMS kapabel dalam rumpun akuntabilitas adalah soal pencegahan konflik kepentingan sebagai bagian penting dari akuntabilitas OMS. Dalam penelitian ini indikator rumpun pencegahan konflik kepentingan ditanyakan dengan dua pertanyaan inti, yakni mengenai kepemilikan mekanisme anti-fraud, mekanisme aduan dan mekanisme keamanan data. Berikut gambaran mengenai mekanisme anti-fraud dan mekanisme aduan yang dimiliki OMS.

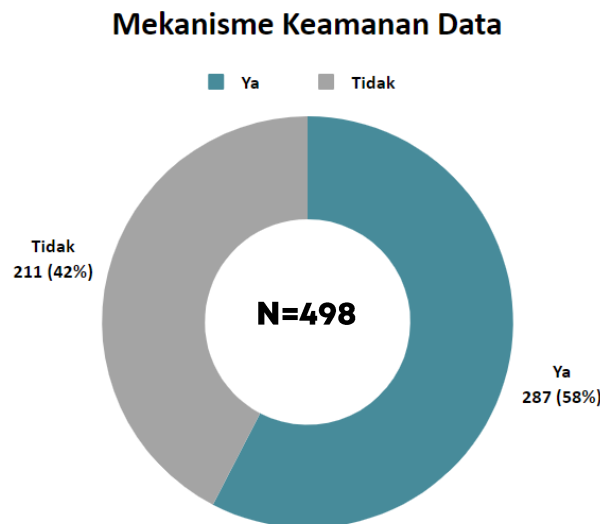
Tabel 4.19 Mekanisme Anti-fraud

	Ya Punya	Tidak punya	Tidak jawab
Mekanisme Anti-Fraud	312	181	16
Mekanisme Aduan	364	133	12

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 509 OMS yang berpartisipasi yang memiliki mekanisme anti-fraud sebanyak 312 OMS atau 61,2 persen, sedangkan 181 OMS atau sebanyak 35,5 persen tidak memiliki mekanisme anti-fraud dan sisanya sebanyak 16 OMS atau 2,3 persen tidak menjawab soal kepemilikan mekanisme anti-fraud.

Selain mekanisme anti-fraud, indikator rumpun pencegahan konflik kepentingan diukur melalui kepemilikan mekanisme aduan. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa OMS yang memiliki mekanisme aduan sebanyak 364 OMS atau 71,5 persen, sedangkan yang menyatakan tidak memiliki mekanisme aduan sebanyak 133 OMS atau 26,1 persen dan sisanya sebanyak 12 OMS atau 2,4 tidak menjawab soal kepemilikan mekanisme aduan.

Salah satu mekanisme yang digunakan untuk mencegah konflik kepentingan adalah mekanisme keamanan data yang dimiliki oleh OMS. Berikut gambaran kepemilikan mekanisme keamanan data yang dimiliki OMS:



*Gambar 4,32 Grafik Mekanisme Keamanan Data*

Grafik di atas menunjukkan bahwa OMS yang berpartisipasi dalam survei, mayoritas telah memiliki mekanisme keamanan data. Dari 509 OMS yang mengikuti survei, 498 diantaranya menjawab soal kepemilikan mekanisme keamanan data. Dari 498, yang menyatakan memiliki mekanisme keamanan data sebanyak 287 OMS atau 58 persen, sedangkan yang tidak memiliki mekanisme keamanan data berjumlah 211 atau sebanyak 42 persen dan sisanya sebanyak 11 OMS tidak menjawab pertanyaan soal kepemilikan mekanisme keamanan data.

#### 4.4.6 Rumpun Aktivitas Keberlanjutan

Indikator untuk menjabarkan soal adanya aktivitas berkelanjutan diukur dengan 4 indikator pertanyaan, yakni soal kepemilikan sumber dana, adanya diversifikasi pendanaan, kepemilikan asset sendiri, dan kepemilikan SOP Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Berikut gambaran rumpun aktivitas berkelanjutan yang diajukan kepada OMS, salah satunya soal kepemilikan sumber dana OMS:

Tabel 4.20 Kepemilikan sumber dana

	Ya memiliki	Tidak Memiliki	Tidak Menjawab
Memiliki Sumber Dana	355	142	12

Dari tabel di atas terlihat, dari 509 OMS yang mengikuti verifikasi hanya 355 OMS atau 69,7 persen yang menyatakan memiliki sumber dana, 142 OMS atau 27,9 persen menyatakan tidak memiliki sumber dana dan 12 OMS atau 2,35 persen lainnya tidak menjawab pertanyaan ini.

Terkait dengan keberlanjutan OMS, model pendanaan atau diversifikasi pendanaan menjadi tantangan tersendiri bagi OMS. Dari data yang masuk, ditemukan gambaran kepemilikan diversifikasi pendanaan OMS sebagai berikut.

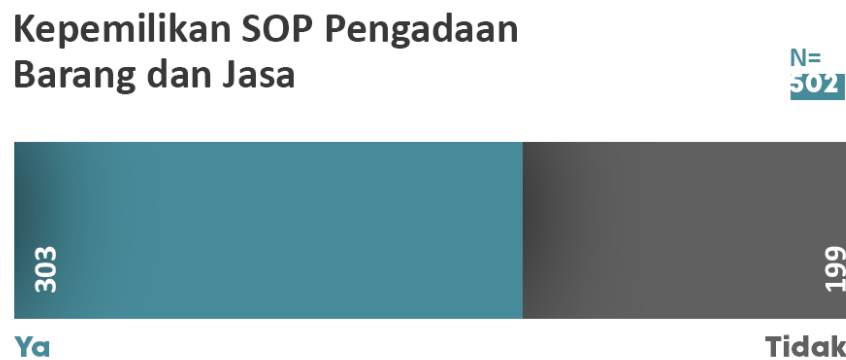
Tabel 4.21 Diversifikasi pendanaan

	Memiliki diversifikasi pendanaan	Pendanaan tunggal	Tidak memiliki pendanaan (tidak jawab)
Diversifikasi	361	129	19

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 509 OMS yang memiliki lebih dari satu sumber pendanaan sebanyak 361 OMS atau 70,9 persen, 129 OMS atau 25,3 persen lainnya menyatakan hanya memiliki 1 sumber pendanaan untuk lembaganya dan 19 OMS atau 3,8 persen lainnya tidak menjawab soal diversifikasi pendanaan bagi OMS.

Indikator lain yang diajukan untuk menggambarkan soal keberlanjutan OMS diukur melalui pertanyaan soal kepemilikan SOP pengadaan barang dan Jasa Pemerintah. SOP ini sebagai salah satu model yang akan menggambarkan kesiapan OMS dalam mengajukan dan mengelola dana demokratisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

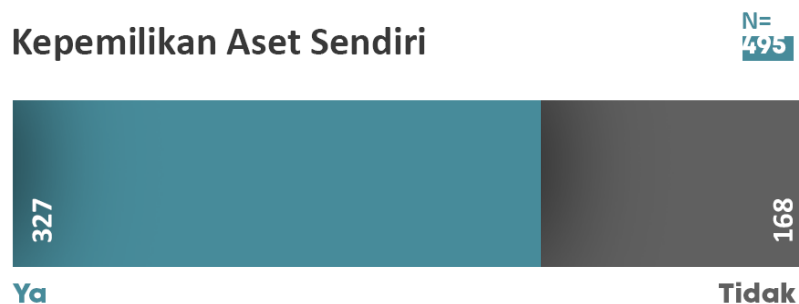
Berikut gambaran peta kepemilikan SOP pengadaan barang dan jasa yang dimiliki oleh OMS yang mengikuti survei verifikasi OMS.



Gambar 4.33 Kepemilikan SOP Barang dan Jasa

Tabel tersebut menunjukkan, dari 509 OMS yang berpartisipasi hanya 303 OMS atau 59,5 persen yang menyatakan memiliki SOP pengadaan barang dan jasa, sebanyak 199 OMS atau 39 persen menyatakan tidak memiliki SOP pengadaan barang dan jasa dan 7 OMS atau 1,5 persen lainnya tidak menjawab soal kepemilikan SOP pengadaan barang dan jasa.

Salah satu indikator soal keberlanjutan diukur melalui dua hal, yakni kepemilikan aset sendiri, kepemilikan mekanisme atau *tools* keberlanjutan organisasi dan kepemilikan unit usaha. Berikut gambaran kepemilikan aset sendiri dari OMS.

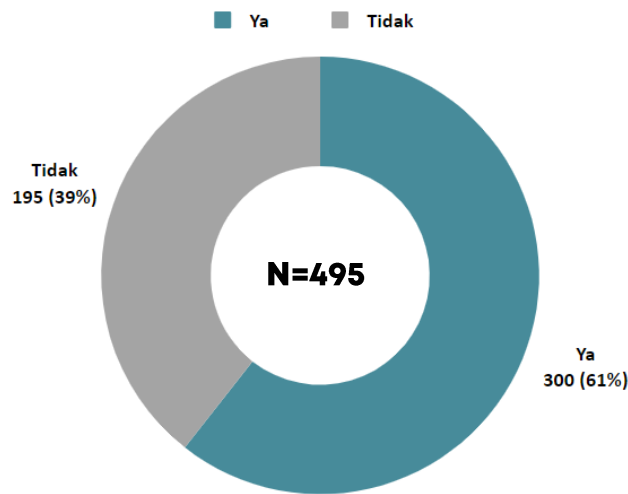


Gambar 4.25 Kepemilikan aset sendiri

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa sebanyak 327 OMS atau 64,2 persen memiliki aset sendiri dan 168 OMS atau 33 persen lainnya tidak memiliki aset sendiri sisanya sebanyak 14 OMS atau 1,7 tidak menjawab apakah memiliki aset sendiri atau tidak.

Selain kepemilikan aset sendiri, keberlanjutan juga diukur melalui kepemilikan mekanisme/tools keberlanjutan organisasi. Berikut gambaran soal kepemilikan mekanisme keberlanjutan organisasi.

### Kepemilikan Mekanisme/Tools Keberlanjutan Organisasi

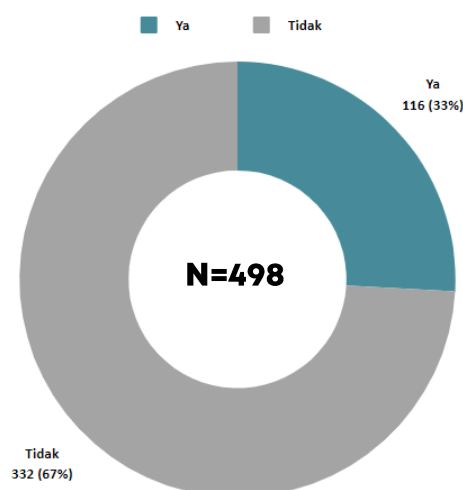


Gambar 4.35 Grafik kepemilikan mekanisme atau tools keberlanjutan organisasi

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa dari 509 OMS yang berpartisipasi hanya 495 yang menjawab pertanyaan mengenai kepemilikan mekanisme keberlanjutan Organisasi. Dari 495 OMS yang menjawab, 300 OMS atau 61 persen menyatakan memiliki mekanisme atau *tools* keberlanjutan OMS sedangkan 195 OMS atau 39 persen OMS lainnya menyatakan tidak memiliki mekanisme atau *tools* keberlanjutan organisasi.

Salah satu list pertanyaan untuk menggali potensi keberlanjutan organisasi adalah dengan menanyakan soal kepemilikan unit usaha organisasi. Berikut gambaran kepemilikan unit usaha organisasi

### Kepemilikan Unit Usaha Organisasi



Gambar 4.36 Grafik Kepemilikan Unit Usaha Organisasi

Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa dari 509 OMS yang berpartisipasi, hanya 498 OMS yang menjawab soal kepemilikan unit usaha organisasi.

Dari 498 OMS yang menjawab, terdapat 166 OMS atau 33 persen yang menyatakan memiliki unit usaha organisasi sedangkan 332 OMS lainnya atau sebesar 67 persen menyatakan tidak memiliki unit usaha organisasi.

#### **4.5 Pemberdayaan OMS**

Salah satu perbedaan survei verifikasi Konsil-Bappenas dengan Konsil-INFID adalah pengembangan pertanyaan dan satu pembahasan mengenai pemberdayaan OMS. Dalam konteks survei verifikasi Konsil-INFID salah satu hal yang digali dari OMS adalah soal model pemberdayaan seperti apa yang dibutuhkan oleh OMS agar bisa terus berkontribusi/berkelanjutan.

Untuk itu, dalam survei verifikasi ini dibuat 3 pertanyaan terbuka dan 1 pertanyaan tertutup untuk menggali potensi dan kebutuhan OMS agar berdaya. Ketiga pertanyaan terbuka tersebut dibagi ke dalam 3 rumpun pemberdayaan, yakni *enabling*, *empowering* dan *protecting*.

*Enabling* dalam survei ini didefinisikan sebagai suatu kondisi dalam menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi terus berkembang melalui dorongan, motivasi, dan kesadaran akan berbagai potensi yang dimiliki individu atau masyarakat serta upaya-upaya untuk mengembangkannya. Indikator ini diturunkan dalam bentuk pertanyaan terbuka: Potensi apa yang ingin dikembangkan dari organisasi anda?

*Empowering*, ditujukan untuk menggali bagaimana memperkuat potensi OMS melalui langkah-langkah afirmatif melalui penyediaan berbagai masukan (*input*) dan pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat OMS menjadi berdaya. Indikator ini diturunkan dengan pertanyaan: Bagaimana selama ini lembaga/organisasi Anda mengakses sumber daya (pendanaan, peningkatan kapasitas)?

*Protecting*, ditujukan untuk menggali bagaimana kondisi pemihakan kepada yang lemah tanpa mengisolasi atau menutup interaksi. Indikator ini diturunkan dengan pertanyaan: Seberapa sering lembaga anda diikutsertakan dalam program-program yang dilakukan oleh pemerintah/swasta/donor?

Selain ketiga pertanyaan tersebut, untuk menggali jenis kebutuhan pemberdayaan seperti apa yang diharapkan oleh OMS digali dengan pertanyaan: Jika Organisasi/Lembaga Anda ditawarkan satu program pemberdayaan, program seperti apa yang paling dibutuhkan oleh lembaga Anda?

Berikut gambaran peta model pemberdayaan yang digali dari jawaban OMS dalam survei verifikasi.

#### 4.5.1 Pemberdayaan Rumpun *Enabling*

Seperti telah dijelaskan *enabling* dalam penelitian ini merupakan suatu kondisi dalam menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi OMS terus berkembang melalui dorongan, motivasi, dan kesadaran akan berbagai potensi yang dimiliki individu (SDM) maupun kelembagaan serta upaya-upaya untuk mengembangkannya.

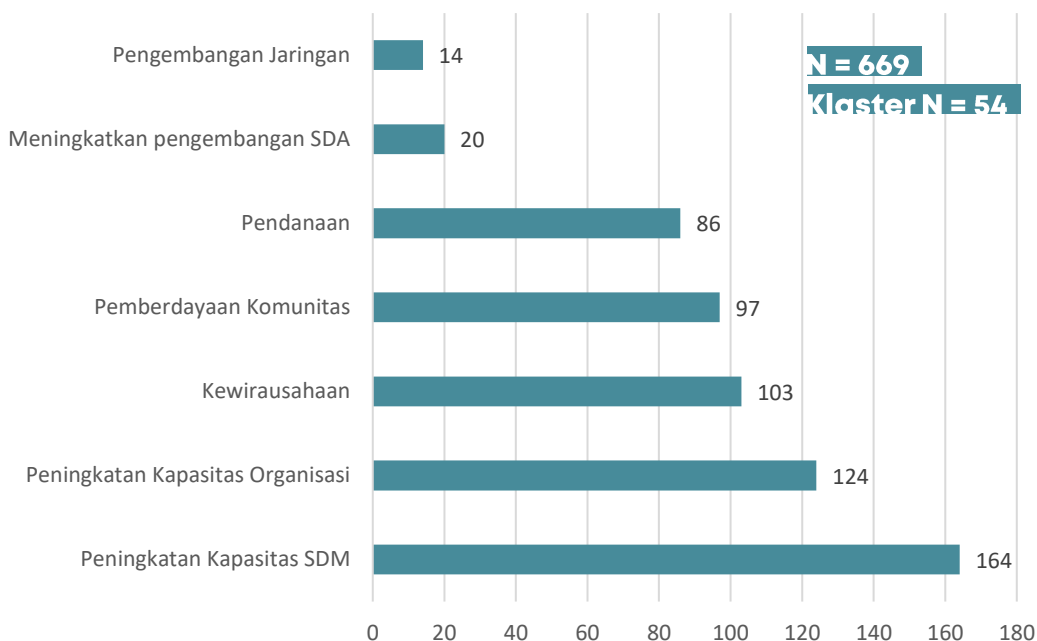
Dari pertanyaan terbuka yang diajukan, terkumpul beragam jawaban OMS terkait potensi yang ingin dikembangkan, baik secara personal maupun kelembagaan.

Dari hasil pengelompokan, terdapat poin-poin jawaban yang mirip yang kemudian dikelompokkan untuk mendapatkan peta jumlah potensi yang diharapkan oleh OMS. Berikut beberapa pengelompokan jawaban dan penjelasannya:

- **Peningkatan Kapasitas Organisasi** (terkait manajemen organisasi, tata kelola organisasi/hal hal yang terkait dengan kelembagaannya, termasuk penguatan kapasitas dalam penyusunan beragam SOP terapan, MEL)
- **Peningkatan kapasitas SDM** (terkait penguatan kapasitas staf yang ada di organisasi)
- **Pendanaan (*fund rising*)** ini berarti pendanaan yang melibatkan pihak luar, misalnya: kerjasama dengan donor/pemerintah, *crowdfunding*, dll)
- **Kewirausahaan** (ini terkait pada keinginan dan upaya OMS untuk mandiri dari sisi dana namun dihasilkan oleh OMS itu sendiri, misalnya harapan membuat klinik, buat jasa konsultasi, dll)
- **Pemberdayaan komunitas** (membantu masyarakat kurang mampu, membantu peningkatan kapasitas komunitas, mendampingi dan mengawasi komunitas)
- **Meningkatkan pengembangan SDA** (diversifikasi pertanian, pemanfaatan lahan, pengembangan bibit, pengembangan pemanfaatan lahan, peningkatan pemahaman soal lahan)
- **Peningkatan SDM untuk SDA** terkait dengan peningkatan potensi
- **Pengembangan jaringan**

Selain potensi-potensi yang dijelaskan di atas, terdapat jawaban-jawaban OMS yang unik dan tidak masuk dalam dalam daftar pengelompokan. Untuk itu jawaban unik ini akan ditulis secara mandiri.

### 7 Potensi Tertinggi yang Ingin Dikembangkan OMS (Pemberdayaan-Enabling)



Gambar 3.37 Grafik 7 Potensi Tertinggi yang Ingin Dikembangkan oleh OMS (Pemberdayaan-Enabling)

Ketika seluruh OMS yang berpartisipasi ditanya soal potensi yang ingin dikembangkan untuk memperkuat pemberdayaan-*enabling*, terekap sebanyak 54 klaster jawaban dengan total jawaban sebanyak 669. Dari 669 jawaban yang potensi yang paling banyak diharapkan adalah soal peningkatan kapasitas SDM sebanyak 164, kemudian peningkatan kapasitas organisasi sebanyak 124 lembaga, Kewirausahaan sebanyak 103 lembaga, pemberdayaan komunitas sebanyak 97 organisasi, dan pendanaan dengan melibatkan pihak luar sebanyak 86 organisasi, Meningkatkan pengembangan SDA sebanyak 20 organisasi dan pengembangan jaringan sebanyak 14 organisasi. Berikut keseluruhan list potensi yang ingin dikembangkan oleh OMS.

Tabel 4.22 List Potensi yang Ingin Dikembangkan oleh OMS (Pemberdayaan-Enabling)

1. Advokasi	25. perempuan dan anak
2. Advokasi dan kampanye	26. Menghasilkan product knowledge
3. Advokasi hukum	27. Parliament Engagement
4. Advokasi kebijakan	28. Pemanfaatan teknologi
5. Advokasi komunitas	29. Pemberdayaan anak yang berhadapan dengan hukum
6. advokasi penganggaran daerah	
7. Analisis hukum	

8. Bantuan hukum	30. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
9. Diversifikasi Pendanaan	31. Pendampingan komunitas adat menuju desa wisata inklusi
10. Fisik kantor	32. Penegakan hukum
11. kampanye dan advokasi isu-isu perempuan	33. Penelitian
12. Kampanye SDA	34. Penelitian dan Data
13. Kemandirian lembaga	35. Pengembangan Kebijakan
14. Kemitraan	36. Pengembangan layanan konseling
15. Kemitraan dengan pemerintah	37. Pengembangan modul
16. Kemitraan dengan swasta	38. Penggunaan Teknologi untuk Perubahan
17. Kerjasama Strategis: Menggandeng lebih banyak pihak, seperti perusahaan teknologi, pemerintah, dan organisasi lain untuk memperluas cakupan dan dampak dari inisiatif Bullyid	39. Peningkatan Platform: Mengoptimalkan aplikasi Bullyid
18. Konsultasi hukum	40. Peningkatan SDM untuk SDA
19. Legalistas lembaga	41. penyediaan spasial data untuk kerja kerja pendampingan masyarakat
20. literasi digital	42. Perumusan legacy
21. Manajemen organisasi	43. Program Asisten Kemandirian (AK)
22. Mengangkat kearifan lokal	44. Sosial kemasyarakatan
23. mengembangkan Call Center Akses Sehat	45. Swakelola tipe III
24. Mengembangkan kebijakan anggaran kesehatan pro rakyat yg sensitip	46. Tink tenk advokasi
	47. Training

Seperti terlihat dalam table di atas, terdapat 47 daftar potensi lainnya yang ingin dikembangkan oleh OMS dalam konteks pemberdayaan rumpun *enabling*. Dari 47 daftar tersebut terdapat lembaga yang menginginkan pengurusan legalitas lembaga.

#### 4.5.2 Pemberdayaan Rumpun *Empowering*

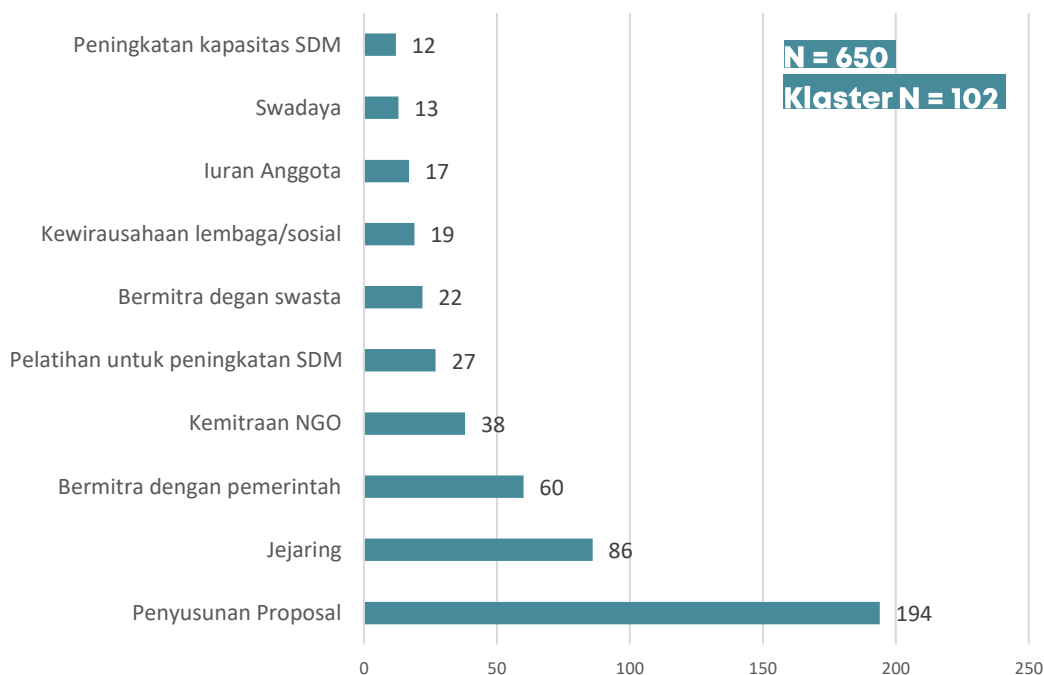
*Empowering*, ditujukan untuk menggali bagaimana memperkuat potensi OMS melalui langkah-langkah afirmatif melalui penyediaan berbagai masukan (*input*) dan pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat OMS menjadi berdaya. Indikator ini diturunkan dengan pertanyaan: Bagaimana selama ini lembaga/organisasi Anda mengakses sumber daya (pendanaan, peningkatan kapasitas)?

Dari data yang ditemukan dapat dikelompokkan pada kluster besar, seperti:

- Penyusunan proposal berarti model akses sumberdaya (pendanaan) melalui jalur Kerjasama dengan donor internasional
- Kemitraan dengan pemerintah berarti model akses sumber daya (pendanaan) melalui jalur Kerjasama dengan pemerintah
- Kemitraan dengan swasta berarti model akses sumber daya (pendanaan) melalui jalur Kerjasama dengan swasta
- Jejaring/pengembangan jaringan berarti cara memperoleh sumber daya melalui jejaring, baik nasional, regional maupun lokal. OMS bermitra dengan OMS/NGO nasional.
- Tender artinya OMS memperoleh sumber daya melalui tender dengan perusahaan maupun pemerintah.
- Pelatihan adalah model penguatan sumber daya melalui berbagai pelatihan/workshop.
- Kewirausahaan lembaga/sosial adalah model penguatan sumber daya OMS melalui pengembangan usaha mandiri.
- Selain gambaran besar kluster di atas, terdapat beragam model penguatan sumber daya yang dilakukan oleh OMS, seperti: pendanaan lokal, iuran anggota/pengurus, pemanfaatan sumberdaya lokal, kemitraan dengan pemerintah desa.

Dari pengelompokan tersebut ditemukan gambaran 10 besar smodel penguatan potensi OMS dalam konteks Pemberdayaan rumpun *empowering*, yakni:

### 10 Model Penguatan Potensi OMS Tertinggi; Pemberdayaan-Empowering



Gambar 4.38 Grafik 10 Model Penguatan Potensi OMS (Pemberdayaan-Empowering)

Dari data di atas ditemukan bahwa OMS masih banyak tergantung pada pendanaan donor internasional sebanyak 194 OMS masih memikirkan soal penyusunan proposal untuk didanai oleh lembaga donor (internasional). Model penguatan sumber daya terbesar lainnya yang menjadi kebutuhan OMS adalah, jejaring sebanyak 86 OMS, pengembangan sumber daya dengan bermitra dengan pemerintah sebanyak 60 OMS, kemitraan dengan NGO sebanyak 38 OMS, pelatihan untuk peningkatan SDM sebanyak 27 OMS, bermitra dengan swasta sebanyak 22 OMS, Kewirausahaan lembaga/sosial sebanyak 19 OMS, melalui iuran anggota sebanyak 17 OMS, swadaya sebanyak 13 OMS dan melakukan peningkatan kapasitas SDM sebanyak 12 OMS.

Selain penguatan dari sisi pendanaan, potensi yang sering dijadikan rujukan untuk memperkuat organisasi adalah model jejaring OMS. Jejaring OMS ini digunakan tidak hanya untuk memperkuat kapasitas organisasi/SDM tetapi juga akses informasi terkait dengan pendanaan. Berikut 92 daftar penguatan potensi yang dituliskan oleh OMS yang berpartisipasi dalam survei.

Tabel 4.23 Penguatan Potensi OMS (Pemberdayaan-Empowering) lainnya

1. Advokasi litigasi dan non litigasi	47. Mengirim staf untuk training
2. Akses pendanaan terbatas	48. Menjadi anggota UN
3. Bantuan konsumen lepasan	49. Menjadi narasumber

4. Bekerjasama	50. Menjaga kredibilitas
5. Bergantung pendanaan Global Fund	51. Menyiapkan kelengkapan pendanaan
6. bermitra dengan donor	52. Menyusun proposal
7. Bermitra dengan pemerintah meski pendanaan belum terrealisasi	53. Musrenbang
8. Bimtek	54. Partnership
9. Crowdfunding	55. Pelatihan
10. CSR ZIS	56. Pelatihan dari lembaga lain
11. Dana desa	57. Pelatihan mandiri
12. Dana pribadi	58. Pelatihan untuk lembaga lain
13. diverensiasi pendanaan	59. Pelatihan untuk Peningkatan kapasitas organisasi
14. Donatur	60. pemanfaatan sumber daya lokal
15. Donor	61. Penawaran <i>tools</i>
16. Dukungan PKBI	62. Pencarian link sumber dana
17. Fund raising	63. Pendanaan dari donor lokal
18. Ikut lelang proyek	64. pendanaan lainnya
19. Ikut pelatihan	65. Pendataan Poktan
20. Implementasi hasil pelatihan untuk lembaga	66. Pendekatan kepengurus dan anggota
21. informasi media/digital	67. Pendidikan
22. Inisiatif pimpinan lembaga dan pengurus	68. Penggalangan dana publik
23. Inisiatif riset dan advokasi	69. Penggalangan donor
24. Iuran anggota dan pendiri	70. Pengkaderan
25. Kampanye dan pendidikan untuk masyarakat	71. Peningkatan kapasitas Organisasi
26. Kedutaan besar	72. Peningkatan kapasitas SDM
27. Kemitraan	73. Peningkatan kapasitas SDM oleh SDM yang ada
28. Kemitraan dengan kampus	74. peningkatan SDM dari donor
29. Kemitraan dengan lembaga filantropi	75. Penyebaran keahlian di Universitas-universitas
30. Kerjasama kemitraan	76. Program Bantuan Hukum UU No.16 Tahun 2011
31. Kerjasama MoU	77. Program donor
32. Ketetapan Renstra organisasi	78. Publikasi media
33. Kolaborasi lintas sektor	79. Publikasi media visual
34. Komunikasi dengan Pemerintah	80. Publikasi organisasi
35. Konsorsium STPI-Penabulu	81. Sedang menata Sumberdaya
	82. Seleksi SDM

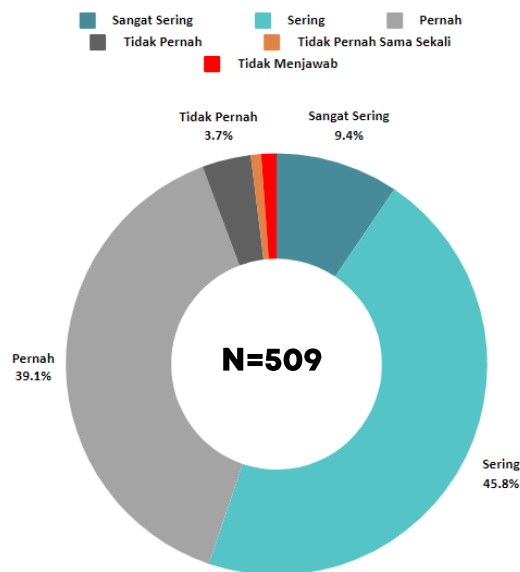
36. Link and match	83. Studi banding
37. Lomba	84. Subsidi silang pendanaan hukum dari orang mampu
38. Magang program	85. Sumbangan anggota
39. Mandiri	86. Sumbangan sukarela
40. masih perlu banyak belajar karena belum optimal	87. Swaeducasi
41. Media dan informasi langsung	88. Tawaran
42. Melakukan pelatihan	89. tenaga ahli
43. Melayani konsultasi	90. Tender
44. memfasilitasi training	91. Training
45. Mendampingi masyarakat	92. WA grup organisasi
46. Mengikuti pelatihan	

#### 4.5.3 Pemberdayaan Rumpun *Protecting*

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemberdayaan dalam arti *protecting* (melindungi) dalam penelitian ini merupakan suatu kondisi pemihakan kepada OMS tanpa mengisolasi atau menutup interaksi. Indikator ini diturunkan dengan pertanyaan tertutup model skala likert. Berikut pertanyaan yang diajukan kepada OMS: Seberapa sering lembaga anda diikutsertakan dalam program-program yang dilakukan oleh pemerintah/swasta/donor?

Berikut sebaran jawaban OMS terkait dengan indikator mengenai pemberdayaan rumpun *protecting*.

### Keikutsertaan OMS dalam Program-program Pemerintah/Swasta/Donor; Pemberdayaan-Protecting



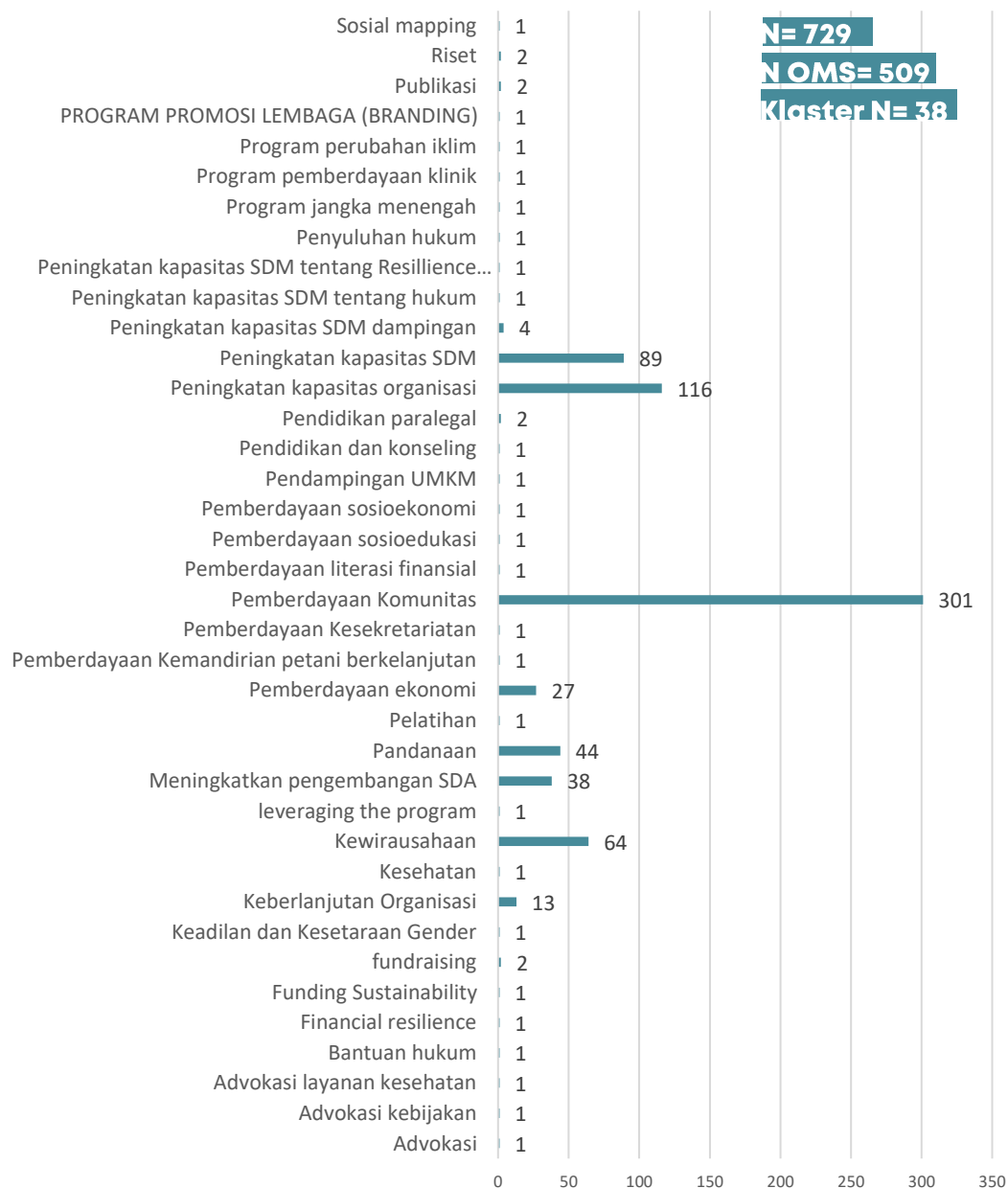
*Gambar 3.39 Grafik Keikutsertaan OMS dalam Program-program  
Pemerintah/Swasta/Donor; Pemberdayaan-Protecting*

Dari grafik di atas bisa dijelaskan bahwa, dari 509 OMS yang berpartisipasi, yang menyatakan sering ikut serta dalam program-program pemerintah/swasta/donor sebanyak 233 OMS atau sebesar 46%, yang menyatakan pernah sebanyak 199 OMS atau sebanyak 40%, yang menyatakan sangat sering sebanyak 48 OMS atau 9 persen, yang menyatakan tidak pernah sebanyak 19 OMS atau 4 persen dan sebanyak 4 OMS atau 1 persen menyatakan tidak pernah sama sekali serta 6 OMS tidak menjawab pertanyaan soal keikutsertaan OMS dalam program-program pemerintah/swasta/donor.

#### **4.6. Model Pemberdayaan**

Selain menanyakan soal tiga rumpun terkait pemberdayaan (*enabling, empowering* dan *protecting*), dalam survei ini ditanyakan satu pertanyaan terbuka mengenai model pemberdayaan seperti apa yang diharapkan oleh OMS. Dari pertanyaan terbuka ini ditemukan data sebagai berikut:

## Model Pemberdayaan yang Diharapkan oleh OMS



Gambar 4.40 Grafik Kumulatif Model Pemberdayaan yang Diharapkan oleh OMS

Dari data grafik di atas dapat dijabarkan bahwa dari 509 OMS yang berpartisipasi dalam survei ditemukan 729 model pemberdayaan yang ingin didapatkan oleh OMS. Dari 729 tersebut, jika diklaster ditemukan sebanyak 38 klaster. Dari 729 model pemberdayaan yang ditulis oleh OMS, sebanyak 301 OMS diantaranya mengusulkan model pemberdayaan komunitas (pemberdayaan masyarakat, perempuan, anak, korban diskriminasi, dll), selain itu usulan model pemberdayaan yang cukup banyak lainnya adalah peningkatan kapasitas organisasi sebanyak 116 OMS, Peningkatan

kapasitas SDM sebanyak 89 OMS, sebanyak 64 OMS mengusulkan Kewirausahaan (penguatan pendanaan yang dilakukan oleh organisasi), sebanyak 44 OMS mengusulkan pemberdayaan terkait dengan pendanaan (pola pendanaan yang ditujukan pada pemerintah/swasta/donor/masyarakat di luar organisasi).

## BAB 5

# ANALISIS TEMUAN

### 5.1 Analisis Isu Utama Organisasi Berdasarkan Cakupan Area Kerja

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan beberapa temuan inti penelitian, salah satunya mengenai isu utama organisasi yang paling banyak digeluti oleh OMS. Berikut akan dijabarkan sebaran isu utama berdasarkan provinsi asal OMS.

*Tabel 5.1 Sebaran isu utama organisasi berdasarkan provinsi*

Provinsi	IU 1	IU 2	IU 3	IU 4	IU 5	IU 6	IU 7	IU 8	IU 9	IU 10	IU 11	IU 12	IU 13	(blank)	Total
Bali			2			3		1			1	1		1	9
Bangka Belitung			1					3			1	1			6
Banten			2			3	2	4	2		1	1		1	16
Bengkulu							1	2				2			5
DI Yogyakarta			2	1		2		8	1		1			1	16
DKI Jakarta	1	1	6	2	1	10	1	11	7		3	4		3	50
Gorontalo							1	1				1			3
Jambi							1	6			1	2			10
Jawa Barat			6	4		15	3	15			5	2		1	51
Jawa Tengah			5	1		6	1	12	1		1	3		4	34
Jawa Timur			4	1		1		17	2		3	2		3	33
Kalimantan Barat			1			2	2	7	1	1	1	5			20
Kalimantan Selatan				1				1							2
Kalimantan Tengah								3	1						4
Kalimantan Timur			2				1	3				4			10
Kalimantan Utara							1	2	1			2			6
Kepulauan Riau			2												2
Lampung							2	4			1	2		1	10
Maluku			1			1	1	4				2			9

Provinsi	IU 1	IU 2	IU 3	IU 4	IU 5	IU 6	IU 7	IU 8	IU 9	IU 10	IU 11	IU 12	IU 13	(blank)	Total
Maluku Utara			1					1							2
NAD	1		4			1	3	5				2		1	17
NTB	1		2				1	10	1		1	1	1	1	19
NTT	1		2	1		3		9	3		4	2			25
Papua			2			3		3						3	11
Papua Barat						2		2				2			6
Papua Barat Daya						2		1							3
Riau			1			1								1	3
Sulawesi Barat			1					1							2
Sulawesi Selatan			3			6	4	18	1			2		2	36
Sulawesi Tengah	1	1	2					3				2		2	11
Sulawesi Tenggara			3					8			3				14
Sulawesi Utara			1			1		2				1			5
Sumatera Barat	1		2			1		3	2						9
Sumatera Selatan			1			2	1	4				3		1	12
Sumatera Utara		1	4	1		4	2	16	1		3	6			38
<b>Grand Total</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>63</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>69</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>55</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>9</b>

### ***Keterangan***

- IU 1 : Bantuan Hukum
- IU 2 : Buruh dan tenaga Kerja
- IU 3 : HAM
- IU 4 : Keberagaman toleransi
- IU 5 : Kebijakan sosial
- IU 6 : Kesehatan
- IU 7 : Pelayanan publik
- IU 8 : Pemberdayaan
- IU 9 : Pencapaian Tujuan pembangunan berkelanjutan
- IU 10 : Pendampingan Korban Perdagangan orang
- IU 11 : Perlindungan dan perluasan bagi kelompok terpinggirkan dan rentan
- IU 12 : Lingkungan

IU 13 : Transparansi dan Akuntabilitas  
Blank : (tidak mengisi isu utama)

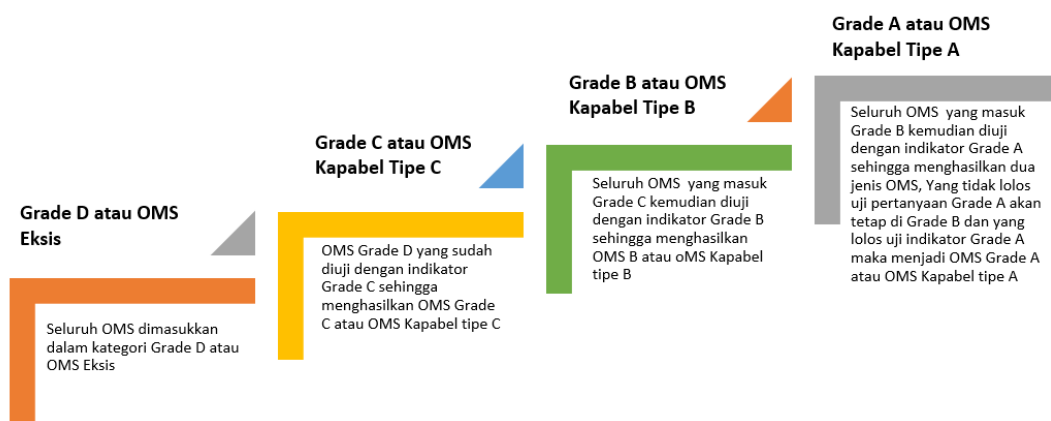
## 5.2 Grading Organisasi

Seperti telah sebelumnya, proses verifikasi ini akan dibuat skoring atau kategorisasi OMS berdasarkan dimensi dan indikator yang telah dijelaskan sebelumnya. Secara umum, kategorisasi atau *grading* yang dilakukan dalam proses verifikasi ini mengacu pada aspek eksistensi dan kapabel Indikator eksis untuk menggambarkan lembaga-lembaga yang masuk dalam kategori grade D sedangkan lembaga-lembaga yang kapabel akan terverifikasi sesuai dengan jawaban OMS yang akan terklaster menjadi 3 grade (A, B dan C).

Indikator eksistensi untuk menggambarkan kondisi OMS yang berada di grade D, sedangkan OMS dengan grade A, B dan C menggunakan indikator akuntabilitas yang dibuat bertingkat (semakin kompleks akuntabilitas suatu OMS menunjukkan OMS tersebut berada dalam grade A).

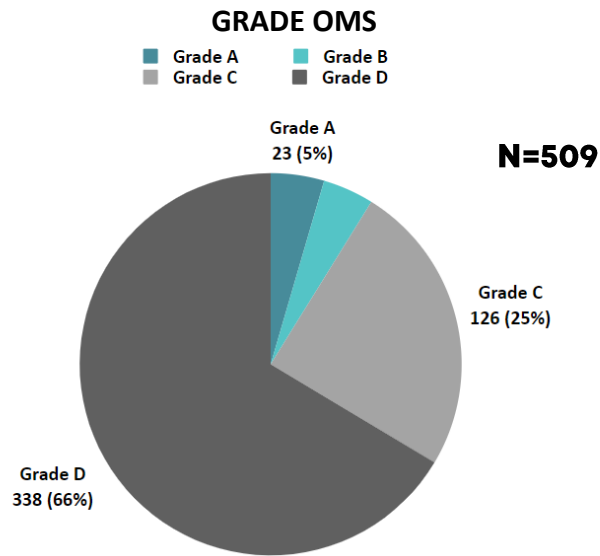
## 5.3 Grading Survei Verifikasi Konsil LSM-INFID

Semua proses dan penempatan mengenai gambaran komposisi OMS yang menjawab indikator setiap grade telah dibahas dalam temuan. Berikut adalah akan dijelaskan soal proses implementasi grading yang dilakukan secara bertingkat kepada seluruh OMS sehingga menghasilkan 4 kategori OMS (Grade D atau OMS eksis; Grade C atau OMS Kapabel tipe C; Grade B atau OMS Kapabel tipe B; dan Grade A atau OMS Kapabel tipe A). Berikut grafik simulasi grade yang dilakukan:



Gambar 5.1 Grafik Simulasi Grading

Dari proses tersebut dihasilkan *grade* OMS seperti terlihat dari grafik berikut ini:



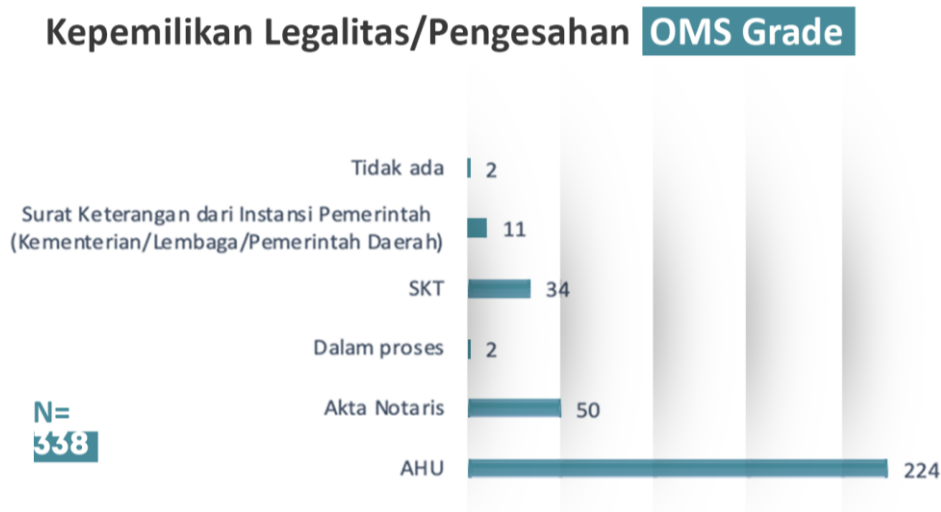
Gambar 5.2 Grade OMS

Dari 509 OMS yang berpartisipasi ditemukan komposisi *grade* OMS sebagai berikut:

1. Grade A atau OMS Kapabel tipe A sebanyak 23 OMS (5%)
2. Grade B atau OMS Kapabel tipe B sebanyak 22 OMS (4%)
3. Grade C atau OMS Kapabel tipe C sebanyak 126 OMS (25%)
4. Grade D atau OMS Eksis sebanyak 338 OMS (66%)

Data tersebut didapatkan dari jawaban responden (OMS) atas pertanyaan bertingkat dari setiap *grade*. Namun demikian klasifikasi *grade* D bisa di-*breakdown* lebih dalam, misalnya dengan mengacu pada jenis legalitas/pengesahan OMS.

Berikut jumlah OMS berdasarkan kepemilikan jenis legalitas/pengesahan dari *grade* D



Gambar 5.3 Grafik Kepemilikan Legalitas/Pengesahan OMS Grade

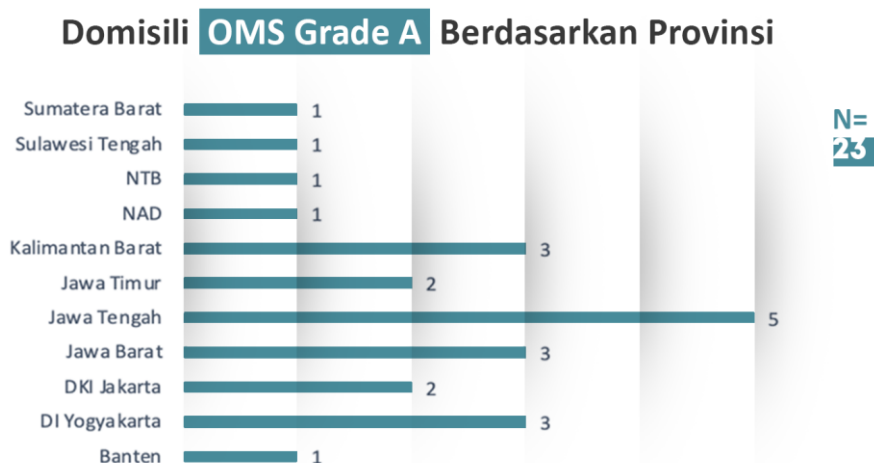
Berikut komposisi legalitas dari kelompok *grade D*:

1. Tidak mengisi/blank 15 OMS
2. Tidak memiliki sama sekali legalitas/pengesahan 2 OMS
3. Memiliki Akta Notaris 50 OMS
4. Memiliki pengesahan/surat dari instansi pemerintah 11 OMS
5. Memiliki SKT 34 OMS
6. Memiliki AHU 224 OMS

Meskipun komposisi OMS yang memiliki legalitas AHU terbilang sangat banyak, yakni mencapai 224 lembaga, namun lembaga tersebut masuk dalam *grade D* karena ada pertanyaan-pertanyaan kunci untuk *Grade D* yang dijawab “Tidak memiliki” oleh OMS termaksud.

### 5.3.1 Grade A atau OMS Kapabel tipe A

Seperti telah dijelaskan dari grafik proses *grading* sebelumnya, *Grade A* diperoleh dengan mengecek kelengkapan informasi seluruh indikator *Grade A*. Dari 509 OMS yang berpartisipasi, hanya 23 OMS yang menyatakan/menjawab “Ya memiliki” seluruh indikator pertanyaan survei Konsil LSM-INFID. Berikut komposisi OMS *Grade A* berdasarkan provinsi:



Gambar 5.4 Grafik Domisili OMS Grade A Berdasarkan Provinsi

Berdasarkan provinsi, OMS dengan kategori *grade A* tersebar di 11 provinsi. Jumlah OMS *grade A* terbanyak berada di Provinsi Jawa Tengah, yakni mencapai 5 OMS, Kalimantan Barat, Jawa Barat dan DI Yogyakarta masing-masing 3 OMS.

Standar yang digunakan untuk menentukan OMS grade A adalah dengan menarik seluruh jawaban “Iya dan Iya Memiliki” dari pertanyaan yang diajukan kepada OMS. Berikut daftar nama OMS yang masuk dalam grade A:

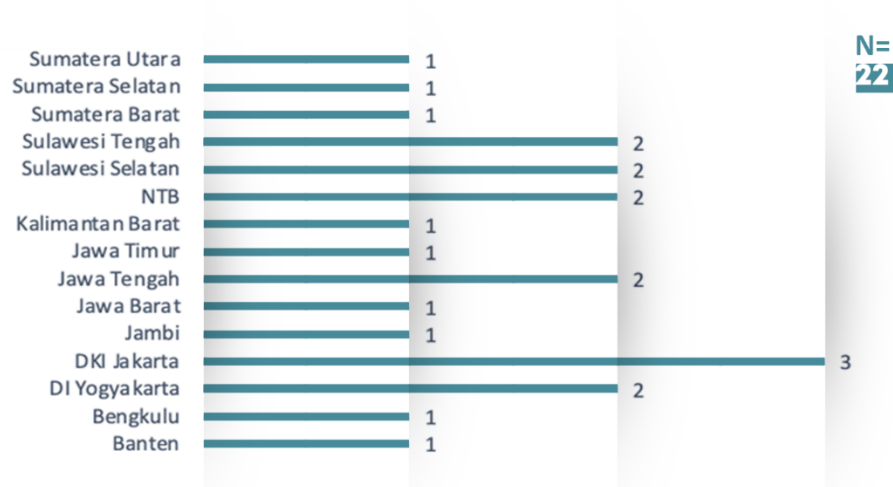
*Tabel 5.2 List OMS Grade A*

No	Nama Organisasi/Lembaga
1	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Jawa Barat
2	Yayasan Kusuma Buana
3	YAYASAN ACEH GREEN CONSERVATION -AGC
4	Yayasan Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan – LPTP
5	PKBI Daerah Jawa Timur
6	Yayasan Redline Indonesia
7	KAPAL Perempuan
8	Yayasan SAPA
9	Mangrove Institut
10	Institut Mosintuwu
11	Yayasan SATUNAMA Yogyakarta
12	PKBI SUMATERA BARAT
13	PATTIRO Banten
14	Perkumpulan IDEA
15	Yayasan Annisa Swasti (YASANTI)
16	PPSW Pasoendan Digdaya
17	PKBI Kota Semarang
18	Lombok Research Center
19	Yayasan Geratak Kabupaten Sambas
20	Gita Pertiwi
21	Perkumpulan Bentang Kalimantan Tangguh
22	Lembaga Pengembangan Masyarakat Swandiri (GEMAWAN)
23	Yayasan LPTP

### 5.3.2 Grade B atau OMS Kapabel tipe B

Proses penentuan Grade B dilakukan melalui tahapan grading dari D-B. Hal ini dilakukan dengan mengecek kelengkapan informasi seluruh indikator Grade B. Dari 509 OMS yang berpartisipasi, hanya 22 OMS yang menyatakan/menjawab “Ya memiliki” seluruh indikator pertanyaan survei Konsil-Infid. Berikut komposisi OMS Grade B berdasarkan provinsi:

## Domisili OMS Grade B Berdasarkan Provinsi



Gambar 5.4 Grafik Domisili Grade B Berdasarkan Provinsi

Berdasarkan provinsi, OMS dengan kategori grade B tersebar di 15 provinsi. Jumlah OMS grade B terbanyak berada di Provinsi DKI Jakarta, yakni mencapai 3 OMS, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, NTB, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta masing-masing 2 OMS.

Standar yang digunakan untuk menentukan OMS grade B adalah dengan menarik seluruh jawaban “Iya dan Iya Memiliki” dari pertanyaan grade B yang diajukan kepada OMS. Berikut daftar nama OMS yang masuk dalam grade B:

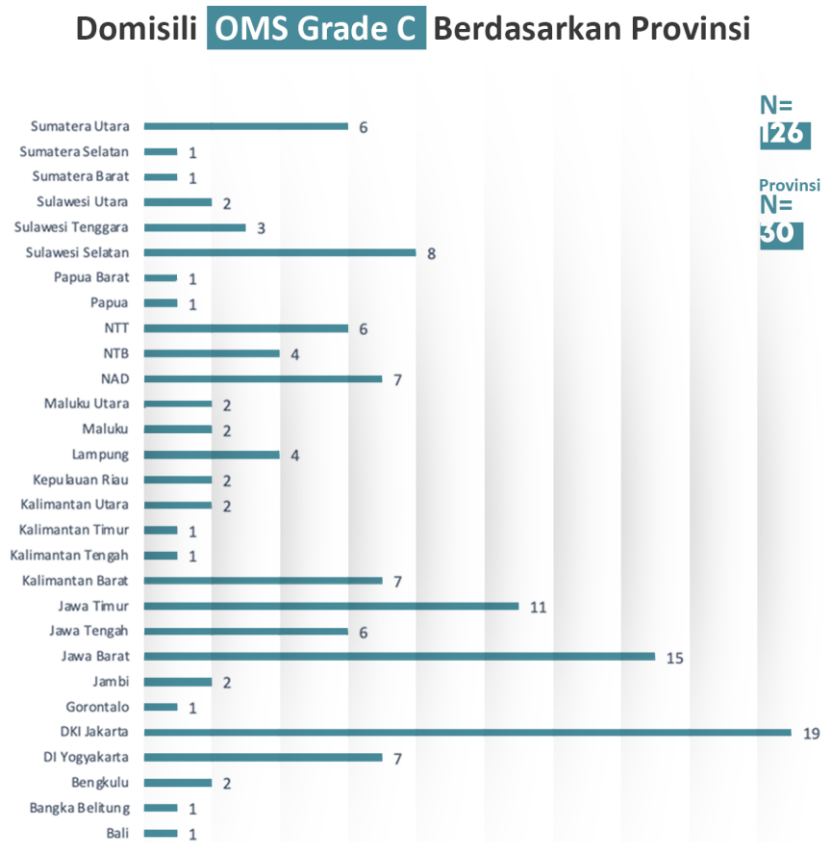
Tabel 5.3 List OMS Grade B

No	Nama Organisasi/Lembaga
1	Perkumpulan Rumah Cemara
2	Akar Global Inisiatif
3	Yayasan Vesta Indonesia
4	YASMIB (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi
5	Relawan untuk orang dan alam
6	Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK)
7	Lembaga Bantuan Hukum Progresif Tolitoli (LBHP)
8	Lembaga Pengkajian Dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M)
9	Mitra Aksi
10	Yayasan Alam Sehat Lestari (ASRI)
11	Yayasan Bumi Sawerigading (YBS)
12	SPEK-HAM
13	Yayasan SHEEP Indonesia

14	Hutan Kita Institute
15	Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) NTB
16	Banten Peduli Umat
17	Skala Indonesia
18	Perkumpulan PRAKARSA
19	Perkumpulan Gema Alam NTB
20	Sanggar Hijau Indonesia
21	PKBI Daerah Jawa Tengah
22	Yayasan BITRA Indonesia

### 5.3.3 Grade C atau OMS Kapabel tipe C

Proses penentuan Grade C dilakukan melalui tahapan grading dari D-C. Hal ini dilakukan dengan mengecek kelengkapan informasi seluruh indikator Grade C. Dari 509 OMS yang berpartisipasi, hanya 126 OMS yang menyatakan/menjawab “Ya memiliki” seluruh indikator pertanyaan survei Konsil-Infid. Berikut komposisi OMS Grade C berdasarkan provinsi:



Gambar 5.6 Grafik Domisili OMS Grade C Berdasarkan Provinsi

Berdasarkan provinsi, OMS dengan kategori grade C tersebar di 30 provinsi. Jumlah OMS grade C terbanyak berada di Provinsi DKI Jakarta, yakni mencapai 19 OMS, Jawa Barat sebanyak 15 OMS dan Jawa Timur sebanyak 11 OMS.

Standar yang digunakan untuk menentukan OMS grade C adalah dengan menarik seluruh jawaban “Iya dan Iya Memiliki” dari pertanyaan grade C yang diajukan kepada OMS. Berikut daftar nama OMS yang masuk dalam grade C.

*Tabel 5.4 List OMS Grade C*

No	Nama Organisasi/Lembaga
1	Kota Kita Foundation
2	KAKI (Komunitas Aksi Kemanusiaan Indonesia)
3	PKBI Cabang Cirebon
4	Jaringan Indonesia Positif
5	Yayasan Graha Prima Karya Sejahtera (Grapiks) Bekasi
6	Lembaga Kajian untuk Transformasi Sosial
7	Yayasan Lembaga Penelitian dan Advokasi Publik Depok (PIRAC)
8	Yayasan Srikandi Perintis Mandiri
9	PPSW Pasoendan Digdaya
10	Yayasan Orbit Surabaya
11	Yayasan Pemberdayaan Komunitas ELSA
12	Yayasan Sehat Peduli Kasih
13	Yayasan Pelayanan Anak dan Keluarga (LAYAK)
14	LENSA SUKABUMI
15	Yayasan Spitit Paramacitta
16	PKBI Garut
17	SuaR Indonesia
18	Yayasan Adhirajasa Kusuma Bakti (Adhikti Foundation)
19	YAYASAN LEMBAGA KAJIAN STRATEGIS BOGOR (LEKAS)
20	Yayasan Kawal Borneo
21	Jala samudera mandiri (JSM)
22	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Anak Indonesia (LBH SADO)
23	Yayasan Transformasi Energy Asia (Traction Energy Asia)
24	Gaya Warna Lentera Indonesia GWL-INA
25	Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (JAPESDA)
26	Mitra Wacana
27	Koalisi NGO HAM
28	Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
29	GeRAK Aceh

30	Yayasan LKIS
31	YAYASAN LINTAS NUSA
32	PKBI Kalbar
33	PKBI Daerah Bengkulu
34	AGPAII
35	Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa)
36	LEMBAGA BANTUAN HUKUM HAMI SULTRA
37	Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Nusa Tenggara Timur (LBH APIK NTT)
38	Kanopi Hijau Indonesia
39	PKBI Sulawesi Selatan
40	Yayasan Penabulu Yogyakarta
41	Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron
42	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kalimantan Tengah
43	LBH Tulang Bawang barat
44	PKBI Aceh
45	Yayasan Pelangi Maluku
46	Yayasan Swadaya Dian Khatulistiwa
47	Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Jawa Timur
48	Yayasan Kebangsaan Kemanusiaan Indonesia (YSKKI)
49	Yayasan IDFoS Indonesia
50	Yayasan Masyarakat Peduli Tuberkulosis (Yamali TB)
51	PD AMAN Kepulauan Aru (AMAN ARU)
52	GRID (Global Geografi Indonesia)
53	Yayasan Eran Sangbure Mayang (YESMa)
54	LP3ES
55	Yayasan CIS Timor-Indonesia
56	LBH cita keadilan Soppeng Sulsel
57	LSM GAPEMASDA
58	PLATO Foundation
59	Yayasan Syarikat Masyarakat Mandiri
60	Yayasan Pelestari Ragamhayati dan Cipta Fondasi Indonesia (PRCF Indonesia)
61	The SMERU Research Institute
62	Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia (YAFSI)
63	Yayasan Kebaya Yogyakarta
64	Yayasan Mahameru

65	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAMPUNG BARAT
66	YAPEKA
67	Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak
68	Yayasan Intan Maharani
69	Yayasan Koordinasi Pengkajian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Yayasan KOPPESDA)
70	Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK)
71	LBH PILAR ADVOKASI RAKYAT SUMUT
72	Lembaga Gerakan Peduli Perempuan
73	Bullyid App - Yayasan NMA
74	Yayasan Pelayanan dan Pengembangan Masyarakat Alfa Omega GMIT
75	BILiC (Bandung Independent Living Center), organisasi disabilitas
76	SAPUAN (Sahabat Perempuan Anak)
77	Yayasan SEKRETARIAT MASYARAKAT ANAK
78	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MITRA KEADILAN SULTRA
79	YLKBH Fiat Yustisia
80	Solidaritas Perempuan Aceh
81	Perkumpulan bantuan hukum adelia Indonesia
82	Yayasan Cendrawasih Bersatu Papua
83	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara
84	The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia
85	PKBI Daerah Sulawesi Utara
86	Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung
87	Yayasan Pelestari Lingkungan Hijau Kalimantan Utara
88	Yayasan Rumah Impian Indonesia
89	Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS)
90	PPSW Aceh
91	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI)
92	IKOHI
93	Perkumpulan HuMa Indonesia
94	PPSW Jakarta
95	LBH Manggarai Raya
96	Yayasan Cahaya Guru
97	Institute for Research and Empowerment (IRE)
98	Yayasan Anak dan Perempuan
99	Transparency International Indonesia
100	Agora Research Center (AGRC)

101	Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat
102	Konsorsium Untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi / KONSEPSI
103	Pelkesi
104	Perkumpulan Teraju Indonesia
105	Bengkel Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung (Bengkel APPEK NTT)
106	Yayasan Terang Anak Indonesia (YATERI)
107	Yayasan Bumi Sawerigading (YBS)
108	Lbh jambi
109	Yayasan Pelita Kasih Abadi Manado
110	Yayasan Sekolah Rakyat Petani PAYOPAYO
111	Komunitas Jagat Pramudita
112	Yayasan Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan
113	ERIK SEPRIA ESA
114	Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kantor Cabang Nias
115	Perkumpulan Solusi Anak Bangsa
116	LKBH SATA Alfaqih
117	Daulat Perempuan Maluku Utara
118	Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat (LPA NTB)
119	Kalyanamitra
120	Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen
121	SAPDA
122	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)
123	Yayasan Keadilan Rakyat
124	Ormas laskar anti korupsi Indonesia kota Baubau
125	Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU)
126	SUPHEL (Solidaritas Masyarakat untuk Penyelamatan Hutan dan Lingkungan Hidup)

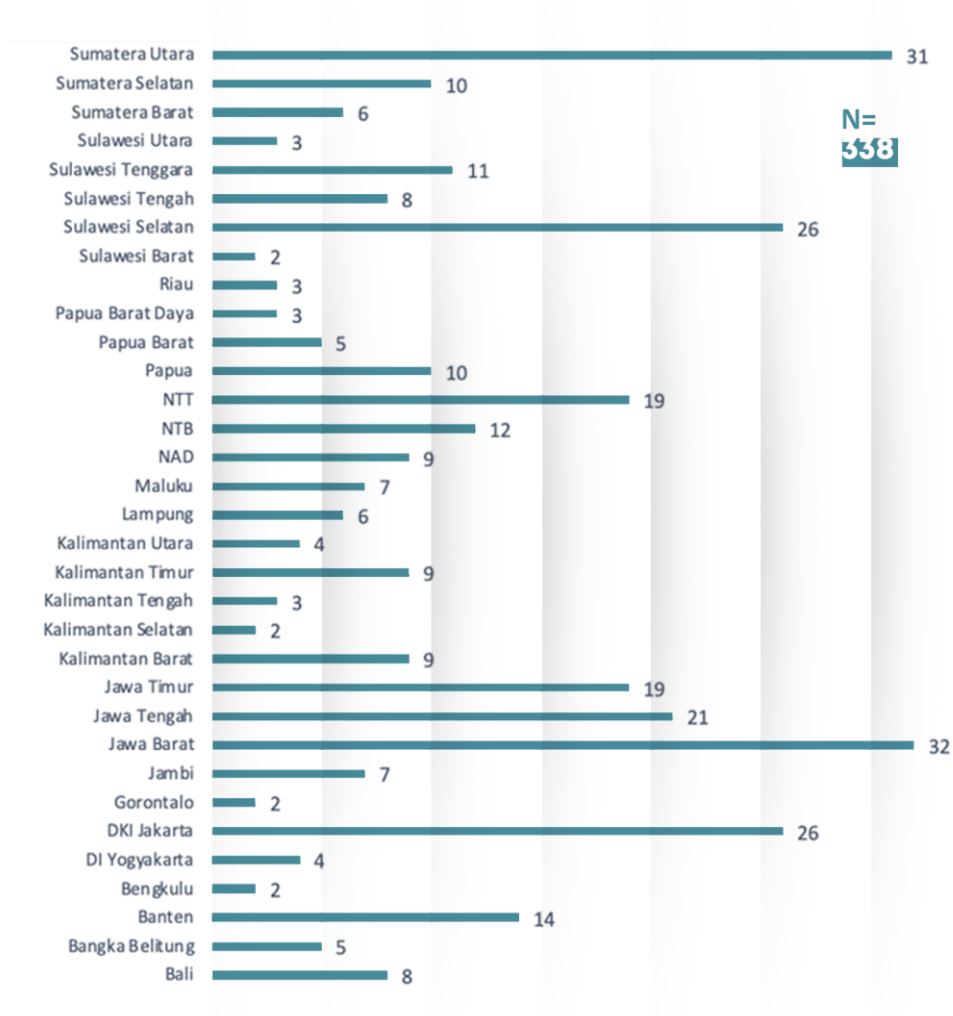
#### 5.3.4 Grade D atau OMS Eksis

Proses penentuan Grade D berbeda dengan penetapan grade-grade yang lain. Grade D disebut juga grade eksis. Semua OMS yang berpartisipasi dalam survei jika tidak memenuhi indikator grade A, B dan C maka secara otomatis akan masuk ke grade D. Secara komposisi Grade D memiliki indikator-indikator kunci, namun demikian indikator tersebut bisa saja tidak terisi seluruhnya dan OMS yang tidak penuh mengisi indikator pertanyaan masih masuk dalam komposisi grade D.

Secara kategoris, Grade D adalah OMS yang tidak memiliki legalitas formal dari Kemenkumham dan atau SKT dari Kemendagri. OMS termaksud bisa hanya memiliki akta Notaris dan tidak memiliki legalitas.

Dari 509 OMS yang berpartisipasi, setelah melalui tahap grading A-C, jumlah OMS yang berada di Grade D sebanyak 338 OMS yang tersebar di 33 provinsi. Berikut sebaran dan jumlah OMS grade D berdasarkan provinsi.

### Domisili OMS Grade D Berdasarkan Provinsi



Gambar 5.7 Grafik Domisili OMS Grade D Berdasarkan Provinsi

Berdasarkan provinsi, OMS dengan kategori grade D tersebar di 30 provinsi. Jumlah OMS grade D terbanyak berada di Provinsi DKI Jakarta, yakni mencapai 26 OMS, Jawa Barat sebanyak 32 OMS dan Jawa Timur sebanyak 19 OMS.

Standar yang digunakan untuk menentukan OMS grade D adalah dengan menarik seluruh jawaban “Iya dan Iya Memiliki” dari pertanyaan grade D yang diajukan kepada OMS. Berikut daftar nama OMS yang masuk dalam grade D:

*Tabel 5.5 List OMS Grade D*

No	Nama Organisasi/Lembaga
1	Yayasan Srikandi Sejati
2	Yayasan Gaya Patriot Bekasi
3	Yayasan Bandungwangi
4	FOPKIA Kab Tangerang
5	Yayasan Intermedika Prana
6	Yayasan Peduli Anak Dengan HIV/AIDS (YP ADHA)
7	Yayasan Bina Sejahtera Indonesia (BAHTERA) Bandung
8	Yayasan Gerakan Mandiri Pita Merah (GEMPITA)
9	Yayasan Bina Muda gemilang
10	Yayasan Kasih Globalindo
11	Seknas FITRA
12	Yayasan Mitra Husada Sulawesi Selatan
13	Lembaga Kemanusiaan Yayasan Pontianak Plus
14	Yayasan Karitas Sani Madani (KARISMA)
15	Female Plus
16	LSM Petik
17	YAYASAN CITRA USADHA INDONESIA
18	Yayasan Sadar Hati
19	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara
20	LSM Gempar
21	Indonesia AIDS Coalition
22	Yayasan Kontak Indonesia
23	Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia/ LRC-KJHAM
24	Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari "PLHL"
25	DPD KPPI Prov Kep Babel
26	Lembaga Bantuan Hukum&Klinik Hukum Fakultas Hukum Unpatti Ambon
27	Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara
28	Advokasi Inklusi Disabilitas (AUDISI)
29	Yayasan Pena Peduli Bangsa
30	Yayasan Mercusuar Peradaban Nusantara
31	Yayasan Guriang Tujuh Indonesia

No	Nama Organisasi/Lembaga
32	Yayasan Kesehatan Bali
33	LSM Kunti Bhakti
34	LBH APIK BALI
35	LSM. P2H2P. Prov. Babel
36	Yayasan Bali Sruti Denpasar
37	LKBH STAIN Purwokerto
38	PKBI daerah Nusa Tenggara Timur
39	RUMAH PEREMPUAN KUPANG
40	Yayasan Aletheia
41	YLBH MENANG JAGAD
42	PEMUDA ADAT FLORES BAGIAN TIMUR
43	JIP Bali
44	Fopkia Serang
45	JALA PRT
46	YAYASAN YISA AMBALAWI MBOJO
47	Perkumpulan Lembaga Indeks
48	Sangkan jaya
49	Yayasan Gaya Dewata
50	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BELITUNG
51	Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)
52	Yadikdam Gorontalo
53	beranda perempuan
54	Perkumpulan Desa Lestari
55	Komunitas Peduli Anti Korupsi (KOMPAK)
56	Lestari Mangrove dan Alam (LEVA)
57	DPD LASKAR ANTI KORUKSI INDONESIA PROVINSI JAMBI
58	Yayasan Kalandara
59	Federasi Serikat Pekka Indonesia
60	YASINDO (Yayasan Sinar Desa Indonesia)
61	lembaga studi dan bantuan hukum
62	Pergerakan Relawan Kemanusiaan dan Lingkungan Indonesia (PRKI)
63	Yayasan Satu Keadilan
64	DPD PPD I Kaltim
65	Perkumpulan Divisi Perempuan TRUK
66	Pondok PERGERAKAN
67	LSM LENTERA KARTINI
68	LBH BINTANG KEADILAN

No	Nama Organisasi/Lembaga
69	youth skills foundation
70	Yay. Rumpun Perempuan SULtra (RPS)
71	MNUKWAR PAPUA
72	Jaringan Pemantau Independen Kehutanan
73	Yayasan Siklus Sehat Indonesia (Siklus Indonesia)
74	Perkumpulan FAKTA
75	OPSI
76	Yayasan Perludem
77	Perkumpulan Lembaga Pengembangan Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia Sukawesi Tengah (LPSHAM) SULTENG
78	Jaringan LSM Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK)
79	LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA MASYARAKAT MADANI LABUHAN BATU SELATAN
80	YBH Kompak Indonesia
81	Koalisi Perempuan Indonesia Kota Tarakan
82	Pusat Kajian dan Advokasi Kasuari Papua
83	Rumah Inspirasi Kalimantan Timur
84	Forum LSM Aceh
85	LSM. GEMPUR POSO
86	Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan
87	Perkumpulan PADI Indonesia
88	Lembaga Bantuan Hukum Papua Justice & Peace
89	Lembaga Keprihatinan Manusia dan Lingkungan (Gamal)
90	Perkumpulan Nipah Sumatera Selatan
91	Lembaga Bantuan Hukum Lahat
92	Sentra Program Pemberdayaan dan Kemitraan Lingkungan (STABIL)
93	Cahaya Inklusi Indonesia (CAI)
94	LSM Gemuruh (gerakan masyarakat untuk perubahan)
95	GERAKAN CINTA DESA
96	In-Docs (Yayasan Masyarakat Mandiri Film Indonesia)
97	Indonesian Parliamentary Center
98	Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya (P3SD)
99	Next Generation Indonesia
100	KOMPIP (Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik (KOMPIP))
101	Paguyuban Peduli Kebijakan Napza
102	Sumatra Rainforest Institute/ Lembaga Hutan Hujan Sumatera

No	Nama Organisasi/Lembaga
103	Perkumpulan Bentang Nusantara Papua
104	PBHI Sumbar
105	P4S Mustika Edukasi
106	PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)
107	Yayasan Medan Plus
108	Jaringan Perempuan Pesisir Sulawesi Tenggara
109	Perkumpulan Kediri Bersama Rakyat (KIBAR)
110	LAKI (Laskar Anti Korupsi Indonesia)
111	Sahabat Lingkungan (SaLing)
112	Solidaritas Generasi Cerdas (SGC)
113	Yayasan pemberdayaan ekonomi lingkungan rakyat (Yapekat)
114	Bandung Institute of Governance Studies
115	Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta
116	KPS2K (Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan)
117	Turi Education Research and Community (TERC) Foundation
118	Lembaga Pengembangan Perempuan Desa (LP2D)
119	PPRBM Solo
120	Perkumpulan Pengembangan masyarakat dan Konservasi Sumber Daya Alam (PERDU)
121	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Papua (PKBI Papua)
122	Perkumpulan Yaksa Lambung Kemanusiaan Masyarakat Pedesaan
123	Koalisi Perempuan Ronggolawe (KP. Ronggolawe)
124	Pos bantuan hukum advokat (POBAKUMADIN) takengon
125	Hazanah Keberdayaan Holistik (ASKETIK)
126	Yayasan Wali Ati Lenkamas (Yasalti)
127	PPA Sahabat Kota
128	Aliansi Srikandi Peduli Perempuan dan Anak
129	Jaringan Indonesia Positif (JIP) Sulawesi Selatan
130	Lembaga Bina Lingkungan Indonesia (Bingkai) Sulawesi Selatan
131	Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang
132	Gaya Semarang
133	Inisiasi
134	LSM Lingkar Pemuda Gorontalo (LPGO)
135	PATTIRO Gresik
136	Lembaga Penguatan masyarakat sipil
137	Yayasan Jaringan Equals Indonesia
138	Ys Ekowisata Sumatera (yes)

No	Nama Organisasi/Lembaga
139	SAMUDERA
140	Yayasan Victory Plus
141	Spora Research Center
142	Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita Riau
143	PIONER Tanah Papua
144	Yayasan Kesejahteraan Anak Pesisir Indonesia (YKAPI)
145	SP2S Solidaritas Perempuan Pekerja Seks
146	Yayasan Mentari Meraki Asa (YMMA)
147	Opsi
148	JARINGAN GERAK DESA (JAGAD) NTB
149	Lembaga Bantuan Hukum Perisai Untuk Keadilan
150	Sriwijaya Plus
151	Tc2 Foundation
152	Etalase Ekosistem Indonesia
153	Ppo daun hijau
154	Yayasan Rumpun Bambu Indonesia Aceh
155	OBH YESAYA 56 SAMOSIR
156	Serikat Tani Merdeka (SeTAM)
157	AKSI Baik
158	LBH Rakyat
159	Green Of Borneo
160	Aliansi Sumut Bersatu
161	Yayasan Pelita husada flobamora
162	PIAR – NTT
163	Kantor Bantuan Hukum Riau
164	Lembaga bantuan hukum citra Justitia Sulawesi Barat
165	PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM KALIMANTAN
166	Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (Opsi Sulawesi Utara)
167	Yayasan Petak Danum
168	LBH Surabaya
169	Yayasan Tanah Merdeka
170	Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya
171	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DONGGALA
172	LIPKEM
173	LPKBHI
174	Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta
175	Lembaga Riset dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat (LRPKM)

No	Nama Organisasi/Lembaga
176	Lembaga Catra Lotus Indonesia
177	YAYASAN MASYARAKAT MITRA MANDIRI (YM3)
178	PKBI CABANG SAMBAS
179	Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Indikator
180	LPSM Yasinta
181	Jaringan Kearifan Tradisional Indonesia
182	BASOLIA Foundation
183	PERHIMPUNAN PATTIROS
184	Komunitas Celebes Bergerak
185	Yayasan PATTIRO
186	Lembaga Persaudaraan Korban Napza Makassar (LPKNNM)
187	Yayasan Metamorfosis Menuju Inklusi
188	Pusat Informasi Sampiri
189	BKBH FH USM
190	LSM Humaniora
191	YAYASAN AKSES SEHAT INDONESIA
192	Lamongan Teduh
193	Yayasan Panorama Alam Lestari
194	Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Sakti
195	JAKATARUB
196	PKBI SUKABUMI
197	Lembaga PPAP Seroja (Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pinggiran SEROJA)
198	LBH AL-MA'THUR
199	Yayasan Paramitra Indonesia
200	Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Tengah
201	Lambang
202	KWT Sekar Tani
203	Jkpm
204	Garut governance watch
205	Lembaga Mitra Turatea Kabupaten Jeneponto
206	Kalimantan Huma Hijau institute (KH2 institute)
207	Perkumpulan Masyarakat Sehat Sriwijaya
208	HW MKGR Sumsel
209	POKJA 30
210	GASIRA Maluku
211	YKPM SULSEL

No	Nama Organisasi/Lembaga
212	Sources of Indonesia
213	LEMBAGA BANTUAN HUKUM GARUDA MUDA NUSANTARA
214	CBO ARMADA
215	Yayasan Penabulu Papua
216	WCC Mawar Balqis
217	Yayasan Pengkajian Dan Pemberdayaan Rakyat (YP2R)
218	Yayasan utama Riau
219	LEMBAGA MARITIM NUSANTARA (LEMSA)
220	Gerakan nasional anti narkoba (GRANAT)
221	Lembaga Kajian Keislaman & Kemasyarakatan (LK3)
222	Lembaga Bantuan Hukum Kendari
223	Perkumpulan Evergreen Indonesia
224	Sanggar Kebangsaan
225	Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua.
226	LSM PERKUMPULAN PEMUDA NUSANTARA PAS AMANP2NAPAS
227	Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sulawesi Selatan
228	FORMAGAM (Forum Masyarakat Gresik Pecinta Keberagaman)
229	Absolute Indonesia
230	Yayasan Depati
231	Lentera perempuan WCC
232	Yayasan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Provinsi Jawa Tengah
233	DPD GERKATIN SUMATERA BARAT
234	LEmbaga Bantuan Hukum (LBH Pelangi Mataram)
235	Yayasan Baiturrahman
236	DPC GERKATIN KOTA PADANG
237	Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia
238	Perkumpulan Panca Karsa
239	Lembaga Studi Agama dan Filsafat
240	Yayasan Nur Dewi Lestari
241	Yayasan Inisiatif Kebudayaan Indonesia
242	pusat study strategi dan kebijakan lampung
243	PKBI Daerah Bali
244	Lembaga Perlindungan Anak (LPA)
245	Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI Kaltim)
246	Forum Puspa Kalsel
247	Jejak Pemuda Petualang

No	Nama Organisasi/Lembaga
248	Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi NTB
249	LKS - LPEP LENTERA MBOJO
250	Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanities Universitas Indonesia (AWCPH UI)
251	Perkumpulan DAMAR
252	Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT perwakilan Rote Ndao
253	Yayasan Tapen Bikomi
254	Yayasan Cahaya Perempuan
255	Yayasan Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Keuangan "INDEF" (YLPEK)
256	Yayasan Tuntunan Tuntunan
257	Sulawesi Corruption Watch
258	Perkumpulan Wallacea
259	Yayasan Katahati (Katahati Institute)
260	Yayasan Swara Parangpuan Sulut
261	Jaringan Indonesia Positif Jawa Barat
262	Komppas
263	Yayasan Sobat Peduli
264	Lembaga Partisipasi Pembangunan Masyarakat (LPPM) Maluku
265	Institut studi Dan pengembangan masyarakat (ISPM)
266	Posbakumadin Madina
267	Perkumpulan Indonesia Kompeten
268	RUANG MITRA PEREMPUAN (RUMPUN) INDONESIA
269	Yayasan Sosial Solidaritas Nusantara
270	Aliansi perempuan Lamongan
271	Komunitas Desa (Komnasdesa-Sultra)
272	Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat (YPSM)
273	LBH APIK NTB
274	LBH APIK Aceh
275	Jenewa Madani Indonesia
276	Perkumpulan Fitra NTB
277	Yayasan Kesehatan untuk Semua (YKS)id
278	Yayasan Papua Lestari
279	Yayasan LBH APIK Sumsel
280	Yayasan Sorong Sehati
281	Sintang Freshwater care
282	Perkumpulan Suara Kita

No	Nama Organisasi/Lembaga
283	Kahayya research center
284	LBH Makassar
285	Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan Sulawesi Selatan
286	Yayasan Peduli INAYANA Maluku
287	Sahara Aceh
288	Aliansi Srikandi Peduli Perempuan dan Anak (ASPPA)
289	Yayasan Gaya Celebes (YGC) Makassar
290	Yayasan TRRADIKA
291	LSM Harimau Indonesia Bersayap
292	LBH Bakti Keadilan Nusantara
293	Conservation community and empowerment
294	Inti Muda Jawa Barat
295	Yayasan Biruku Indonesia
296	Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara
297	KDS SARIBATTANGKU
298	Bale Urang Sarerea
299	WCC Palembang
300	Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Jember
301	Perkumpulan Sumut Watch
302	Yayasan Galatea
303	Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK)
304	Perkumpulan Menapak Indonesia
305	WCC Nurani Perempuan
306	Yayasan lembaga bantuan hukum cakrawala nusantara Indonesia
307	Yayasan Sanggar Suara Perempuan
308	Ikatan Perempuan Positif Indonesia
309	Yayasan Kajian dan Bantuan Hukum Sarnelli (Kantor Bantuan Hukum Sarnelli/Yayasan Sarnelli)
310	Yayasan Bina Swadaya
311	Yayasan Bina Desa Mandiri
312	Lembaga Pengembangan Masyarakat Lembata
313	Kartini manakarra
314	LBH (lembaga bantuan hukum) Trisila Sumut
315	PPBH KUONAMI
316	Yayasan lambuina
317	Yayasan Amnaut Bife"Kuan" Nusa Tenggara Timur/YABIKU NTT
318	Yayasan KKSP

No	Nama Organisasi/Lembaga
319	Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan Burangir
320	Yayasan Dian Tama Pontianak
321	Aliansi Perempuan Merangin (APM)
322	Lembaga Pengkajian Studi Arus Informasi Regional (LPS AIR)
323	Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan (KPUK)
324	Mentari Sehat Indonesia
325	Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA)
326	Ludung weru
327	Perkumpulan Sada Ahmo
328	Penabulu Cabang Kalimantan Utara
329	Sammi Institut
330	Yayasan Bengkel Pembelajaran Antar Rakyat (Belantara) Papua
331	Yayasan Tifa Mandiri
332	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat MADANI
333	Yayasan Ulin
334	Yayasan Anak Bangsa Berakhak Mulia
335	Yayasan Bantuan Hukum Anuk Meutuah Aceh
336	Yayasan Anak Dusun Papua
337	PPSW Borneo
338	Yayasan LAPPAN Maluku

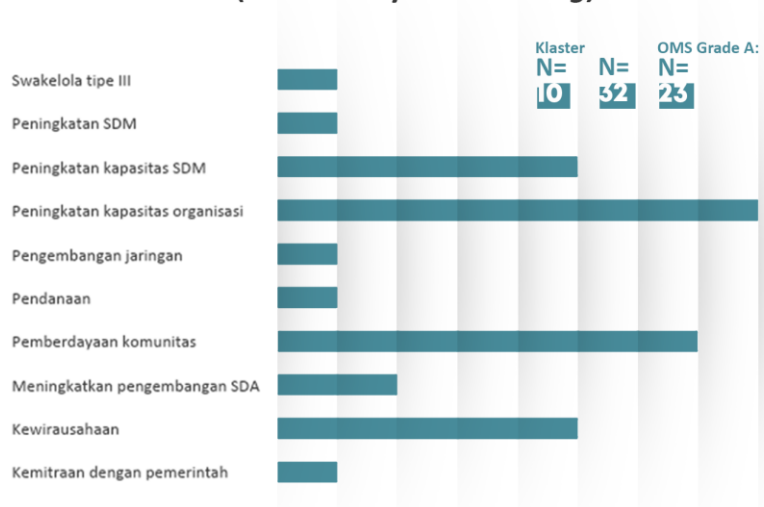
Seperti dijelaskan sebelumnya, kategori OMS grade D ini bisa disebabkan oleh dua hal, yakni: OMS yang memang tidak berbadan hukum, yakni hanya memiliki akta notaris, tidak memiliki badan hukum apapun dan OMS yang secara kuantitas tidak memenuhi unsur pertanyaan Grade di atasnya. *Kedua*, ada beberapa OMS yang secara badan hukum lebih jelas (SKT atau AHU) namun masih masuk ke dalam grade D, hal ini disebabkan karena lembaga-lembaga tersebut menjawab pertanyaan di grade “D” dan grade di atasnya dengan jawaban “tidak/tidak memiliki”. Secara grade akan menempatkan OMS tersebut di grade D.

## 5.5 Analisis Model Pemberdayaan OMS

### 5.5.1 Pemberdayaan-*Enabling* Grade A

Jika diklaster berdasarkan grade, maka komposisi potensi yang diharapkan untuk dikembangkan bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

### Potensi yang Ingin Ditingkatkan OMS Grade A (Pemberdayaan-Enabling)

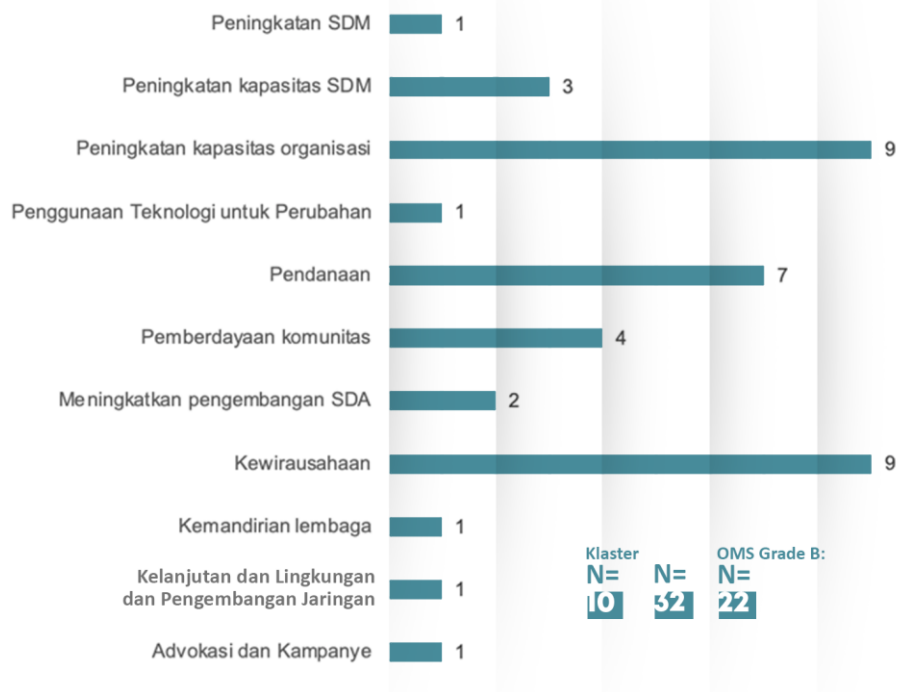


Gambar 5.8 Grafik Potensi yang Ingin Ditingkatkan OMS Grade A (Pemberdayaan-enabling)

Dari grafik di atas terlihat bahwa jumlah potensi yang ingin dikembangkan sebanyak 32 potensi yang berasal dari 10 klaster. Potensi yang paling banyak dipilih untuk ditingkatkan oleh OMS Grade A atau OMS Kapabel tipe A adalah soal peningkatan kapasitas organisasi yakni sebanyak 8 OMS, Pemberdayaan komunitas sebanyak 7 OMS, Peningkatan kapasitas SDM dan Kewirausahaan masing-masing 5 OMS dan peningkatan pengembangan SDA sebanyak 2 OMS.

Grafik berikut adalah grafik potensi yang ingin ditingkatkan oleh OMS Grade B atau OMS Kapabel tipe B.

### Potensi yang Ingin Ditingkatkan OMS Grade B (Pemberdayaan-Enabling)

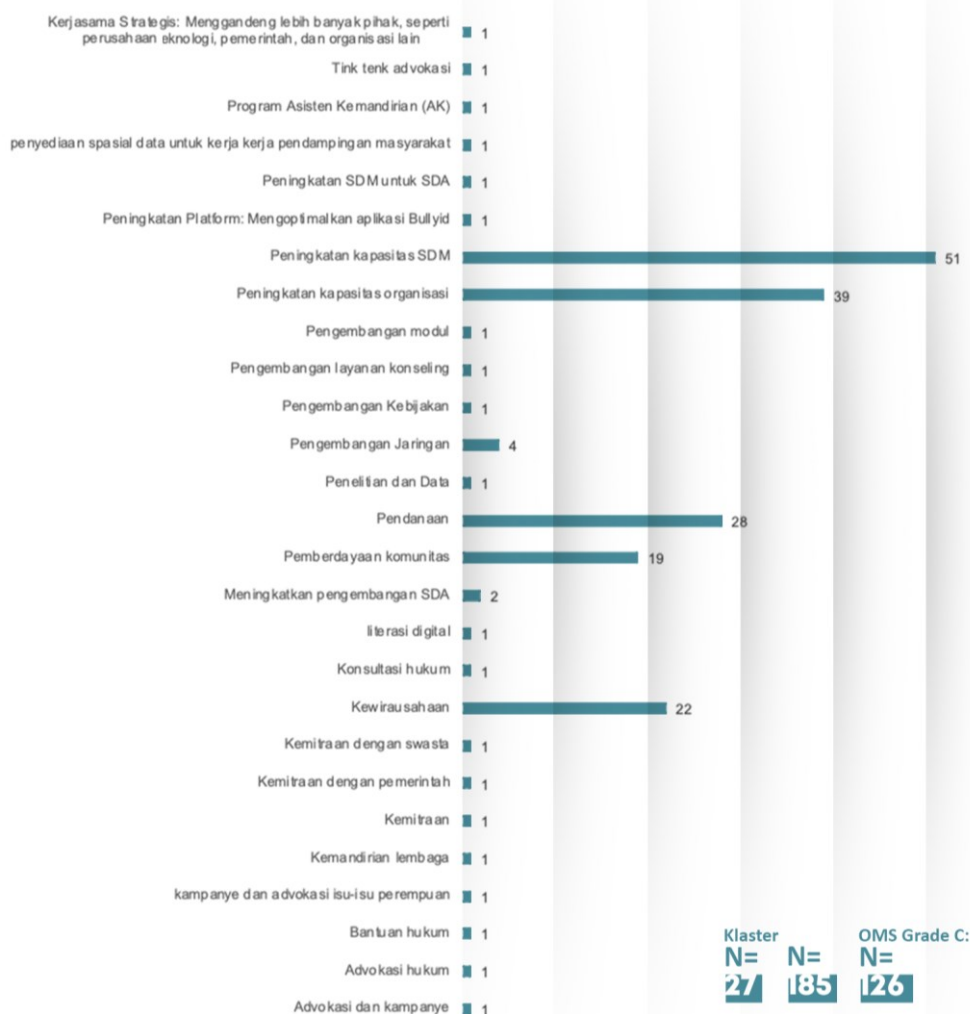


Gambar 5.9 Grafik Potensi yang Ingin Ditingkatkan OMS Grade B (Pemberdayaan-enabling)

Dari grafik di atas terlihat bahwa jumlah potensi yang ingin dikembangkan sebanyak 39 potensi yang berasal dari 6 klaster dan 5 unik. Potensi yang paling banyak dipilih untuk ditingkatkan oleh OMS Grade B atau OMS Kapabel tipe B adalah soal kewirausahaan dan peningkatan kapasitas organisasi yakni masing-masing sebanyak 9 OMS, pendanaan sebanyak 7 OMS, dan pemberdayaan komunitas sebanyak 4 OMS.

Berikut gambaran peta potensi yang ingin ditingkatkan oleh OMS Grade C atau OMS Kapabel tipe C.

## Potensi yang ingin Ditingkatkan OMS Grade C (Pemberdayaan-Enabling)

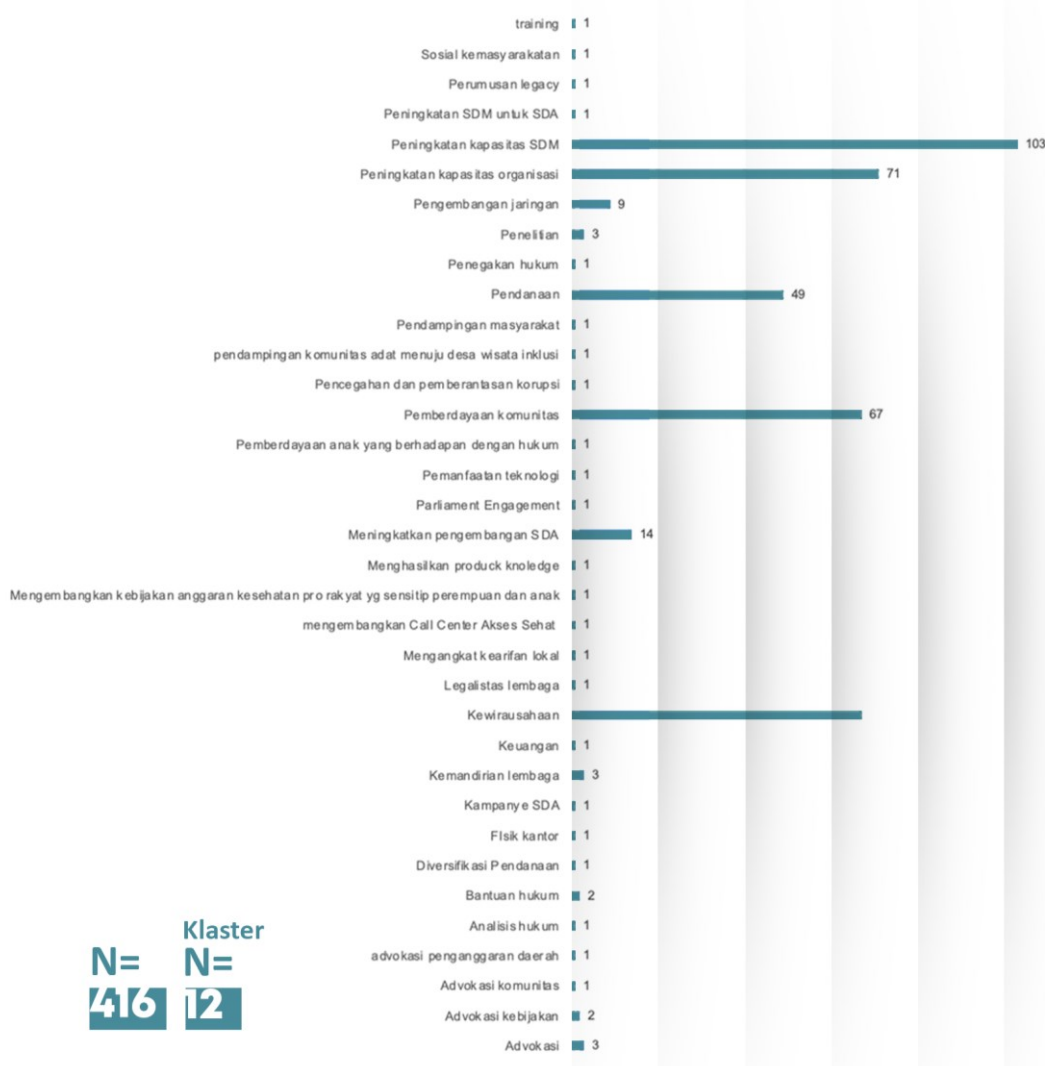


Gambar 5.10 Grafik Potensi yang Ingin Ditingkatkan OMS Grade C  
(Pemberdayaan-enabling)

Dari grafik di atas terlihat bahwa jumlah potensi yang ingin dikembangkan sebanyak 185 potensi yang berasal dari 7 klaster dan 20 unik. Potensi yang paling banyak dipilih untuk ditingkatkan oleh OMS Grade C atau OMS Kapabel tipe C adalah soal peningkatan kapasitas SDM sebanyak 51 OMS, peningkatan kapasitas organisasi sebanyak 39 OMS, pendanaan sebanyak 28 OMS, Kewirausahaan sebanyak 22 OMS dan pemberdayaan komunitas sebanyak 19 OMS.

Berbeda dengan grade sebelumnya yang menggunakan istilah OMS Kapabel, OMS Grade D atau OMS Eksis menuliskan beragam potensi yang ingin dikembangkan di dalam organisasinya. Berikut gambaran peta potensi yang ingin dikembangkan OMS grade D atau OMS eksis.

## Potensi yang Ingin Ditingkatkan **OMS Grade D** (Pemberdayaan-Enabling)

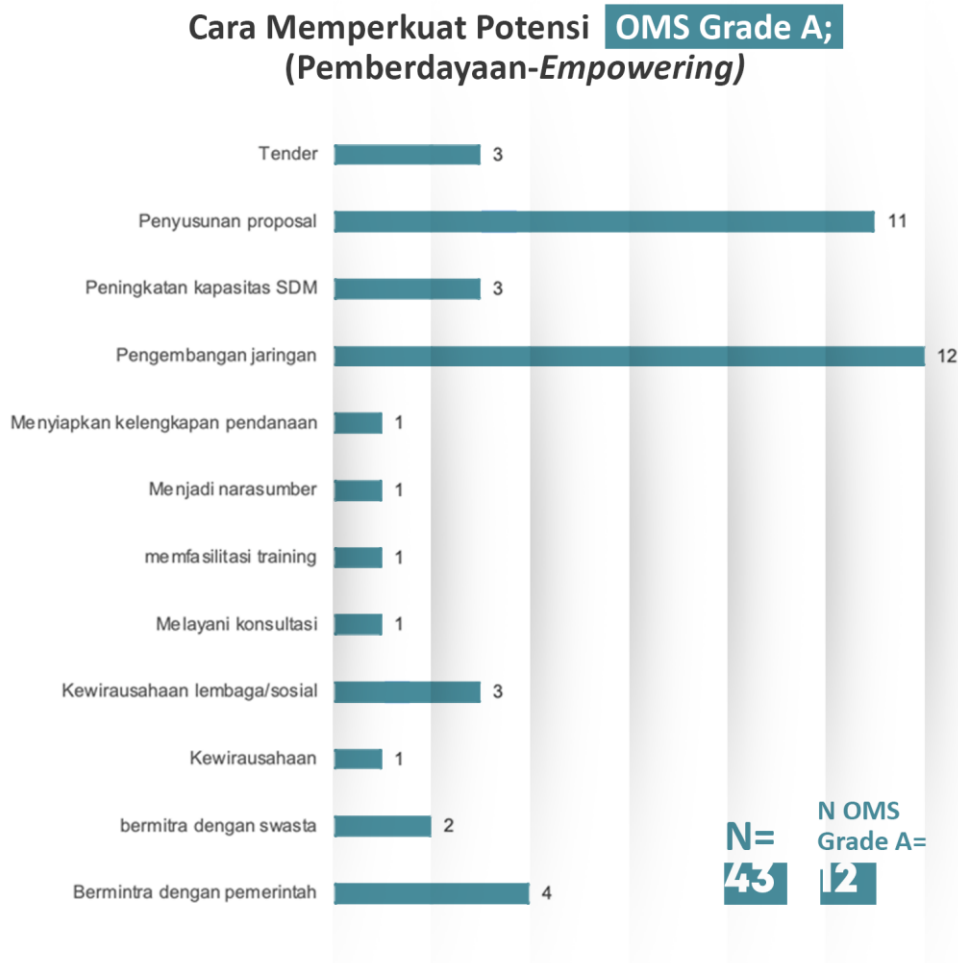


Gambar 5.11 Grafik Potensi yang Ingin Ditingkatkan OMS Grade D  
(Pemberdayaan-enabling)

Dari grafik di atas terlihat bahwa jumlah potensi yang ingin dikembangkan sebanyak 416 potensi yang berasal dari 12 klaster dan 23 unik. Potensi yang paling banyak dipilih untuk ditingkatkan oleh OMS Grade D atau OMS eksis adalah soal peningkatan kapasitas SDM sebanyak 103 OMS, peningkatan kapasitas organisasi sebanyak 71 OMS, Kewirausahaan dan pemberdayaan komuitas masing-masing sebanyak 67 OMS dan pendanaan melibatkan pihak luar sebanyak 49 OMS.

### 5.5.2 Pemberdayaan-Empowering

Jika diturunkan, potensi kekuatan yang dimiliki/yang selama ini didapatkan oleh OMS bisa dilihat dalam penjelasan berikut. Berikut ini adalah potensi kekuatan yang dimiliki oleh OMS Grade A atau OMS Kapabel tipe A selama ini:

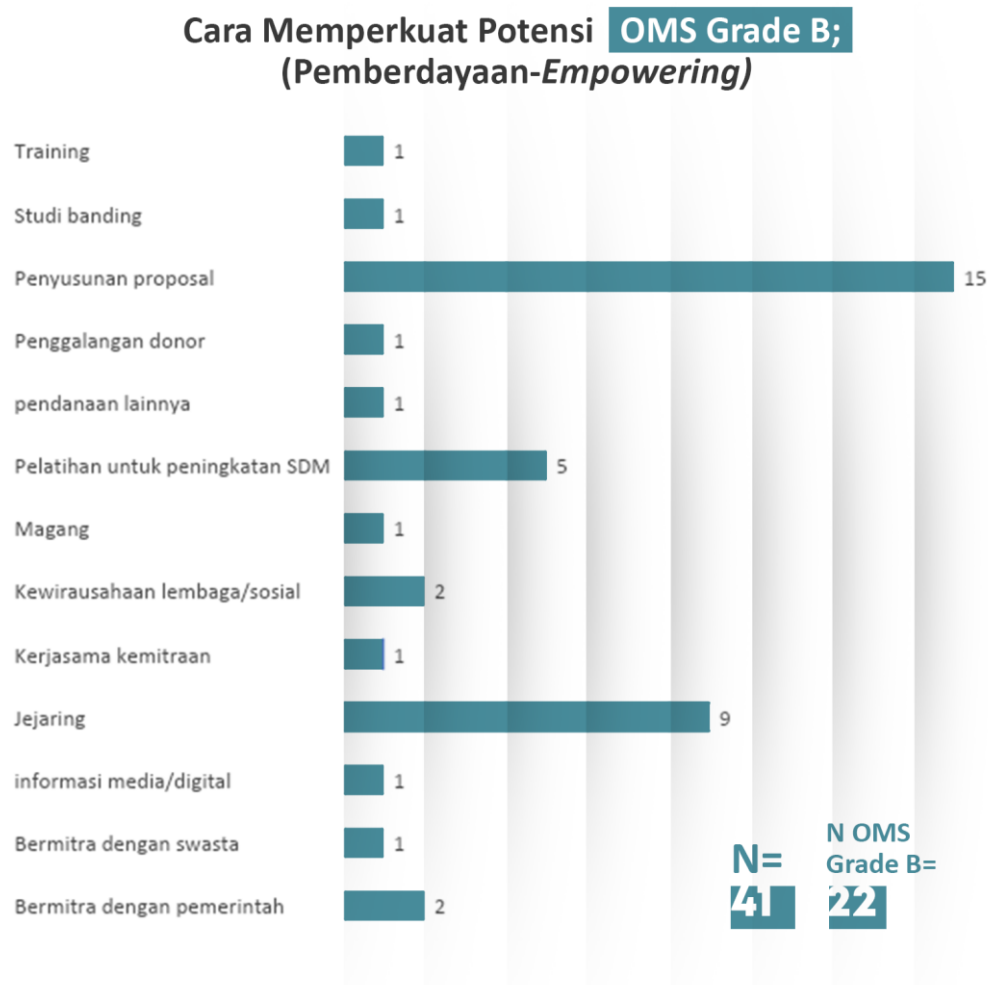


Gambar 5.12 Grafik Cara OMS Memperkuat Potesi (Pemberdayaan-empowering); OMS Grade A

Grafik pemberdayaan dalam konteks memperkuat potensi OMS Grade A di atas terlihat bahwa, dari 23 OMS Grade A, melakukan upaya-upaya penguatan di organisasi, terutama dalam pendanaan dan peningkatan kapasitas dengan beragam cara. Dari 23 OMS menyebutkan total 43 cara OMS memperkuat potensi yang dimiliki oleh OMS Grade A. Dari 43 potensi tersebut yang paling banyak disebut oleh OMS adalah soal memperkuat potensi mengenai pengembangan jaringan sebanyak 12 OMS, pola yang dilakukan untuk memperkuat dalam konteks pendanaan dilakukan dengan cara penyusunan proposal seperti yang dilakukan oleh 11 OMS Grade A, 4

OMS menguatkan potensi dengan cara bermitra dengan pemerintah, masing-masing 3 OMS menguatkan potensi dengan cara Kewirausahaan lembaga/sosial, peningkatan kapasitas SDM dan mengikuti tender.

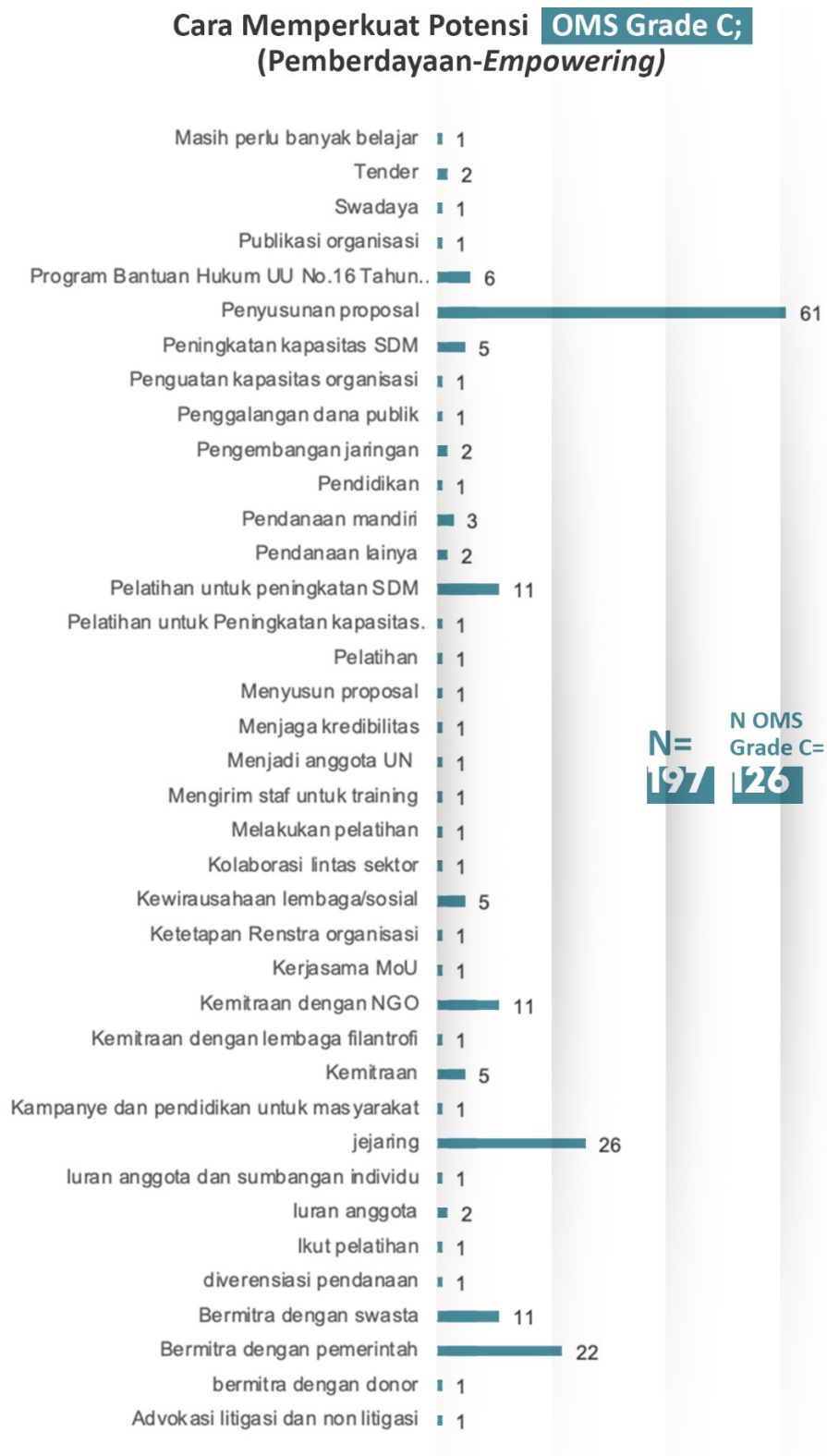
Berikut gambaran cara OMS memperkuat potensi yang dimiliki oleh lembaga yang dikembangkan/dilaksanakan oleh OMS Grade B.



Gambar 5.13 Grafik Cara OMS Memperkuat Potensi (Pemberdayaan-empowering); OMS Grade B

Grafik pemberdayaan dalam konteks memperkuat potensi OMS Grade B di atas terlihat bahwa, dari 22 OMS Grade B, melakukan upaya-upaya penguatan di organisasi, terutama dalam pendanaan dan peningkatan kapasitas dengan beragam cara. Dari 22 OMS menyebutkan total 41 cara OMS memperkuat potensi yang dimiliki oleh OMS Grade B. Dari 41 potensi tersebut yang paling banyak disebut oleh OMS adalah soal penyusunan proposal sebanyak 15 OMS, selain melalui penyusunan proposal, OMS juga melakukan upaya memperkuat potensi dengan mnegembangkan jejaring sebanyak 9 OMS, melalui pelatihan peningkatan SDM sebanyak 5 OMS.

Berikut gambaran cara OMS memperkuat potensi yang dimiliki oleh lembaga yang dikembangkan/dilaksanakan oleh OMS Grade C.

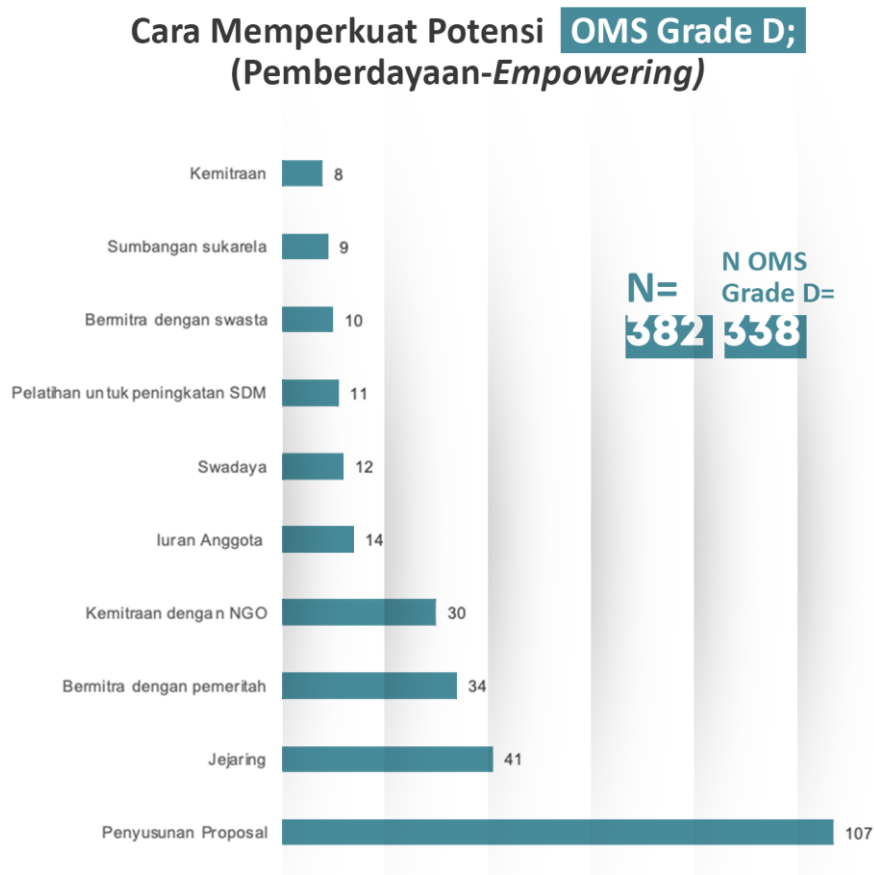


*Gambar 5.14 Grafik Cara OMS Memperkuat Potensi (Pemberdayaan-empowering); OMS Grade C*

Grafik pemberdayaan dalam konteks memperkuat potensi OMS Grade C di atas terlihat bahwa, dari 126 OMS Grade C, melakukan upaya-upaya penguatan di organisasi, terutama dalam pendanaan dan peningkatan kapasitas dengan beragam cara. Dari 126 OMS menyebutkan total 197 cara OMS memperkuat potensi yang dimiliki oleh OMS Grade C. Dari 197 potensi tersebut yang paling banyak disebut oleh OMS adalah soal penyusunan proposal sebanyak 61 OMS, selain melalui penyusunan proposal, OMS juga melakukan upaya memperkuat potensi dengan memperkuat jejaring sebanyak 26 OMS, penguatan dengan bermitra dengan pemerintah sebanyak 21 OMS, bermitra dengan swasta, kemitraan dengan NGO (baik nasional, internasional maupun lokal) dan pelatihan untuk peningkatan SDM masing-masing diusulkan oleh 11 OMS.

Poin menarik dari penggalan potensi kekuatan OMS dari sisi pendanaan dan peningkatan kapasitas) adalah pernyataan dari OBH yang menyebutkan bahwa OBH telah memiliki program bantuan hukum sesuai UU no 16 tahun 2011.

Berikut gambaran cara OMS memperkuat potensi yang dimiliki oleh lembaga yang dikembangkan/dilaksanakan oleh OMS Grade D atau OMS eksis.



*Gambar 5.15 Grafik (10 terbesar) Cara OMS Memperkuat Potesi Terbanyak (Pemberdayaan-empowering); OMS Grade D*

### Cara lainnya

1. Akses pendanaan terbatas	39. Pelatihan mandiri
2. Bantuan konsumen lepasan	40. Pelatihan untuk lembaga lain
3. Bekerjasama	41. Pemanfaatan sumber daya lokal
4. Bergantung pendanaan Global Fund	42. Penawaran tools
5. Bimtek	43. Pencarian link sumber dana
6. Crowdfunding	44. Pendampingan untuk peningkatan kapasitas
7. CSR ZIS	45. Pendanaan dari donor lokal
8. Dana desa	46. Pendataan Poktan
9. Dana pribadi	47. Pendekatan kepengurus dan anggota
10. Donatur	48. Pendidikan
11. Donor	49. Pengkaderan
12. Dukungan PKBI	50. Peningkatan kapasitas Organisasi
13. Fund raising	51. Peningkatan kapasitas SDM
14. Ikut lelang proyek	52. Peningkatan kapasitas SDM oleh SDM yang ada
15. Implementasi hasil pelatihan untuk lembaga	53. peningkatan SDM dari donor
16. Inisiatif pimpinan lembaga dan pengurus	54. Penyebaran keahlian di Universitas-universitas
17. Inisiatif riset dan advokasi	55. Program Bantuan Hukum UU No.16 Tahun 2011
18. Iuran anggota dan pendiri	56. Program donor
19. Kedutaan besar	57. Publikasi media
20. Kemitraan dengan kampus	58. Publikasi media visual
21. Kemitraan individu	59. Sedang menata Sumberdaya
22. Kerjasama MoU	60. Seleksi SDM
23. Kewirausahaan lembaga/sosial	61. Sponsorship
24. Komunikasi dengan Pemerintah	62. Subsidi silang pendanaan hukum dari orang mampu
25. Konsorsium STPI-Penabulu	63. Sumbangan anggota
26. Link and match	64. Swaeducasi
27. Lomba	65. Tawaran
28. Magang program	66. tenaga ahli
29. Mandiri	67. Tender
30. mandiri	68. Training
31. Media dan informasi langsung	69. Unit usaha
32. Mendampingi masyarakat	70. WA grup organisasi
33. Mengikuti pelatihan	
34. Monev	
35. Musrenbang	

36. Partnership	71. Workshop
37. Pelatihan	
38. Pelatihan dari lembaga lain	

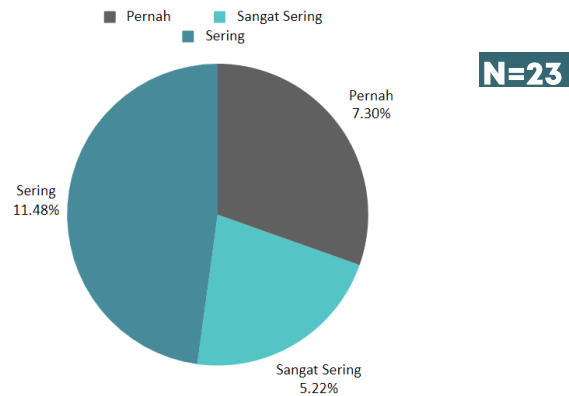
Grafik pemberdayaan dalam konteks memperkuat potensi OMS Grade D di atas terlihat bahwa, dari 338 OMS Grade D, melakukan upaya-upaya penguatan di organisasi, terutama dalam pendanaan dan peningkatan kapasitas dengan beragam cara. Dari 338 OMS menyebutkan total 382 cara OMS memperkuat potensi yang dimiliki oleh OMS Grade D. Dari 382 potensi tersebut yang paling banyak disebut oleh OMS adalah soal penyusunan proposal (mengembangkan potensi pendaanaaan melalui peluang Kerjasama dengan donor melalui penyusunan proposal atau penawaran program/project), sebanyak 41 OMS menyatakan bahwa potensi penguatan OMS yang dilakukan biasanya dilakukan dengan berjejaring dengan lembaga lainnya, Selain itu, terdapat OMS yang melakukan upaya penguatan potensi dengan bermitra dengan pemerintah melalui program-program yang bisa disinergikan sebanyak 34 OMS, Kemitraan dengan NGO, baik di level nasional, regional, dan lokal sangat penting keberadaannya bagi OMS karena bisa saling membantu dan berdaya bersama. OMS yang menyatakan penguatan potensi OMS melalui kemitraan dengan nGO sebanyak 30 OMS.

Terdapat beberapa hal menarik dari temuan data soal penguatan potensi yang dikembangkan oleh OMS. Terdapat OMS yang tidak memiliki akses pada sumber pendanaan dan akses informasi lainnya.

### 5.5.3 Pemberdayaan-Protecting Grade A-D

Berikut gambaran pemberdayaan OMS berdasarkan grade terkait dengan partisipasi dalam program-program pemerintah/swasta/donor.

#### Keikutsertaan OMS Grade A dalam Program- Program Pemerintah/Swasta/Donor; Pemberdayaan-Protecting

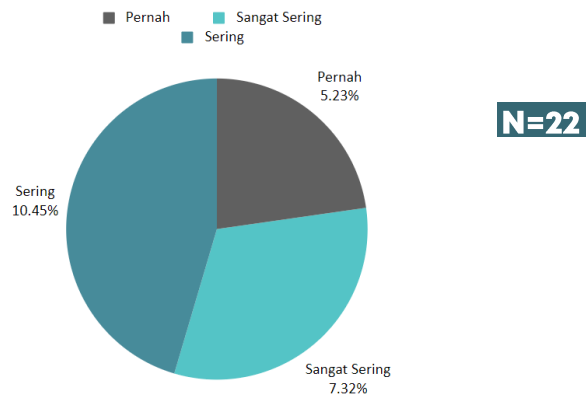


Gambar 5.16 Grafik Keikutsertaan OMS Grade A dalam Program-program Pemerintah/Swasta/Donor; Pemberdayaan-Protecting

Dari pertanyaan tertutup yang diajukan kepada OMS yang berpartisipasi dalam survei, OMS grade A atau OMS Kapabel tipe A sebanyak 11 OMS atau 48% menyatakan sering ikut serta dalam program-program pemerintah/swasta/donor, 7 OMS atau 30 persen lainnya menyatakan pernah ikut serta dalam program-program pemerintah/swasta/donor, dan sebanyak 5 OMS atau 22 persen menyatakan sangat sering ikut serta dalam program-program pemerintah/swasta/donor.

Sedangkan OMS Grade B atau OMS tipe B bisa dilihat dari grafik berikut ini:

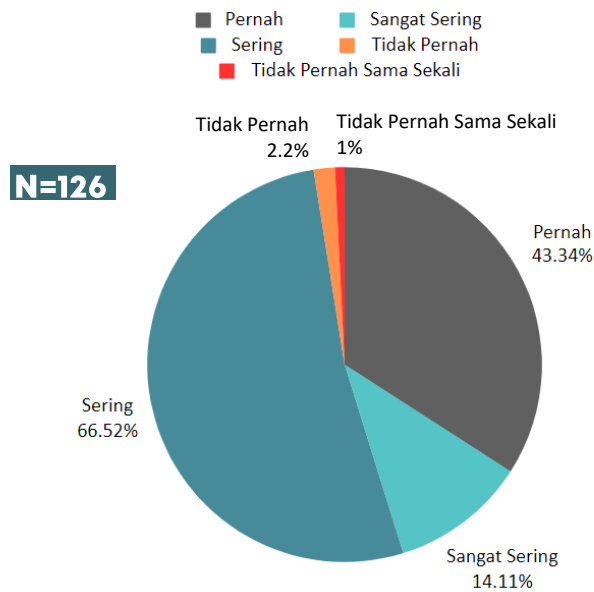
#### Keikutsertaan OMS Grade B dalam Program- Program Pemerintah/Swasta/Donor; Pemberdayaan-Protecting



Gambar 5.17 Grafik Keikutsertaan OMS Grade B dalam Program-program Pemerintah/Swasta/Donor; Pemberdayaan-Protecting

Dari pertanyaan tertutup yang diajukan kepada OMS yang berpartisipasi dalam survei. Dari partisipasi OMS grade B atau OMS Kapabel tipe B, sebanyak 10 OMS atau 45% menyatakan sering ikut serta dalam program-program pemerintah/swasta/donor, 7 OMS atau 32 persen menyatakan sangat sering ikut serta dalam program-program pemerintah/swasta/donor, dan sebanyak 5 OMS lainnya atau sebesar 23 persen menyatakan pernah ikut serta dalam program-program pemerintah/swasta/donor.

**Keikutsertaan OMS Grade C dalam Program- Program Pemerintah/Swasta/Donor; Pemberdayaan-Protecting**

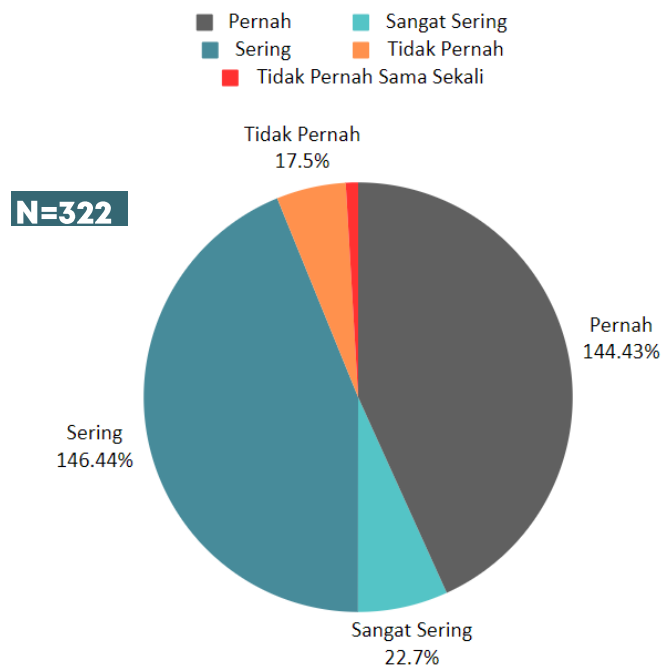


*Gambar 5.18 Grafik Keikutsertaan OMS Grade C dalam Program-program Pemerintah/Swasta/Donor; Pemberdayaan-Protecting*

Dari pertanyaan tertutup yang diajukan kepada OMS yang berpartisipasi dalam survei, OMS grade C atau OMS Kapabel tipe C, sebanyak 66 OMS atau 52% menyatakan sering ikut serta dalam program-program pemerintah/swasta/donor, sebanyak 43 OMS atau 34 persen menyatakan pernah ikut serta dalam program-program pemerintah/swasta/donor, sebanyak 14 OMS lainnya atau sebesar 11 persen menyatakan sangat sering ikut serta dalam program-program pemerintah/swasta/donor, sebanyak 2 OMS menyatakan tidak pernah ikut serta dalam program-program pemerintah/swasta/donor dan 1 OMS lainnya menyatakan tidak pernah sama sekali ikut serta dalam program-program pemerintah/swasta/donor.

Berbeda dengan OMS grade yang lain, OMS grade D atau grade eksis memiliki jumlah OMS yang paling banyak dari semua grade. Berikut gambaran OMS grade D soal keikutsertaan dalam program-program pemerintah/swasta/donor.

### Keikutsertaan OMS Grade D dalam Program- Program Pemerintah/Swasta/Donor; Pemberdayaan-Protecting

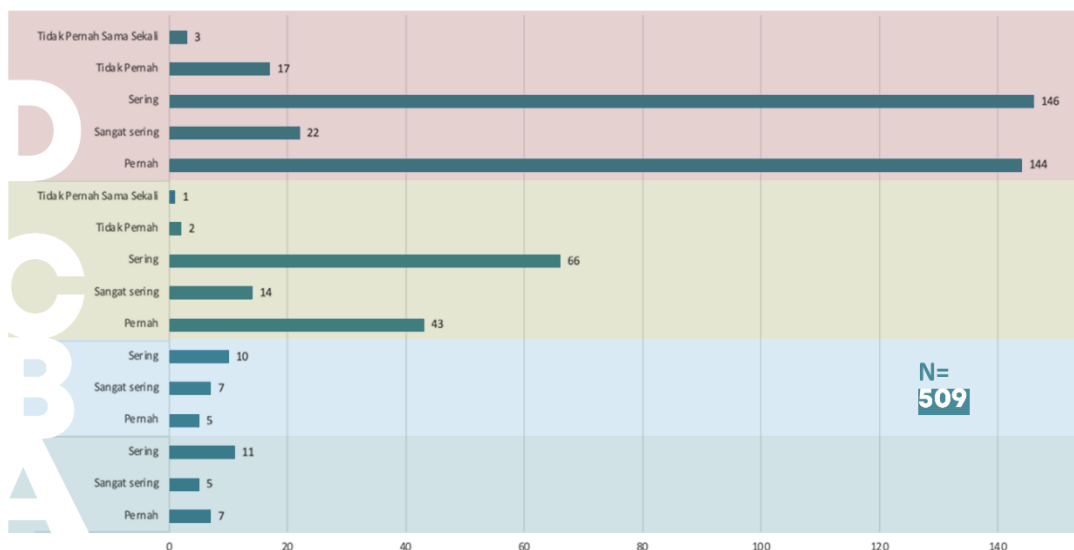


Gambar 5.19 Grafik Keikutsertaan OMS Grade D dalam Program-program Pemerintah/Swasta/Donor; Pemberdayaan-Protecting

Dari pertanyaan tertutup yang diajukan kepada OMS yang berpartisipasi dalam survei, dari OMS yang masuk dalam kategori grade D atau OMS Eksis, sebanyak 146 OMS atau sebanyak 44 persen menyatakan sering ikut serta dalam program-program dari Pemerintah/Swasta/donor. Di posisi kedua ada 144 OMS Grade D atau sebanyak 43 persen menyatakan pernah, 22 OMS atau sebanyak 7 persen menyatakan sangat sering, 17 OMS atau 5 persen menyatakan tidak pernah, 3 OMS atau sebanyak 1 persen menyatakan tidak pernah sama sekali dan 7 OMS lainnya tidak menjawab.

Bila dilihat secara karakteristik soal keikutsertaan (terbukanya relasi) dengan pihak luar, dari perbandingan grafik ini bisa dilihat bahwa:

Perbandingan Soal Keikutsertaan 4 Grade dalam Program-program Pemerintah/Swasta/Donor; Pemberdayaan-Protecting



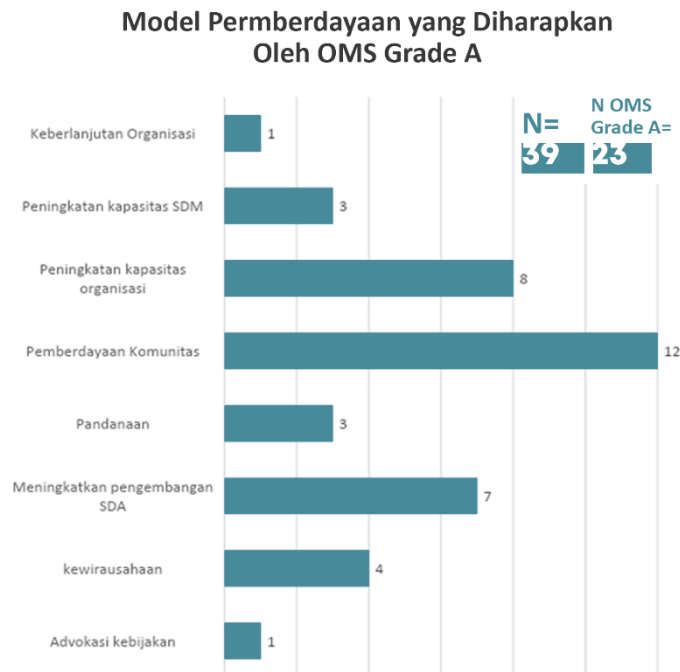
Gambar 5.20 Grafik Perbandingan Partisipasi OMS dalam Program-program Pemerintah/Swasta/Donor

Dari grafik perbandingan di atas terlihat bahwa tiap Grade OMS memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk Grade D dan C masih ada OMS yang tidak pernah dan tidak pernah sama sekali ikut serta dalam program-program baik pemerintah, swasta maupun donor. Dari Grade D ditemukan sebanyak 3 OMS yang tidak pernah sama sekali dan 17 OMS tidak pernah. Sedangkan di Grade C terdapat 1 OMS yang menyatakan tidak pernah sama sekali dan 2 OMS menyatakan tidak pernah.

Berbeda dengan grade C dan D, Grade A dan B didominasi oleh OMS yang berpengalaman bermitra atau ikut serta dalam program atau pekerjaan bersama pemerintah, swasta atau lembaga donor. Grade A, yang menyatakan sering ada 11 OMS dan sangat sering ada 5 OMS, sisanya sebanyak 7 OMS menyatakan pernah. Sedangkan Grade B yang menyatakan sering sebanyak 10 OMS, sangat sering 7 OMS dan pernah sebanyak 5 OMS.

## 5.6 Model Pemberdayaan

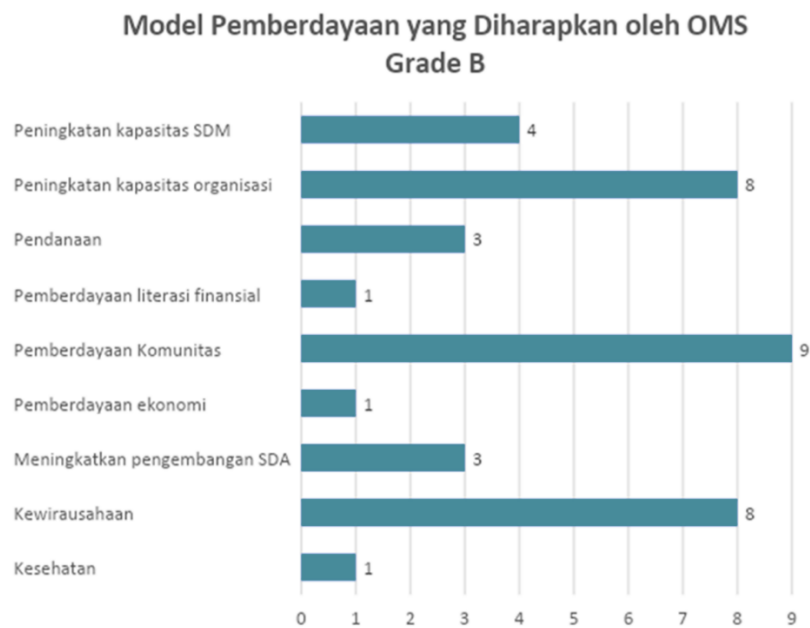
Jika diklaster berdasarkan Grade maka komposisi model pemberdayaan yang diharapkan oleh OMS itu sebagai berikut:



*Gambar 5.21 Grafik Model Pemberdayaan yang Diharapkan oleh OMS Grade A*

Dari pertanyaan terbuka mengenai model pemberdayaan yang diharapkan oleh OMS Grade A atau OMS Kapabel Tipe A didapatkan data bahwa dari 23 OMS Grade A mengusulkan total 39 model pemberdayaan. Bila diklaster model pemberdayaan tersebut terbagi ke dalam 9 klaster, yakni: Pemberdayaan komunitas (peningkatan kemampuan dari mitra dampingan OMS) diusulkan oleh 12 OMS, Peningkatan kapasitas organisasi diusulkan oleh 8 OMS, meningkatkan pengembangan SDA diusulkan oleh 7 OMS, soal Kewirausahaan diusulkan oleh 4 OMS, Pendanaan (melibatkan pihak luar) dan peningkatan kapasitas SDM diusulkan oleh masing-masing 3 OMS serta keberlanjutan organisasi dan advokasi kebijakan diusulkan oleh masing-masing 1 OMS.

Tidak jauh berbeda dengan OMS grade A, OMS Grade B juga memiliki beberapa harapan model pemberdayaan. Berikut grafik kumulatif dari model pemberdayaan yang diusulkan oleh OMS Grade B atau OMS Kapabel tipe B.

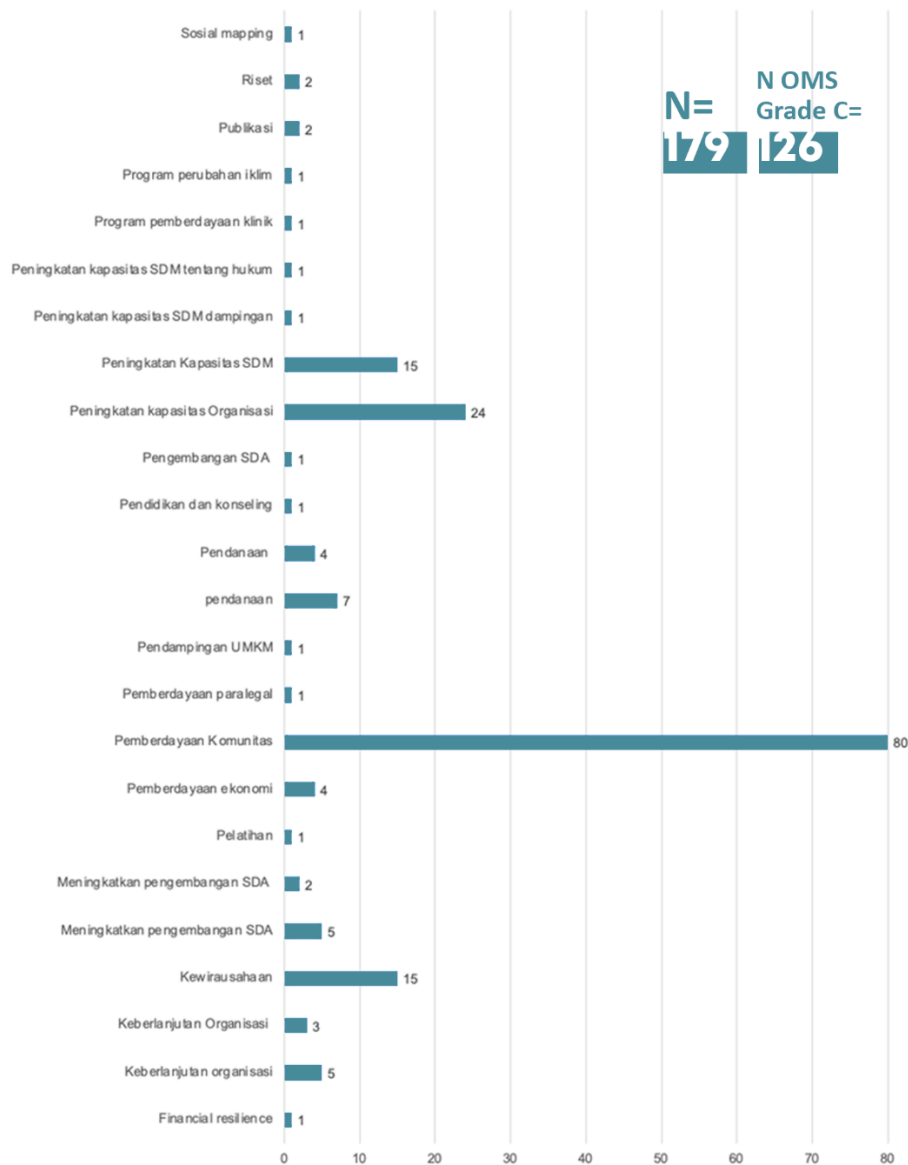


*Gambar 5.22 Grafik Model Pemberdayaan yang Diharapkan oleh OMS Grade B*

Dari pertanyaan terbuka mengenai model pemberdayaan yang diharapkan oleh OMS Grade B atau OMS Kapabel Tipe B didapatkan data bahwa dari 22 OMS Grade B mengusulkan total 38 model pemberdayaan. Bila diklaster model pemberdayaan tersebut terbagi ke dalam 6 klaster, yakni: Pemberdayaan komunitas (peningkatan kemampuan dari mitra dampingan OMS) diusulkan oleh 9 OMS, Peningkatan kapasitas organisasi dan Kewirausahaan diusulkan oleh masing-masing 8 OMS, peningkatan kapasitas SDM diusulkan oleh 4 OMS, pendanaan (pelibatan pihak luar organisasi dalam pendanaan, misalnya pemerintah, donor atau swasta) dan meningkatkan pengembangan SDA diusulkan oleh masing-masing 3 OMS, dan tiga (3) usulan unik OMS terkait model pemberdayaan diantaranya soal: pemberdayaan literasi finansial, pemberdayaan ekonomi dan Kesehatan.

Berbeda dengan grade A dan B, OMS yang masuk dalam Grade C terhitung sebanyak 126 OMS. Dari ke 126 tersebut ditemukan data model pemberdayaan yang diusulkan seperti terlihat dalam grafik di bawah ini.

## Model Pemberdayaan yang Diharapkan Oleh OMS Grade C

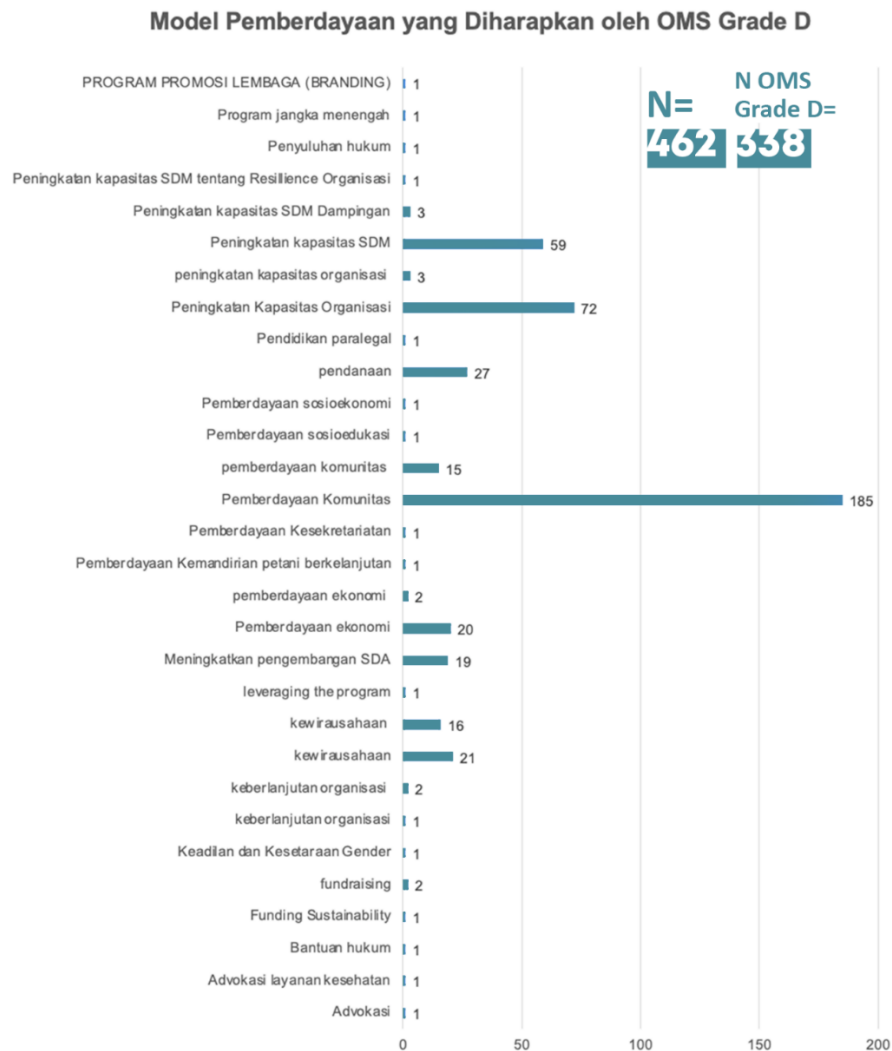


Gambar 5.23 Grafik Model Pemberdayaan yang Diharapkan oleh OMS Grade C

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa OMS grade C mengusulkan sebanyak 179 model pemberdayaan. Dari 179 model tersebut, pemberdayaan komunitas (mendampingi, meningkatkan kapasitas mitra, mendampingi perempuan dan anak, pendampingan hukum untuk masyarakat) menempati posisi teratas yakni diusulkan oleh 80 OMS. Selain soal pemberdayaan, usulan lain yang cukup banyak adalah soal peningkatan kapasitas organisasi sebanyak 24 usulan/model, peningkatan kapasitas SDM dan Kewirausahaan sebanyak masing-masing 15 usulan, dan soal pendanaan sebanyak 7 usulan.

Berikut gambaran model pemberdayaan OMS yang diharapkan oleh OMS grade D yang berjumlah 338 OMS.

### Model Pemberdayaan yang Diharapkan Oleh OMS Grade D



Gambar 5.24 Grafik Model Pemberdayaan yang Diharapkan oleh OMS Grade D

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa OMS grade D mengusulkan sebanyak 462 model pemberdayaan. Dari 462 model tersebut, pemberdayaan komunitas (mendampingi, meningkatkan kapasitas mitra, mendampingi perempuan dan anak, pendampingan hukum untuk masyarakat) menempati posisi teratas yakni diusulkan oleh 185 OMS. Selain soal pemberdayaan, usulan lain yang cukup banyak adalah soal peningkatan kapasitas organisasi sebanyak 72 usulan/model, peningkatan kapasitas SDM sebanyak 59 usulan, dan pendanaan sebanyak 27 usulan.

Selain itu terdapat usulan spesifik yang diinginkan oleh OMS seperti: Pemberdayaan kesekretariatan, branding lembaga dan usulam lainnya.

### **5.7 Spider Chart: Identifikasi Kebutuhan Pemberdayaan OMS**

Selain pertanyaan mengenai eksistensi dan akuntabilitas, riset ini juga menanyakan soal jenis pemberdayaan yang dibutuhkan oleh OMS. Pertanyaan terkait pemberdayaan ini diklaster menjadi 3 bagian, yakni *Enabling*, *empowering* dan *protecting*.

Jenis pertanyaan untuk menggali kebutuhan jenis pemberdayaan ini menggunakan pertanyaan terbuka untuk *enabling* dan *protecting*, adapun pertanyaan untuk menggali kebutuhan pemberdayaan ini adalah:

1. Potensi apa yang ingin dikembangkan dari organisasi/lembaga Anda?
2. Bagaimana selama ini organisasi/lembaga Anda mengakses sumber daya, baik pendanaan maupun peningkatan kapasitas organisasi?
3. Jika organisasi/lembaga Anda ditawari satu program pemberdayaan, program seperti apa yang paling dibutuhkan oleh lembaga Anda?

Sedangkan untuk *empowering* menggunakan pertanyaan tertutup dengan pengukuran skala (Sangat sering, sering, pernah, tidak pernah, tidak pernah sama sekali). Adapun pertanyaan untuk indikator ini adalah: *Seberapa sering Organisasi/Lembaga Anda diikutsertakan dalam program-program yang dilakukan oleh pemerintah/swasta/donor?*

Seluruh pertanyaan dibuat skoring sehingga, jumlah jawaban akan dikuantifikasi sebagai unit kebutuhan, artinya: semakin banyak yang diperlukan maka spider chart akan semakin menjauh dari titik "0". Begitupun dengan *empowering*, semakin tidak pernah mengakses dana dari lembaga lain (donor, pemerintah, swasta, dll) maka skornya akan semakin tinggi (jauh dari "0").

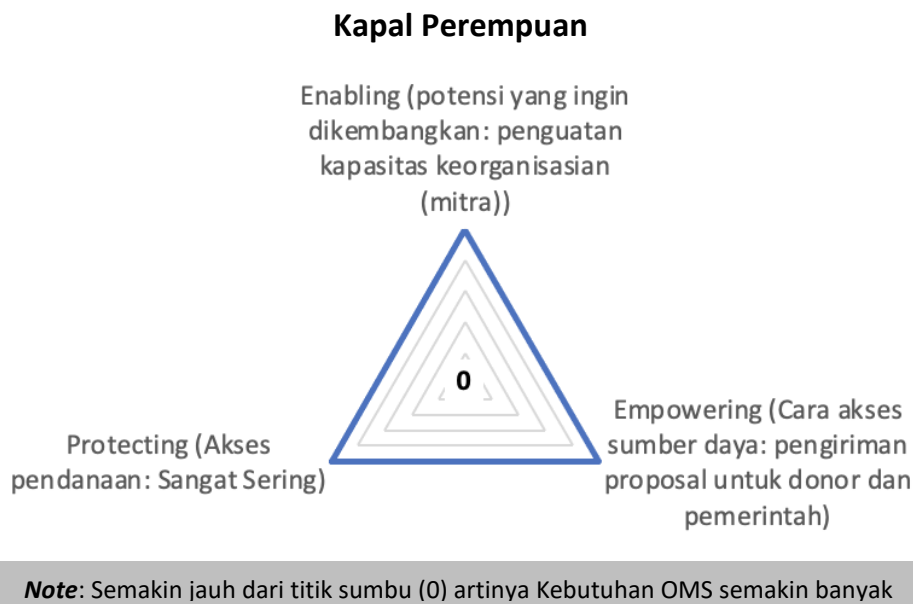
Berikut contoh/simulasi pengaplikasian *spider chart* untuk OMS dengan kategori Grade A-D.

#### **5.7.1 Grade A – KAPAL Perempuan**

KAPAL Perempuan adalah salah satu dari 23 OMS yang masuk dalam kategori grade A. KAPAL Perempuan dan 22 OMS lainnya menjawab seluruh pertanyaan penelitian dengan jawaban "ya/Ya memiliki" sehingga menempatkannya pada grade A. Secara kelembagaan, KAPAL Perempuan relative memiliki instrumen yang dibutuhkan oleh

OMS, seperti beragam SOP, mulai dari ketenagakerjaan, volunteer, keuangan, pengadaan barang dan jasa dan SOP lainnya. Begitupun dari sisi aksesibilitas pendanaan, Kapal Perempuan termasuk lembaga yang sangat sering mengakses pendanaan dari lembaga donor, baik internasional maupun nasional.

Dengan merujuk pertanyaan soal pemberdayaan, dari sisi aksesibilitas pendanaan, KAPAL Perempuan termasuk salah satu lembaga yang sangat sering mendapatkan pendanaan dari donor. Namun demikian, dari sisi *enabling* (kemampuan), KAPAL Perempuan masih memerlukan peningkatan kapasitas, namun kapasitas yang dimaksud adalah kapasitas mitra KAPAL Perempuan di tingkat lokal. Sedangkan dari sisi *empowering* KAPAL Perempuan menyadari pentingnya diferensiasi pendanaan. KAPAL Perempuan sedang mendorong upaya diferensiasi pengiriman proposal, tidak hanya ke donor tapi juga pemerintah.



*Gambar 5.27 Spider Check OMS Grade A*

Dari spider chart di atas terlihat bahwa Kapal Perempuan sebagai lembaga yang berada di grade A tidak banyak membutuhkan pemberdayaan, abik dalam konteks *empowering*, *enabling* maupun *protecting*. Spider chart tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan kapal atas tiga model pemberdayaan hanya memerlukan sedikit penguatan.

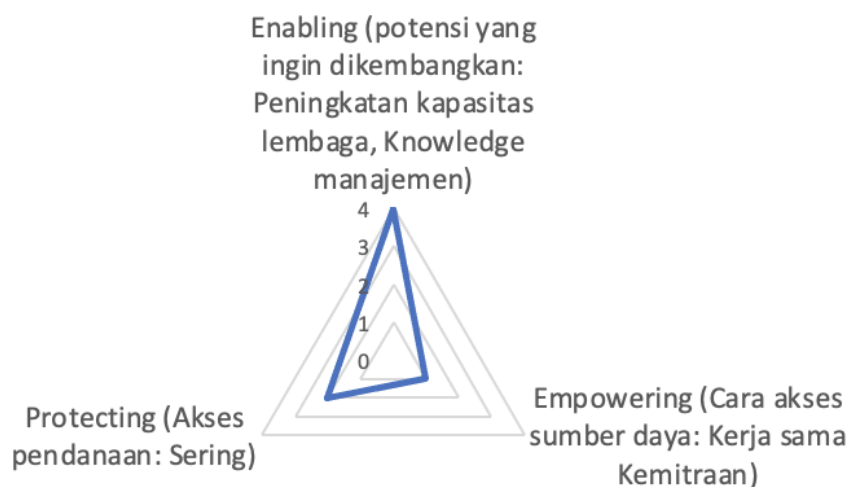
### 5.7.2 Grade B – ASPPUK

Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK) adalah salah satu dari 22 OMS yang masuk dalam kategori grade B. ASPPUK dan 21 OMS lainnya menjawab seluruh pertanyaan penelitian dengan jawaban “ya/Ya memiliki” untuk pertanyaan

kategori grade B. Secara kelembagaan, ASPPUK memiliki termasuk OMS menengah atas ASPPUK juga memiliki pengalaman (sering) bekerjasama dengan beragam lembaga donor.

Dari sisi *enabling* (kemampuan), ASPPUK menyatakan memerlukan peningkatan kapasitas organisasi dan peningkatan pengetahuan manajemen organisasi. Sedangkan dari sisi *empowering* ASPPUK menyadari pentingnya pendanaan dari beragam lembaga sehingga pendanaan ASPPUK menekankan pentingnya soal peningkatan Kerjasama kemitraan dengan beragam lembaga.

### ASPPUK



Gambar 5.28 Spider Check OMS Grade B

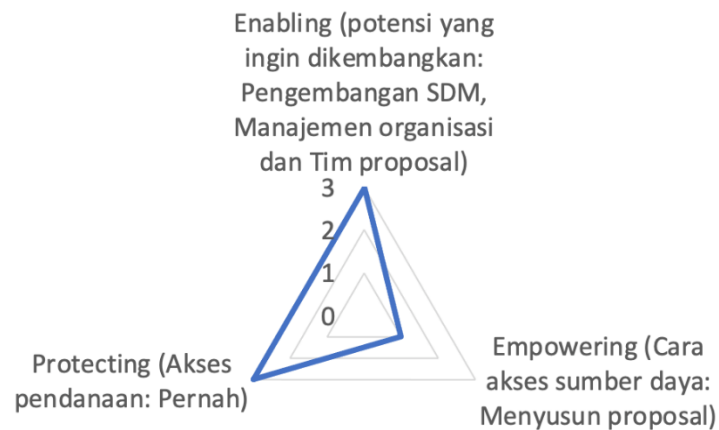
Dari spider chart di atas terlihat kalau ASPPUK lebih banyak membutuhkan soal peningkatan kapasitas lembaga dan peningkatan pengetahuan/wawasan manajemen di lembaga. Sedangkan untuk akses pendanaan ASPPUK menyatakan sering mendapatkan pendanaan atau kerja sama dengan donor dan dari sisi empowering (cara mengakses sumber daya) ASPPUK lebih intens dalam menjalankan kerjasama dengan kemitraan.

### 5.7.3 Grade C– Yayasan Sehat Peduli Kasih

Salah satu OMS yang masuk dalam kategori Grade C adalah Yayasan Sehat Peduli Kasih. Yayasan Sehat peduli kasih masuk ke dalam grade C karena menjawab seluruh indikator pertanyaan grade C. Secara kelembagaan, Yayasan Sehat Peduli Kasih termasuk OMS menengah. Yayasan ini menyatakan pernah bekerjasama dengan lembaga donor untuk pengembangan kegiatan.

Dari sisi *enabling* (kemampuan), Yayasan Sehat Peduli Kasih menyatakan memerlukan peningkatan kapasitas SDM organisasi, manajemen organisasi dan tim proposal. Sedangkan dari sisi *empowering* Yayasan Sehat Peduli Kasih menyadari pentingnya pendanaan dari beragam lembaga oleh karenanya Yayasan ini sedang intens membuat proposal.

### Yayasan Sehat Peduli Kasih



Gambar 5.29 Spider Check OMS Grade C

#### 5.7.4 Grade D– Beranda Perempuan

Beranda Perempuan adalah satu dari 338 OMS yang masuk dalam grade D. Beranda Perempuan masuk kedalam kategori grade D karena dua hal, yakni: *pertama*, legalitas atau pengesahan yang dimiliki oleh Beranda Perempuan hanya akta notaris. *Kedua*, dari indikator pertanyaan yang diajukan, Beranda Perempuan hanya memenuhi jawaban atas pertanyaan Grade D.

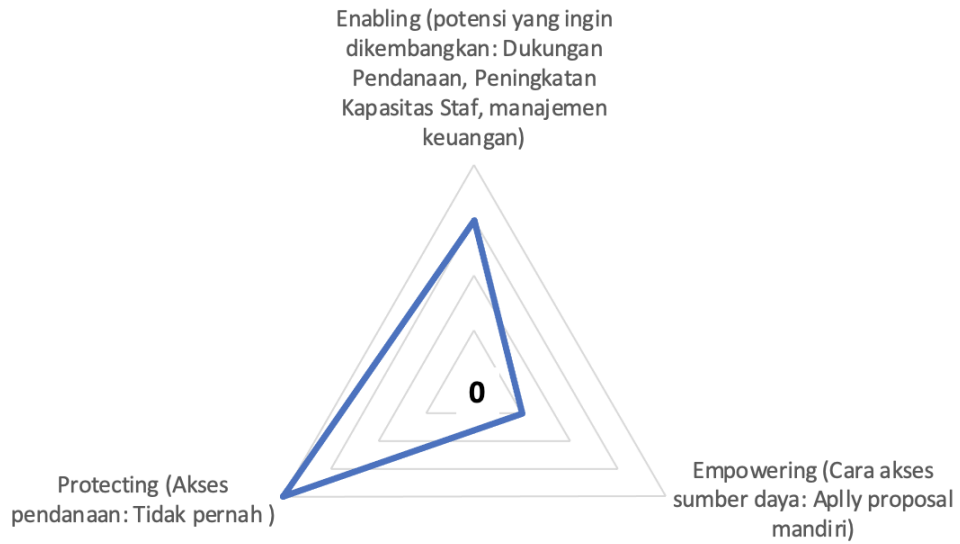
Untuk menentukan kategori grade D, soal legalitas menjadi faktor utama sebab ke depan, lembaga-lembaga ini akan dihadapkan pada keberlanjutan organisasi yang salah satu isunya adalah soal pendanaan. Dari sekian banyak faktor akses pendanaan, terutama dari pemerintah dan swasta adalah soal legalitas kelembagaan. Jadi yang perlu didorong atas lembaga-lembaga yang belum memiliki legalitas, baik dari KemenkumHAM maupun Kementerian Dalam Negeri melalui Kesbangpol harus didorong upaya legalisasi dari pemerintah.

Soal legalitas terkonfirmasi dari pertanyaan soal aksesibilitas pendanaan. Beranda Perempuan menyatakan tidak pernah mendapatkan pendanaan dari pihak manapun.

Dari sisi *enabling* (kemampuan), Beranda Perempuan menyatakan memerlukan dukungan soal pendanaan, peningkatan kapasitas staf serta manajemen keuangan.

Selama ini Beranda Perempuan mengupayakan pendanaan penyebaran proposal mandiri.

### Beranda Perempuan



Gambar 5.30 Spider Check OMS Grade D

## BAB 6

# KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 6.1 Kesimpulan

*Focused Group Discussion* yang dilakukan untuk memperoleh data keseluruhan Ormas yang terdaftar di Kemenkumham tidak menghasilkan akses data dimaksud, karena berbagai alasan yang dikemukakan oleh pihak Kemenkumham. Ini membuat data Ormas yang menjadi responden dalam riset ini tidak bisa diklaim sebagai data yang proporsional secara wilayah.

Dari hasil verifikasi data OMS yang telah dilakukan, dari *baseline* data sebanyak 2.152 OMS, diperoleh data responden sebanyak 509 atau 24%.

Dari 509 OMS yang berpartisipasi, ditemukan beberapa hal penting yang menjadi kesimpulan penelitian ini, yakni:

1. Dari 509 OMS, 338 OMS (66%) hanya masuk pada kategori OMS eksisting (eksis). Ini adalah kategori minimal dalam riset ini (Grade D). OMS eksisting ini bisa dibagi kepada dua bagian OMS, yakni:

- OMS eksis karena ketiadaan data legalitas dan atau kurang memenuhi indikator pertanyaan soal kapasitas, yakni sebanyak 65 lembaga, dan
- OMS yang memiliki legalitas (AHU dan atau SKT) namun tidak memenuhi indikator pertanyaan untuk lembaga yang memiliki kapasitas (Grade C, B, dan A) yakni sebanyak 258 lembaga

Terdapat 15 OMS yang tidak menjawab apakah memiliki legalitas atau tidak. Ketiadaan informasi ini dimasukkan dalam kategori blank/tidak memiliki.

2. 171 OMS (34%) yang berpartisipasi masuk pada kategori lembaga kapabel, dengan tingkat yang berbeda. Merujuk pada *grading* yang ditetapkan dalam penelitian ini, hasilnya adalah sebagai berikut:

- OMS dengan kapasitas grade A sebanyak 23 lembaga (5%) yang tersebar di 11 provinsi
- OMS dengan kapasitas grade B sebanyak 22 (4%) lembaga dan tersebar di 15 provinsi
- OMS dengan kapasitas grade C sebanyak 126 (25%) lembaga dan tersebar di 29 provinsi

3. Model peningkatan kapasitas OMS dari data OMS yang mengikuti survei sangat beragam dan di setiap *grade* memiliki keunikan masing-masing. Terkait dengan model pengembangan kapasitas ini akan dilihat melalui tiga hal, yakni:

**a) Pengembangan Potensi**

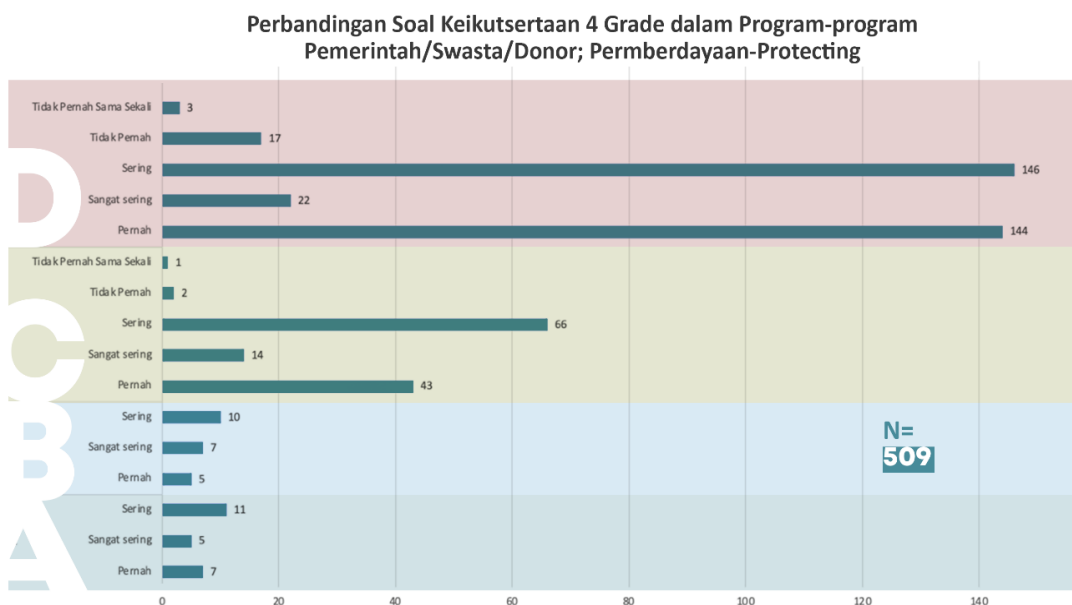
- OMS *Grade A* mengidentifikasi satu hal pokok soal peningkatan kapasitas, yakni: aspek pemberdayaan komunitas. Artinya OMS di *Grade A* Sudah bergeser dari penguatan ke dalam lembaganya sendiri menjadi pengembangan kapasitas ke mitra-mitra lokal/penerima manfaat.
- OMS *Grade B* lebih menitikberatkan pada kemandirian pendanaan organisasi yakni melalui Kewirausahaan, peningkatan kapasitas organisasi (terkait manajerial organisasi, aturan organisasi) serta soal pendanaan yang melibatkan pihak luar, terutama lembaga donor.
- OMS *Grade C*: menyatakan lebih memprioritaskan pada aspek peningkatan kapasitas SDM organisasi, lalu peningkatan kapasitas organisasi dan soal pendanaan yang melibatkan pihak ketiga dalam hal ini donor, pemerintah maupun swasta.
- OMS *Grade D*: hampir sama dengan OMS *Grade C*, OMS *Grade D* lebih memprioritaskan soal peningkatan kapasitas SDM, peningkatan organisasi dan kewirausahaan serta pemberdayaan komunitas.

**b) Penguatan potensi OMS**

- Dari data yang didapatkan, 3 prioritas utama soal penguatan potensi yang disuarakan oleh OMS *Grade A* adalah: pengembangan jaringan, peyusunan proposal atau akses pendanaan yang ditujukan kepada donor, kemitraan dengan pemerintah.
- prioritas OMS *Grade B* adalah: penyusunan proposal, yakni model pendanaan yang ditujukan kepada donor, terutama donor internasional. *Kedua*, pengembangan jejaring organisasi. *Ketiga*, potensi soal peningkatan SDM melalui berbagai pelatihan dan pendidikan.
- Prioritas OMS *Grade C*, adalah: penyusunan proposal, yakni model pendanaan yang ditujukan kepada donor, terutama donor internasional. *Kedua*, pengembangan jejaring organisasi. *Ketiga*, bermitra dengan pemerintah. Ketiganya terkait dengan sektor pembiayaan/dana.
- 3 Prioritas OMS *Grade D*, adalah: pemberdayaan komunitas, peningkatan kapasitas organisasi, dan peningkatan kapasitas SDM.

**c) Keikutsertaan OMS dalam program Pemerintah/Swasta/Donor (protecting)**

Untuk peningkatan kapasitas rumpun ini bisa dilihat dalam grafik berikut ini:



*Gambar 6.1 Keikutsertaan OMS dalam program pihak lain*

Dari grafik perbandingan di atas terlihat bahwa dalam OMS *Grade D* dan *C* masing-masing terdapat OMS yang masih tidak pernah dan tidak pernah sama sekali ikut serta dalam program-program baik pemerintah, swasta maupun donor.

Berbeda dengan OMS *Grade A* dan *B* adalah OMS yang didominasi oleh lembaga yang berpengalaman bermitra atau ikut serta dalam program atau pekerjaan bersama pemerintah, swasta atau lembaga donor.

4. Dari temuan hasil survei terkait dengan model pemberdayaan, dibagi kepada tiga bagian sesuai dengan urutan paling banyak disebut oleh OMS terkait dengan model pemberdayaan.

**Pertama**, Model pemberdayaan yang paling banyak diharapkan oleh OMS dari *Grade A-D* adalah model pemberdayaan komunitas/masyarakat.

**Kedua**, model pemberdayaan lainnya yang diharapkan oleh OMS adalah soal peningkatan kapasitas organisasi, baik dari sisi manajerial, finansial, bahkan pembuatan SOP yang dibutuhkan oleh OMS. Model pemberdayaan dengan spesifikasi soal peningkatan kapasitas ini disebut oleh seluruh OMS dari semua *grade* sebagai prioritas kedua.

**Ketiga**, untuk model pemberdayaan ketiga agak berbeda antar OMS. OMS *Grade A*, misalnya lebih mengedepankan aspek soal peningkatan potensi pengembangan SDA. Untuk OMS *Grade B* memilih model pemberdayaan untuk keberlanjutan OMS, yakni melalui kewirausahaan, OMS *grade C* memilih 2 model,

yakni peningkatan kapasitas SDM dan kewirausahaan untuk keberlanjutan organisasi. Dan OMS *Grade D* memilih model peningkatan kapasitas SDM pengurus organisasi.

## 6.2 Rekomendasi

Rekomendasi ini secara khusus ditujukan untuk memberikan basis penguatan dan orientasi implementasi Dana Abadi OMS yang sejak awal mendasari dilakukannya kajian ini.

### 6.2.1 Umum

1. Melihat tingkat urgensinya yang sangat tinggi, pada tingkat realisasinya, Dana Abadi OMS harus memberi perhatian khusus pada dimensi pemberdayaan OMS, terutama kepada OMS-OMS yang tingkat kapabilitasnya relatif rendah. Dalam hal ini, kebijakan *affirmative action* bisa dipertimbangkan menjadi alternatif untuk mendorong pemerataan tingkat partisipasi masyarakat sipil dalam proses pembangunan.
2. Dalam konteks pemberdayaan dan peningkatan kapasitas, penting kiranya melihat tingkat kapabilitas OMS untuk merumuskan model pemberdayaan dan peningkatan kapasitas yang lebih tepat dan terukur.
3. Perlu didorong kajian lebih lanjut untuk merumuskan satu instrumen metodologis dan proses verifikasi yang terukur dalam kerangka memetakan kelompok sasaran Dana Abadi OMS untuk menjadi standar proses verifikasi baku, termasuk instrumen verifikasi faktual.

### 6.2.2 Pemerintah

1. Mengingat pentingnya posisi OMS dalam pembangunan demokrasi, persoalan *database* OMS harus menjadi isu yang mesti dipecahkan bersama, baik oleh pemerintah (Kemenkumham sebagai pemangku data registrasi, Kemendagri sebagai pemangku pemberdayaan Ormas) dan lembaga lainnya, serta organisasi masyarakat sipil sendiri.
2. Terkait dengan *database* Organisasi Masyarakat Sipil (Ormas Berbadan Hukum), pemerintah, dalam hal ini adalah Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, perlu lebih terbuka dan membangun mekanisme akses terhadap data AHU. Data akumulatif tanpa pemutakhiran akan berakibat pada kekeliruan pemetaan dan perlakuan. Demikian juga dengan *database* Organisasi Masyarakat Sipil berbasis

Surat Keterangan Terdaftar yang berada dalam wilayah kerja Kementerian Dalam Negeri.

3. Dalam hal ini, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri perlu menjalin kerja sama dan koordinasi yang lebih intensif dengan Organisasi Masyarakat Sipil untuk secara reguler melakukan verifikasi dan pemetaan kapabilitas Organisasi Masyarakat Sipil.
4. Terkait nomenklatur Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) dan cara pandang yang berbeda antara beberapa kementerian dan juga antara pemerintah dengan kalangan OMS, perlu kiranya meredefinisi, atau mengklasifikasi jenis-jenis Ormas berdasarkan karakteristik atau kualifikasi tertentu.

### **6.2.3 Organisasi Masyarakat Sipil**

1. Terkait dengan ketimpangan kapabilitas antar Organisasi Masyarakat Sipil, sangat penting dipikirkan untuk membangun kesadaran bersama akan pentingnya penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat sipil. Inisiatif-inisiatif penguatan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil harus menjadi *concern* bersama. Termasuk dalam hal ini adalah inisiatif untuk mengupayakan pendanaan alternatif.
2. Dalam konteks penguatan tingkat kepercayaan publik dan pemerintah terhadap masyarakat sipil, Organisasi Masyarakat Sipil perlu membangun dan mengembangkan berbagai instrumen yang mendorong tingkat keberdayaan, akuntabilitas, dan transparansi di dalam diri Organisasi Masyarakat Sipil sendiri.
3. Dana Abadi Organisasi Masyarakat Sipil harus dikampanyekan lebih lanjut kepada kelompok masyarakat sipil yang lebih luas agar terimplementasi secara tepat sasaran dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal. 2007. Analisis Eksistensi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2000. Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Agusta, I. 2002. "Metode evaluasi program pemberdayaan". Makalah, disampaikan pada Kongres dan Seminar Nasional IV Ikatan Sosiologi Indonesia Tahun 2002 di Bogor, Jawa Barat, 28-29 Agustus.
- Armawi, A. (2011). Eksistensi Manusia dalam Filsafat Sören Kierkegaard. Jurnal Filsafat, 21, 21–29. <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/4738/9371>
- Creswell, John W. 2019. Research Desain; Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Effendi, Sofian dan Tukiran (editor). 2012. *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta: LP3ES)
- Ife, Jim. 1995. *Community Development, Creating Community Alternatives, Vision, Analysis, and Practice*. Australia: Longman Australia
- Irawan, Bambang. 2016. *Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik*. (Jakarta: Publica Press).
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Surabaya: Bappenas.
- Khotami. 2017. "The Concept of Accuntability in Good Governance" dalam *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR) Vol 163*. ATlantos Press.
- Madai. 2021. *Panduan Fasilitator Pengukuran Indeks Kinerja Organisasi*. (Jakarta: Madani).
- Omas bulan Samosir, Ph. D, dkk (penyusun). 2020. Modul 1 Konsep dan Dasar Kependudukan. (Jakarta: BKKBN)
- Toegimin, Frans, dkk. 2021. *Indeks Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia 2021*. (Jakarta: Konsil LSM Indonesia)
- Tohari, Anik Hamim Tohari, dkk. 2022. *Laporan Verifikasi Data OMS*. (Jakarta: Konsil-Bappenas)

## **Undang-undang dan Peraturan Lainnya**

UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas

Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

FGD dengan Kemenkumham RI, Ditjen AHU, Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Bappenas, Deputi Bidang Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kantor Staf Presiden (KSP), Kedepatian V, Pokja Dana Abadi OMS dan stakeholder lain yang terkait dengan survei verifikasi OMS pada 3 Oktober 2023

## LAMPIRAN 1:

### SIMULASI Perbedaan *Grading* Survei Konsil LSM-Bappenas dan Konsil-INFID

Sebelum menjelaskan proses *grading* survei verifikasi OMS Konsil LSM-INFID, sebelumnya Konsil LSM sudah melakukan survei verifikasi data OMS bekerja sama dengan Bappenas. Kedua survei ini menerapkan pola survei yang sama yakni ingin melihat dan mengkategorisasi OMS berdasarkan akuntabilitasnya. Namun demikian, dalam survei Konsil LSM-Bappenas, indikator pertanyaan untuk menggali informasi akuntabilitas OMS masih di tahap mudah dan menengah. Sedangkan dalam survei Konsil LSM-INFID, indikator pertanyaan terkait OMS ditingkatkan ke aspek yang lebih kompleks. Selain itu, dalam survei Konsil LSM-INFID juga ditanyakan pertanyaan-pertanyaan kunci untuk menggali soal model pemberdayaan yang dibutuhkan oleh OMS di semua level *grade*.

Secara jumlah, indikator pertanyaan yang digunakan dalam survei Konsil LSM-Bappenas berjumlah 29 indikator pertanyaan, sedangkan indikator pertanyaan untuk survei Konsil LSM-INFID berjumlah 53 pertanyaan. Berikut perbedaan komposisi indikator pertanyaan verifikasi Konsil-Bappenas dan Konsil-INFID.

Tabel 5.2 Indikator Pertanyaan

Indikator Pertanyaan Konsil LSM-Bappenas	Indikator Pertanyaan Konsil LSM-INFID
1. Legalitas	1. Legalitas
2. Jenis Legalitas	2. Jenis Legalitas
3. Alamat Kantor	3. Alamat Kantor
4. Email	4. Email
5. Visi	5. Visi
6. Misi	6. Misi
7. AD	7. AD
8. ART	8. ART
9. Struktur Organisasi	9. Struktur Organisasi
10. Isu Utama	10. Isu Utama
11. Isu Lainnya	11. Isu Lainnya
12. Afiliasi Partai Politik	12. Afiliasi Partai Politik
13. NPWP	13. NPWP
14. Rekening a.n lembaga	14. Rekening a.n lembaga
15. Laporan keuangan	15. Laporan keuangan
16. Rencana kerja/rancangan kegiatan	16. Rencana kerja/rancangan kegiatan

Indikator Pertanyaan Konsil LSM-Bappenas	Indikator Pertanyaan Konsil LSM-INFID
<ul style="list-style-type: none"> <li>17. Laporan kegiatan/program</li> <li>18. Laporan pajak</li> <li>19. Rencana tahunan</li> <li>20. Kompetensi utama</li> <li>21. Program rutin</li> <li>22. Kelompok sasaran</li> <li>23. SOP keuangan</li> <li>24. Website</li> <li>25. Facebook</li> <li>26. Instagram</li> <li>27. Twitter</li> <li>28. Youtube</li> <li>29. Sumber pendanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>17. Laporan kegiatan/program</li> <li>18. Laporan pajak</li> <li>19. Rencana tahunan</li> <li>20. Kompetensi utama</li> <li>21. Program rutin</li> <li>22. Kelompok sasaran</li> <li>23. SOP keuangan</li> <li>24. Website</li> <li>25. Facebook</li> <li>26. Instagram</li> <li>27. Twitter</li> <li>28. Youtube</li> <li>29. Sumber pendanaan</li> <li>30. Mekanisme rapat</li> <li>31. Audit project</li> <li>32. Tenaga ahli</li> <li>33. Renstra</li> <li>34. Pelibatan penerima manfaat</li> <li>35. SOP Program</li> <li>36. Publikasi rutin</li> <li>37. Memiliki sumber dana</li> <li>38. SOP pengadaan barang jasa</li> <li>39. Kepemilikan unit usaha</li> <li>40. Mekanisme pengawasan</li> <li>41. SOP Ketenagakerjaan</li> <li>42. Mekanisme MEL</li> <li>43. Pengumpulan dan analisis pembelajaran organisasi</li> <li>44. Annual report</li> <li>45. Perencanaan peningkatan SDM</li> <li>46. Mekanisme Volunteer</li> <li>47. Audit eksternal</li> <li>48. Aset sendiri</li> <li>49. Mekanisme anti fraud</li> <li>50. Mekanisme pengaduan</li> <li>51. Tools keberlanjutan organisasi</li> <li>52. Prosedur keamanan data</li> </ul>

Indikator Pertanyaan Konsil LSM-Bappenas	Indikator Pertanyaan Konsil LSM-INFID
	53. Prosedur keamanan staf

Jika melihat jumlah indikator ini, setidaknya terdapat selisih 24 pertanyaan yang membedakan riset Konsil LSM-Bappenas dan Konsil LSM-INFID. Selisih inilah yang kemudian berpengaruh pada perubahan posisi *grading* hasil riset Konsil LSM-Bappenas dan Konsil LSM-INFID. Karena riset Konsil LSM-INFID untuk verifikasi ini adalah survei lanjutan, indikator yang digunakan menjadi lebih kompleks.

Berikut simulasi penggunaan indikator dalam survei Konsil Bappenas dan Konsil-Infid.

Tabel 5.3 Simulasi Penggunaan Indikator

Nama Lembaga	Posisi Grade dalam Survei Bappenas	Jumlah Indikator terpenuhi	Posisi Grade dalam Survei INFID	Jumlah Indikator or Terpenuhi	Keterangan
Kapal Perempuan	A	29	A	53	Kapal Perempuan mengisi seluruh pertanyaan riset dengan jawaban Iya untuk pertanyaan-pertanyaan kunci dalam grade A
Yayasan Intermedia Prana	A	29	B	46	Dalam <i>grading</i> survei Bappenas, Yayasan Intermedia Prana menjawab seluruh pertanyaan kunci grade A (29 pertanyaan) sedangkan dalam survei Konsil LSM-INFID, dari 53 pertanyaan, hanya 46 pertanyaan yang dijawab Iya. Ada 7 pertanyaan kunci dalam Grade A yang jawabannya tidak:  Kepemilikan <i>tools</i> keberlanjutan  Audit kelembagaan SOP kelembagaan Aset

Dua contoh OMS di atas bisa menjelaskan bagaimana posisi OMS dengan jawaban yang diberikan sesuai dengan indikator pertanyaan. Kapal Perempuan, misalnya, dalam survei Konsil-Bappenas, Kapal Perempuan menjawab seluruh indikator pertanyaan sehingga menempatkan Kapal Perempuan dalam grade A, begitupun dengan survei Konsil-INFID, Kapal Perempuan secara konsisten menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan sehingga menempatkan posisi Kapal Perempuan sebagai OMS yang menduduki grade A.

Berbeda dengan Kapal Perempuan, Yayasan Intermedia Prana pada survei Konsil-Bappenas berada di grade A karena dari seluruh pertanyaan yang diajukan, Yayasan Intermedia Prana menjawab seluruh pertanyaan (29 pertanyaan) sedangkan dalam survei Konsil-INFID, Yayasan Intermedia Prana dari 53 pertanyaan hanya menjawab 46 pertanyaan dengan jawaban “iya” dan 7 pertanyaan lainnya di jawab “tidak/tidak punya”, seperti: Kepemilikan *tools* keberlanjutan, audit kelembagaan, SOP kelembagaan, dan kepemilikan aset.

# LAPORAN SURVEI

**KONDISI EKSTING  
& KAPASITAS**

KELEMBAGAAN OMS  
DI INDONESIA

